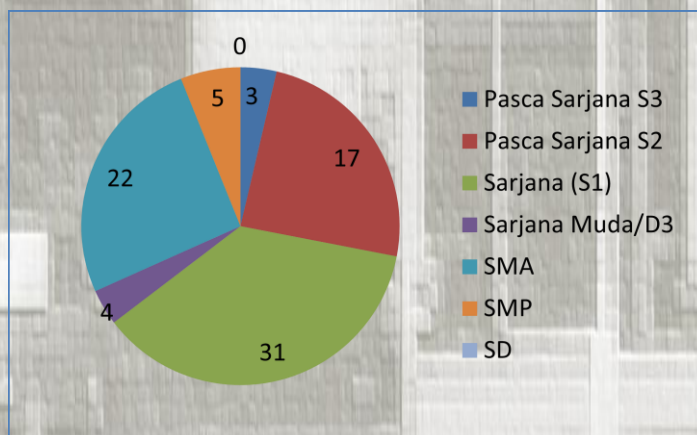
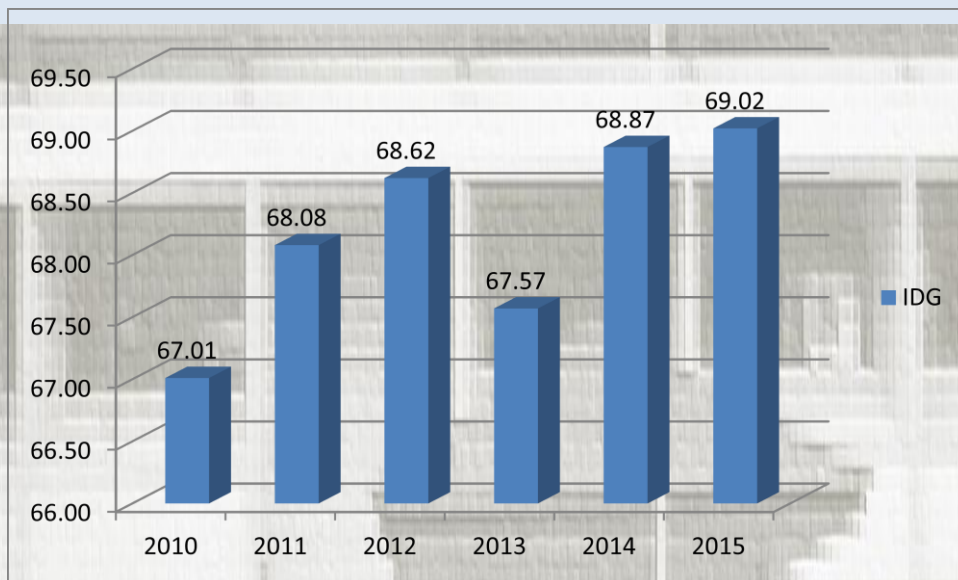




LAPORAN KINERJA BADAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK DAN KELUARGA BERENCANA (LKIP BP3AKB) PROVINSI JAWA BARAT TAHUN 2016



BP3AKB PROVINSI JAWA BARAT

Web: bp3akbjabarprov.go.id

TLP./Fax. 022-7513581

EMAIL : bp3apkkb@jabarprov.go.id, bp3akbjabar.renprog@yahoo.com

JANUARI 2017

IKHTISAR EKSEKUTIF

Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Badan Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana (BP3AKB) Provinsi Jawa Barat Tahun 2016 berorientasi kepada Rencana Kinerja BP3AKB Tahun 2016, Renstra BP3AKB Tahun 2013-2018, RKPD Jawa Barat Tahun 2016, KUA dan Strategi Prioritas (SP) APBD Provinsi Jawa Barat Tahun 2016 serta DPA BP3AKB Tahun Anggaran 2016. Evaluasi dan Analisis LKIP tersebut difokuskan kepada capaian kinerja sasaran strategis Tahun Anggaran 2016.

Sasaran strategis BP3AKB Provinsi Jawa Barat terdiri dari 3 (tiga) sasaran yaitu :

- 1) Meningkatnya peran serta dan kesetaraan gender dalam pembangunan
- 2) Meningkatnya kualitas hidup dan perlindungan perempuan dan anak
- 3) Menurunnya angka kelahiran dan meningkatnya ketahanan keluarga

Indikator Kinerja Tahun 2016 terdiri dari Indeks Pemberdayaan Gender (IPG), Indeks Pembangunan Gender (IDG), Prosentase kabupaten/kota yang telah membentuk POKJA PUG (Perjanjian Kinerja), Jumlah perolehan Anugerah Parahita Ekapraya kabupaten/kota, Meningkatnya penanganan kekerasan terhadap perempuan, Meningkatnya jumlah perempuan birokrat dalam manajemen (Perjanjian Kinerja), Jumlah kabupaten/kota yang mendapat penghargaan Kota Layak Anak (KLA), Prosentase peserta KB Aktif terhadap PUS (Pasangan Usia Subur), Rata-rata Usia Perkawinan Pertama (UKP) dan Menurunnya Jumlah Penduduk Pra Sejahtera.

Capaian indikator kinerja IPG dan IDG diperoleh dari Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KPPPA) bekerjasama dengan BPS-RI dengan hasil berikut :

Indeks Pembangunan Gender Jawa Barat menurut data KPPPA terakhir adalah 89.11%, dibanding target 89.68% maka tercapai 99.36%. IPG mengalami peningkatan dibanding tahun lalu yaitu sebesar 88.35%. Sedangkan Indeks Pemberdayaan Gender Jawa Barat adalah sebesar 69.02 poin, dibanding target 73 poin maka tercapai 94.55%.

Angka-angka ini menunjukkan hasil pembangunan bidang pemberdayaan perempuan, perlindungan anak serta pengarusutamaan gender, yang selanjutnya dievaluasi oleh Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. Bagi daerah yang mendapat nilai baik diberikan Penghargaan Presiden yaitu Penghargaan Anugerah Parahita Ekapraya. Pada Tahun 2016 Provinsi Jawa Barat meraih penghargaan ini dengan kategori tertinggi yaitu Anugerah Parahita Ekapraya Kategori Mentor.

Indikator Prosentase kabupaten/kota yang telah membentuk POKJA PUG dari target 80% atau 21 kabupaten/kota, tercapai sebanyak 20 kabupaten/kota (74.07%) artinya capaian target 92.59%.

Indikator Jumlah perolehan Anugerah Parahita Ekapraya kabupaten/kota ditargetkan 9 kabupaten/kota dan tercapai 13 kabupaten/kota yang memperoleh penghargaan sehingga tercapai 144.44%.

Indikator Jumlah kabupaten/kota yang mendapat penghargaan Kota Layak Anak (KLA) pada Tahun 2016 diadakan penilaiannya oleh KPPPA sehingga kumulatif masih 35 penghargaan KLA kabupaten/kota atau capaian target 92.11%. Perolehan Penghargaan KLA tahun terakhir sebanyak 8 kabupaten/kota.

Pengukuran indikator kinerja KB dilakukan oleh Perwakilan BKKBN Provinsi Jawa Barat. Dari target indikator sasaran, sampai dengan bulan Desember tahun 2016 dapat dicapai Prosentase Peserta KB aktif terhadap Pasangan Usia Subur sebesar 74.88% atau mencapai keberhasilan 99.84%, namun diantaranya target Peserta KB Pria sebesar 3% masih tetap pada angka 2.49% atau target tercapai 83%.

Pendewasaan Usia Perkawinan Wanita pada tahun 2016 tercatat 19.6 tahun, masih dibawah target 20 tahun (98%). Sementara itu jumlah penduduk miskin tahun 2016 tercatat mengalami penurunan dari 9.53% tahun 2015 menjadi 8.77% tahun 2016 (BPS). Dikaitkan dengan target penurunan Keluarga Miskin 3.6% dan terjadi penurunan 3.88% maka capaian target 107.78%.

Penjemputan dan pemulangan korban trafficking atau perdagangan orang, pada tahun 2015 BP3AKB berhasil memulangkan 11 orang korban trafficking. Selanjutnya pada Tahun 2016 sebanyak 37 korban dapat dipulangkan dan diberikan pelayanan penanganan. Rincian pemulangan yaitu tahun 2009 22 orang, Tahun 2010 56 orang, Tahun 2011 75 orang, Tahun 2012 45 orang, Tahun 2013 50 orang, Tahun 2014 13 orang. Sebagai langkah pelayanan, pada tahun 2010 telah dibentuk Pusat Pelayanan Terpadu Perlindungan Perempuan dan Anak (P2TP2A) di tingkat Provinsi Jawa Barat beralamat di Jl. Riau Nomor 4. P2TP2A berfungsi sebagai tempat melapor, menangani, singgah sementara bagi para korban kasus kekerasan yang biasanya adalah perempuan dan anak.

Dengan kinerja yang terkait dengan permasalahan dalam keluarga dan masa depan generasi penerus, BP3AKB dituntut untuk dapat menjalin kerjasama intensif dengan berbagai pihak, baik dari pemerintahan, kepolisian, kejaksaan dan pengadilan dan lembaga-lembaga masyarakat yang sudah sejak lama terjun ke dalam penanganan kasus-kasus kekerasan serta perdagangan orang. Oleh karena itu BP3AKB berupaya terus melakukan koordinasi berupa pertemuan dan sosialisasi agar setiap pihak dapat bersatu padu bekerja sama dan berbagi peran untuk mewujudkan kehidupan keluarga dan masyarakat yang damai, sejahtera dan sehat.

Dalam kinerja keuangan, capaian kinerja dari alokasi Belanja Langsung sebesar Rp.45,381,466,800.00 terealisasi sebesar Rp.41,865,825,758.00 atau 92.08%. Capaian kinerja keuangan dari alokasi Belanja Tidak Langsung sebesar Rp.11,206,239,995.00 terealisasi sebesar Rp.10,233,730,506.00 atau 92.71%. dengan demikian dari total alokasi anggaran BP3AKB Tahun 2016 sebesar Rp.54,419,466,800.00 terealisasi sebesar Rp.52,099,556,264.00 atau 92.34%.

KATA PENGANTAR

Syukur Alhamdulillah kita panjatkan kehadiran Allah SWT., berkat rahmat dan anugerah-Nya disertai kerja sama dan kebersamaan seluruh keluarga besar BP3AKB Provinsi Jawa Barat telah tersusun Laporan Kinerja Badan Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana (LKIP BP3AKB) Provinsi Jawa Barat Tahun 2016.

Penyusunan LKIP BP3AKB Tahun Anggaran 2016 merupakan laporan pencapaian kinerja SKPD dari evaluasi pelaksanaan Rencana Kinerja Tahunan, sebagai laporan hasil kinerja kepada Gubernur Jawa Barat. Dalam laporan ini menggambarkan capaian kinerja sasaran strategis yang diukur oleh indikator kinerja sebagaimana tertuang dalam format Rencana Kegiatan Tahunan (RKT) sebagai penjabaran RENSTRA, Pengukuran Kinerja, serta Perjanjian Kinerja.

LKIP BP3AKB Provinsi Jawa Barat Tahun 2016 menguraikan sejumlah capaian kinerja dari 3 (tiga) sasaran strategis yang dibiayai dari Anggaran Belanja Langsung dan Belanja Tidak Langsung dalam pencapaian kinerja sasaran, program dan kegiatan yang ditetapkan. Laporan Kinerja ini diharapkan memberikan kontribusi yang optimal terhadap peningkatan kinerja BP3AKB untuk mendukung kinerja Pemerintah Provinsi Jawa Barat.

Mudah-mudahan LKIP BP3AKB Provinsi Jawa Barat ini dapat memberikan manfaat yang optimal dalam pengembangan kinerja BP3AKB mendatang serta memberikan kontribusi dalam penguatan Manajemen Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Barat. Harap dimaklumi, bahwa penyusunan LKIP ini masih belum sempurna sehingga diharapkan memperoleh saran dan masukan dari Pejabat berwenang terkait.

Bandung, 5 Januari 2017

KEPALA BP3AKB PROVINSI JAWA BARAT

Dr.Ir. DEWI SARTIKA, M.Si.
NIP 19630122 1986032004

DAFTAR ISI		Hlm.
IKHTISAR EKSEKUTIF		I
KATA PENGANTAR		ii
DAFTAR ISI		iv
BAB I	PENDAHULUAN	1
	1.1 Latar Belakang	1
	1.2 Dasar Hukum	2
	1.3 Tujuan Penyusunan LKIP	3
	1.4 Tugas Pokok, Fungsi dan Struktur Organisasi BP3AKB Provinsi Jawa Barat	4
	1.5 Gambaran Umum BP3AKB Provinsi Jawa Barat	6
BAB II	PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA	11
	2.1 Rencana Strategis 2013-2018	11
	2.1.1. Visi dan Misi BP3AKB	12
	2.1.2 Tujuan, Sasaran, dan Indikator Sasaran	12
	2.1.3 Kebijakan, Strategi dan Program BP3AKB	15
	2.2 Perjanjian Kinerja Tahun 2016	17
	2.3 Rencana Aksi Tahun 2016 : Program, Kegiatan dan Anggaran Pendukung Perjanjian Kinerja Tahun 2016	19
BAB III	AKUNTABILITAS KINERJA	26
	3.1 Capaian Kinerja	26
	3.1.1 Kerangka Pengukuran Kinerja	25
	3.1.2 Evaluasi Program dan Kegiatan yang Menunjang Capaian Kinerja	27
	3.1.3 Evaluasi Capaian Indikator Kinerja Tahun 2016	46
	Evaluasi Capaian Kinerja Triwulanan Tahun 2016	50
	3.1.4. Perbandingan Realisasi dan Capaian Kinerja Tahun 2011 – 2015	50
	3.1.5 Realisasi Kinerja Indikator RPJMD dan RENSTRA	53
	3.1.6 Analisis Keberhasilan/ Kegagalan	54
	3.1.7 Rencana Tindak Lanjut Program dan Kegiatan	55
	3.1.8 Penghargaan Yang Diperoleh Tahun 2016	
	3.2 Akuntabilitas Anggaran	57
	3.2.1. Akuntabilitas Anggaran (Anggaran dan Realisasi Belanja Daerah)	57
	3.2.2. Efisiensi Sumber Daya	60
	3.3 Penghargaan Yang Diraih BP3AKB Tahun 2016	61

BAB IV	P E N U T U P	65
4.1	Keberhasilan dan Kegagalan Kinerja Sasaran Strategik	66
4.2	Kendala, Hambatan Pencapaian Kinerja Sasaran Strategik serta Langkah Antisipatif	66
LAMPIRAN	67
Lampiran 1.	Rencana Stratejik 2013 - 2018	67
Lampiran 2.	Rencana Kinerja Tahunan	71
Lampiran 3.	Perjanjian Kinerja Tahun 2016	72
Lampiran 4.	Rencana Aksi Tahun 2016	74
Lampiran 5.	Indikator Kinerja Utama (IKU)	
Lampiran 6.	Pengukuran Kinerja Kegiatan (PKK) Tahun 2016	
Lampiran 7.	Pengukuran Pencapaian Sasaran (PPS) Tahun 2016	
Lampiran 8.	Realisasi Indikator Kinerja Triwulanan Tahun 2016	
Lampiran 9.	Efisiensi Sumber Daya Tahun 2016	
Lampiran 10	Perjanjian Kinerja Tahun 2017	
Lampiran 11	Rekapitulasi Laporan Program/Kegiatan BP3AKB Tahun 2016	
Lampiran 12	Indikator Kinerja Utama (IKU) Gubernur Jawa Barat	
Lampiran 13	Indikator RPJMD Jawa Barat 2013-2018	

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Laporan kinerja instansi pemerintah yang dahulu diistilahkan dengan singkatan LAKIP kini diubah menjadi LKIP. Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) ini didasari Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah serta Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), dimana setiap Gubernur dan Bupati/Walikota wajib untuk membuat Laporan Kinerja instansi pemerintah sebagai wujud pertanggungjawaban dalam mencapai misi dan tujuan organisasi. SAKIP disusun sebagai salah satu bentuk perwujudan *good governance* yang bertanggungjawab, transparan dan akuntabel dalam pelaksanaan pembangunan, sehingga setiap langkah kinerja instansi pemerintah dapat diketahui setiap pihak yang berkepentingan.

Penyelenggaraan SAKIP dilaksanakan untuk penyusunan Laporan Kinerja secara selaras dan sesuai dengan penyelenggaraan Sistem Akuntansi Pemerintahan dan tata cara pengendalian serta evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan.

Penyusunan LKIP di lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Barat dilakukan melalui proses penyusunan Rencana Strategis, Rencana Kerja/ Kinerja Tahunan, Perjanjian Kinerja, Pengukuran dan Evaluasi Kinerja.



Badan Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana disingkat BP3AKB Provinsi Jawa Barat merupakan organisasi yang pada awalnya berdiri pada tanggal 9 Januari 2009 melalui Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 22 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Lembaga Teknis dan Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Jawa Barat dengan nomenklatur Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana (BPPKB).

Pada Tahun 2011, BPPKB berubah nomenklatur menjadi Badan Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Kependudukan dan Keluarga Berencana (BP3APKKB) melalui Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 15 Tahun 2011 tentang Perubahan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 22 Tahun 2008. Selanjutnya pada Tahun 2014, melalui Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perubahan Kedua kali Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 22 Tahun 2008, BP3APKKB berubah nomenklatur menjadi BP3AKB yang merupakan singkatan dari Badan Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga

Berencana. Tugas pokok dan fungsi BP3AKB Tahun 2015 mengacu pada Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 18 Tahun 2015 tentang Tugas Pokok, Fungsi, Rincian Tugas Unit dan Tata Kerja Badan Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana.

Tujuan penyusunan LKIP BP3AKB Provinsi Jawa Barat adalah sebagai bahan evaluasi akuntabilitas kinerja bagi pihak yang membutuhkan, penyempurnaan dokumen perencanaan periode yang akan datang, penyempurnaan pelaksanaan program dan kegiatan yang akan datang, serta penyempurnaan berbagai kebijakan yang diperlukan.

1.2. Dasar Hukum

Dasar hukum penyusunan LKIP ini adalah :

- 1) Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang bersih dan bebas dari Korupsi, Kolusi, Nepotisme (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
- 2) Undang Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan, Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Negara;
- 3) Undang Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
- 4) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
- 5) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);
- 6) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
- 7) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21);
- 8) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 80);
- 9) Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015-2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 3);
- 10) Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 74 Tahun 2001 tentang Tata Cara Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
- 11) Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah jo. Keputusan Kepala Lembaga Administrasi Negara Nomor 239/IX/6/8/2003 tentang Perbaikan Pedoman Penyusunan Pelaporan Kinerja Instansi Pemerintah;

- 12) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 517);
- 13) Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 12 Tahun 2015 tentang Pedoman Evaluasi Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 986);
- 14) Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1842);
- 15) Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 01 Tahun 2010 tentang Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Layanan Terpadu Bagi Perempuan dan Anak Korban Kekerasan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 56);
- 16) Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 9 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Provinsi Jawa Barat Tahun 2005-2025;
- 17) Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 10 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Provinsi Jawa Barat;
- 18) Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perubahan Kedua kalinya Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 22 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Lembaga Teknis dan Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Jawa Barat;
- 19) Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 10 Tahun 2015 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun Anggaran 2016 (Lembaran Daerah Tahun 2015 Nomor 10 Serie A);
- 20) Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 115 Tahun 2015 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Jawa Barat Tahun 2016;
- 21) Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 18 Tahun 2015 tentang Tugas Pokok, Fungsi, Rincian Tugas Unit dan Tata Kerja Badan Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Provinsi Jawa Barat.

1.3. Tujuan Penyusunan LKIP BP3AKB Provinsi Jawa Barat

Tujuan penyusunan LKIP ini adalah :

- 1) Memberikan laporan mengenai kinerja yang dapat dicapai secara terukur kepada atasan dalam hal ini Gubernur Jawa Barat
- 2) Melaporkan evaluasi kinerja dibandingkan dengan target dan sasaran yang sudah direncanakan.

1.4. Tugas Pokok, Fungsi dan Struktur Organisasi BP3AKB Provinsi Jawa Barat

Badan Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana (BP3AKB) Provinsi Jawa Barat pada awalnya berdiri dengan nomenklatur Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana (BPPKB) pada tanggal 9 Januari

2009. BPPKB merupakan pengembangan dari Bidang Pemberdayaan Perempuan pada Badan Pemberdayaan Masyarakat Desa Provinsi Jawa Barat.

BPPKB dibentuk melalui Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 22 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Lembaga Teknis dan Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Jawa Barat. Selanjutnya pada tanggal 16 Desember 2011 dilakukan perubahan nomenklatur menjadi Badan Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Kependudukan dan Keluarga Berencana (BP3APKKB) melalui Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 5 Tahun 2011 tentang Perubahan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 22 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Lembaga Teknis dan Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Jawa Barat.

Kemudian pada tanggal 6 Januari 2014 ditetapkan kembali perubahan nomenklatur kedua menjadi Badan Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana (BP3AKB) melalui Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 22 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Lembaga Teknis dan Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Jawa Barat.

Tugas pokok dan fungsi BP3AKB Provinsi Jawa Barat mengacu pada Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 18 Tahun 2015 tentang Tugas Pokok, Fungsi, Rincian Tugas Unit dan Tata Kerja Badan Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Provinsi Jawa Barat :

“menyelenggarakan perumusan kebijakan teknis bidang pemberdayaan perempuan, perlindungan anak dan keluarga berencana, menyelenggarakan koordinasi, pembinaan, pengendalian, fasilitasi dan pelaksanaan urusan pemerintahan provinsi di bidang pemberdayaan perempuan, perlindungan anak dan keluarga berencana meliputi aspek peningkatan kualitas hidup dan perlindungan perempuan, pengarusutamaan gender dan kerjasama, kesejahteraan dan perlindungan anak serta keluarga berencana dan kesejahteraan keluarga”.

Dalam menyelenggarakan tugas pokoknya, BP3AKB mempunyai fungsi:

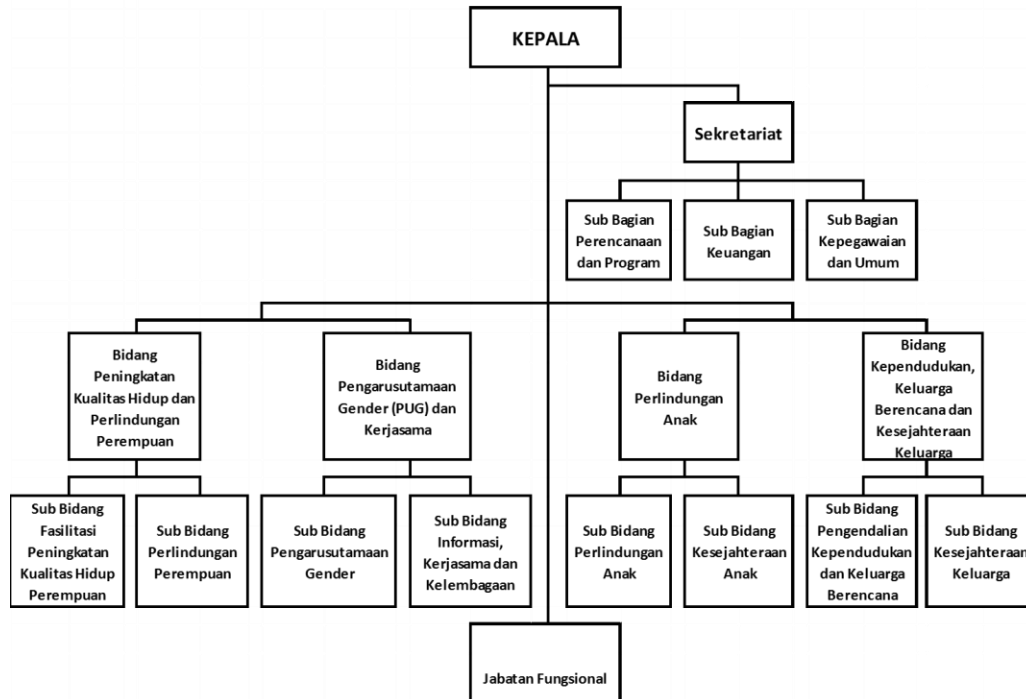
- 1) penyelenggaraan perumusan kebijakan teknis bidang pemberdayaan perempuan, perlindungan anak dan keluarga berencana;
- 2) penyelenggaraan urusan pemerintahan provinsi bidang pemberdayaan perempuan, perlindungan anak dan keluarga berencana;
- 3) penyelenggaraan koordinasi, pembinaan, pengendalian, dan fasilitasi pelaksanaan urusan pemerintahan provinsi di bidang pemberdayaan perempuan, perlindungan anak dan keluarga berencana; dan
- 4) penyelenggaraan pengendalian, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan urusan pemerintahan provinsi di bidang pemberdayaan perempuan, perlindungan anak dan keluarga berencana.

Untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi tersebut, berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 3 Tahun 2014, BP3AKB memiliki Susunan Organisasi Badan yang terdiri atas :

- a. Kepala Badan;
- b. Sekretariat, membawahi:
 - 1) Sub Bagian Kepegawaian dan Umum;
 - 2) Sub Bagian Keuangan;
 - 3) Sub Bagian Perencanaan dan Program
- c. Bidang Peningkatan Kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan, membawahi:
 - 1) Sub Bidang Peningkatan Kualitas Hidup Perempuan;
 - 2) Sub Bidang Perlindungan Perempuan.

Badan Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Provinsi Jawa Barat (BP3AKB)

(Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 3 Tahun 2014)



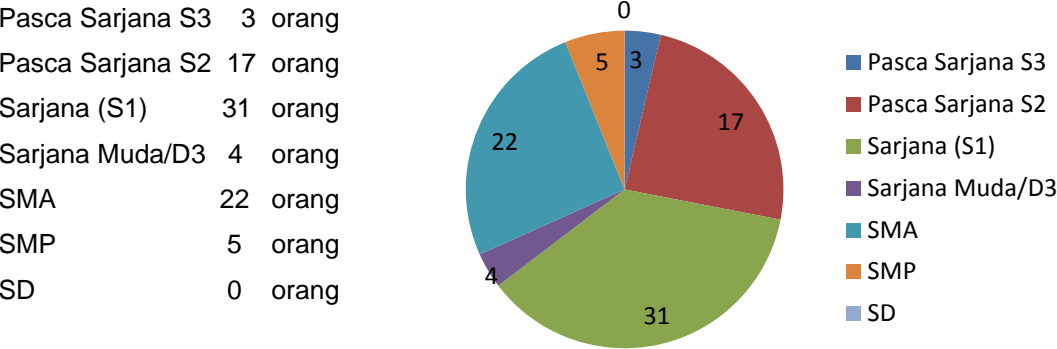
- d. Bidang Pengarusutamaan Gender dan Kerjasama, membawahi:
 - 1) Sub Bidang Pengarusutamaan Gender;
 - 2) Sub Bidang Informasi, Kerjasama dan Kelembagaan
- e. Bidang Perlindungan Anak, membawahi:
 - 1) Sub Bidang Perlindungan Anak;
 - 2) Sub Bidang Kesejahteraan Anak.
- f. Bidang Kependudukan, Keluarga Berencana dan Kesejahteraan Keluarga :
 - 1) Sub Bidang Pengendalian Kependudukan dan Keluarga Berencana
 - 2) Sub Bidang Kesejahteraan Keluarga.

1.5. Gambaran Umum BP3AKB Provinsi Jawa Barat

Sumber Daya Manusia, Sarana dan Prasarana

Jumlah pegawai (PNS) BP3AKB Provinsi Jawa Barat sampai dengan akhir Desember 2016 sebanyak 82 orang terdiri dari 75 PNS dan CPNS 7 (tujuh) orang. PNS terdiri dari 37 perempuan dan 38 laki-laki, CPNS terdiri dari 6 perempuan dan 1 laki-laki sehingga total berjumlah 82 orang (43 perempuan dan 39 laki-laki).

Kualifikasi pendidikan PNS dan CPNS sebagai berikut :



Pegawai menurut Pangkat dan Golongan (PNS) sebagai berikut :

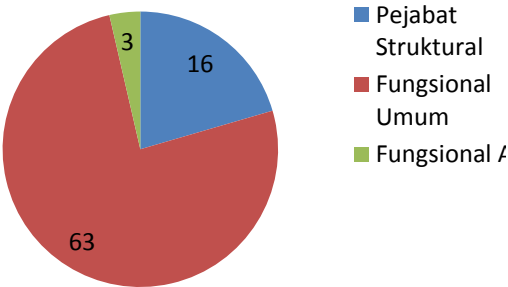
Pembina Utama Madya	IV/d	0	Orang
Pembina Utama Muda	IV/c	2	Orang
Pembina Tingkat I	IV/b	6	Orang
Pembina	IV/a	9	Orang
Penata Tingkat I	III/d	13	Orang
Penata	III/c	10	Orang
Penata Muda Tingkat I	III/b	12	Orang
Penata Muda	III/a	8	Orang
Pengatur Tingkat I	II/d	3	Orang
Pengatur	II/c	3	Orang
Pengatur Muda Tingkat I	II/b	11	Orang
Pengatur Muda	II/a	3	Orang
Juru Tingkat I	I/d	1	Orang
Juru	I/c	1	Orang
JUMLAH		82	Orang

CPNS sebanyak 7 (tujuh) orang, terdiri dari :

Penata Muda	III/a	4	Orang
Pengatur Tingkat	II/a	3	Orang

Jumah pejabat struktural sebanyak 17 orang, masing-masing satu orang eselon II, 5 orang eselon III (satu orang pensiun sehingga eselon III berjumlah 4) dan 11 orang eselon IV. BP3AKB Provinsi Jawa Barat memiliki 2 (dua) orang Pejabat Fungsional Perencana yaitu Perencana Madya dan Perencana Pertama serta satu orang widyaiswara. Jumlah Fungsional Umum sebanyak 63 orang.

JUMLAH PEGAWAI MENURUT JABATAN





Gedung Kantor BP3AKB Provinsi Jawa Barat
Jl. Soekarno Hatta No. 458 Kota Bandung

BP3AKB Provinsi Jawa Barat menempati gedung di Jl. Soekarno Hatta Bandung dengan luas tanah 3.020 m² dan luas bangunan gedung kantor 3.000 m² terdiri dari dua lantai. Gedung ini ditempati sejak pembentukan pertama BP3AKB Provinsi Jawa Barat yaitu 9 Januari 2009. Selain gedung utama juga memiliki mesjid seluas 110 m², kantin dan sarana untuk TPA (Tempat Penitipan Anak) seluas 75,50 m² yang belum dimanfaatkan optimal.

Jumlah sarana mobilitas yaitu kendaraan roda empat sebanyak 14 buah diantaranya terdapat satu unit mobil untuk fasilitasi pelayanan/penjemputan korban trafficking/kekerasan, kemudian kendaraan roda dua sebanyak 11 buah.



Mobil pelayanan korban trafficking/kekerasan

Isu-isu Strategis

1) Kasus kekerasan dan trafficking

Kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak menunjukkan peningkatan, walaupun mungkin disebabkan semakin meningkatnya kesadaran atau keberanian masyarakat untuk melaporkan. Disisi lain, kasus trafficking menunjukkan adanya penurunan. Menurut data P2TP2A Provinsi Jawa Barat pada Januari 2016, dalam kurun waktu 2010-2015, P2TP2A menangani 946 kasus kekerasan. Diantaranya yang paling tinggi adalah kekerasan terhadap anak yaitu mencapai 293 kasus. Sisanya yakni kasus kekerasan dalam rumah tangga, seperti kekerasan fisik kepala keluarga terhadap isteri atau anak, human trafficking (perdagangan manusia), kekerasan pacaran, serta kasus lainnya seperti harta gono-gini maupun kuasa hak pengasuhan anak.

Diantara 27 kabupaten dan kota di Jawa Barat, hampir seluruhnya memiliki masalah kekerasan terhadap anak dan perempuan. Hanya saja, karakteristik kasusnya berbeda-beda. Di Kota Bandung, karakteristiknya lebih kepada kasus kekerasan terhadap anak dan pelacuran anak. Sedangkan di Kabupaten Sukabumi, Kabupaten Tasikmalaya, maupun Kabupaten Garut, karakteristik kasusnya lebih ke arah pencabulan laki-laki dewasa terhadap anak di bawah umur (paedofil) seperti contohnya adalah kasus paedofil Emon di Kabupaten Sukabumi yang korbannya mencapai 114 anak laki-laki.

Faktor utama terjadinya kekerasan dalam rumah tangga lebih karena terjadinya penelantaran orangtua terhadap anak. Mereka tidak mengetahui cara menjalankan peran dan fungsi orangtua sebagaimana mestinya. Pelaku KDRT, termasuk di dalamnya kekerasan terhadap anak hampir 70% keluarga sendiri atau orang terdekat, 20% merupakan tetangga atau lingkungan, dan 10% merupakan orang tak dikenal.

2) Bidang Pendidikan

Salah satu komponen Indeks Pembangunan Gender (IPG) dalam bidang pendidikan yaitu Rata-rata Lama Sekolah (RLS) perempuan di Jawa Barat masih lebih rendah dibanding laki-laki. Menurut data BPS RI pada tahun 2015 RLS perempuan 7.35 tahun sementara laki-laki 8.36 tahun. Lebih lanjut lagi persentase pendidikan tertinggi yang ditamatkan perempuan dalam setiap jenjang pendidikan lebih rendah dibanding laki-laki yaitu (BPS RI, 2015 dalam buku Profil Kesehatan Indonesia 2015)

Jenjang Pendidikan (Tahun 2015)	Perempuan (%)	Laki-laki (%)
Tidak/belum pernah sekolah	5.46	2.36
Tidak tamat SD	12.29	10.11
SD/MI/Paket A	34.17	32.55
SMP/MTs/Paket B	20.67	21.51
SMA/MA/Paket C	20.84	25.90
Perguruan Tinggi	6.57	7.58

Secara umum kondisi pendidikan anak Jawa Barat belum mencapai angka yang diharapkan. Angka partisipasi sekolah terutama di jenjang setingkat SMA masih rendah, malah termasuk 10 provinsi dengan angka partisipasi murni terendah. Menurut data BPS RI Tahun 2015, Angka Partisipasi Sekolah (APS) anak usia 7–12 Tahun, 13–15 Tahun, 16–18 Tahun dan 19-24 tahun masing-masing 99.63 persen, 91.94 persen, dan 63.44 persen dan 17.36 persen.

3) Bidang Kesehatan

Angka Kematian Ibu dan Bayi

Dalam aspek kesehatan, Angka Harapan Hidup perempuan memang lebih tinggi, yaitu 70.54 tahun untuk laki-laki dan 74.36 tahun untuk perempuan (BPS Tahun 2015). Akan tetapi di sisi lain, sampai akhir tahun 2015 Jawa barat ternyata masih menjadi salah satu provinsi teratas sebagai penyumbang angka kematian ibu dan bayi di Indonesia. Menurut laporan Dinas Kesehatan Jawa Barat di tahun 2015

jumlah kasus kematian Ibu melahirkan karena kehamilan, persalinan, dan nifas meningkat cukup tajam dari 748 kasus di tahun 2014 menjadi 823 kasus di tahun 2015. Hal ini terungkap pada Diskusi Gerakan Penyelamatan Ibu dan Bayi Baru Lahir di Jawa Barat, Rabu 30 November 2016. Diskusi digelar oleh United States Aids for International Development (USAID) bersama Kementerian Kesehatan.

Kondisi serupa juga terjadi pada bayi baru lahir, yakni meningkat dari 3,098 kasus di tahun 2014 menjadi 3,369 kasus di tahun 2015. Rata-rata setiap hari di Provinsi Jawa Barat pada tahun 2015 kehilangan 2 Ibu dan 9 bayi akibat kematian tersebut. Ada banyak faktor yang berpengaruh terhadap tingginya kasus kematian ibu. Salah satunya adalah keterlambatan penanganan pasien di pelayanan fasilitas kesehatan (RS dan Puskesmas). Keterlambatan tersebut bisa saja karena terlambat mendapat pertolongan, terlambat rujukan, dan terlambat mendapatkan pelayanan fasilitas.

Penyebaran pengguna narkoba dikalangan remaja dan penyebaran penyakit HIV/AIDS di Jawa Barat juga terus menunjukkan peningkatan, bahkan penularan HIV/AIDS meluas kepada ibu-ibu rumah tangga. Sampai dengan Bulan Juli 2016 tercatat sebanyak 812 orang ibu rumah tangga yang terjangkit AIDS. Angka ini dua kali lebih besar dari kumulatif kasus AIDS pada wanita pekerja seks (PSK) yang berjumlah 336. Menurut Komisi Penanggulangan AIDS Jawa Barat, penemuan kasus HIV/AIDS di Jawa Barat sejak 1989 sampai dengan 2015 telah mencapai 20,296 kasus HIV. Adapun kasus AIDS sebanyak 6,222.

Penemuan ini menempatkan Jawa Barat sebagai peringkat ke-4 terbesar kasus HIV positif di Indonesia, setelah DKI Jakarta, Jawa Timur, dan Papua. Sementara untuk kasus AIDS di Jawa Barat menempati peringkat ke-6 setelah Jawa Timur, Papua, DKI Jakarta, Bali dan Jawa Tengah.

Sementara itu ada ratusan anak di Jawa Barat terinfeksi HIV. Data Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Barat sejak 1989 hingga Desember 2015 mencatat, terdapat 214 kasus AIDS pada anak-anak yang tergolong balita. Sedangkan pada anak-anak usia 5 – 14 tahun tercatat 77 kasus AIDS. Infeksi HIV pada anak terutama disebabkan penularan dari ibunya. Dengan kata lain infeksi HIV pada anak terjadi akibat penularan selama masa perinatal, yaitu periode kehamilan, selama dan setelah persalinan. Penularan terhadap bayi juga bisa terjadi setelah kelahiran melalui Air Susu Ibu (ASI).

Mencegah bayi agar tidak terinfeksi HIV tidak cukup hanya memfokuskan perhatian kepada perempuan hamil yang telah terinfeksi HIV. Bagaimanapun penularan HIV dari ibu ke bayi kemungkinan berawal dari seorang laki-laki HIV positif yang menularkan HIV kepada pasangannya.

Ancaman bahaya narkoba semakin memprihatinkan dengan terus dicekukinya anak-anak bahkan usia SD dengan berbagai makanan yang disisipi narkoba, seperti misalnya permen jari, permen warna warni (mengincar anak usia PAUD), tembakau Gorila, kopi Bunga Kecubung.

- 4) Di bidang politik dan partisipasi di sektor publik, meskipun Undang-undang Nomor 12 Tahun 2003 tentang Pemilu mengamankan keterwakilan 30 persen perempuan dalam pencalonan anggota legislatif. Namun hasil Pemilu 2014 justru menampakkan adanya penurunan keterwakilan perempuan di lembaga legislatif, yaitu keterwakilan perempuan di DPR hanya 22 persen (22 orang) sedangkan pada Pemilu lalu (2009) justru sudah mencapai 24 persen (24 orang). Demikian pula jumlah anggota DPRD

kabupaten dan kota secara kumulatif pada tahun 2015 hanya 24.62 persen (perempuan 242 orang, laki-laki 983 orang).

- 6) Persoalan lain adalah banyaknya hukum dan peraturan perundang-undangan yang bias gender, diskriminatif terhadap perempuan, dan belum peduli anak. Perangkat hukum pidana yang ada belum cukup lengkap dalam melindungi setiap individu, salah satu diantaranya adalah perlindungan terhadap perdagangan orang. Di samping itu, peraturan perundang-undangan yang ada juga belum dilaksanakan secara konsekuen untuk menjamin dan melindungi hak-hak perempuan dan anak, termasuk memberikan perlindungan bagi perempuan dan anak dari tindak kekerasan, diskriminasi, dan eksploitasi. Kebutuhan tumbuh-kembang anak juga belum sepenuhnya menjadi pertimbangan utama dalam perencanaan dan pelaksanaan pembangunan dan partisipasi anak dalam proses pembangunan masih rendah.
- 8) Pemahaman akan konsep kesetaraan dan keadilan gender masih sangat terbatas di semua kalangan. Demikian pula pemahaman akan pentingnya anak sebagai generasi penerus bangsa masih harus ditingkatkan. Keterbatasan pemahaman itu juga terjadi di antara para perencana dan pelaksana pembangunan yang memperlambat upaya-upaya mengintegrasikan konsep tersebut ke dalam berbagai kebijakan dan program pembangunan.

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

2.1. Rencana Strategis 2013-2018

Rencana Strategis BP3AKB Provinsi Jawa Barat sebagaimana halnya SKPD lain di Jawa Barat, disusun dengan mengacu pada visi RPJMD Provinsi Jawa Barat Tahun 2013-2018.

Visi Provinsi Jawa Barat yaitu :

“Jawa Barat Maju dan Sejahtera Untuk Semua”.

Misi Provinsi Jawa Barat Tahun 2013-2018 ditetapkan sebagai berikut :

1. *Membangun Masyarakat yang Berkualitas dan Berdaya saing*
2. *Membangun Perekonomian yang Kokoh dan Berkeadilan*
3. *Meningkatkan Kinerja Pemerintahan, Profesionalisme Aparatur, dan Perluasan Partisipasi*
4. *Mewujudkan Jawa Barat yang Nyaman dan Pembangunan Infrastruktur Strategis yang Berkelanjutan*
5. *Meningkatkan Kehidupan Sosial, Seni dan Budaya, Peran Pemuda dan Olah Raga serta Pengembangan Pariwisata dalam Bingkai Kearifan Lokal.*

Penyusunan Rencana Strategis BP3AKB Provinsi Jawa Barat Tahun 2013-2018 merupakan penjabaran Misi Provinsi Jawa Barat sebagaimana tercantum dalam RPJMD 2013-2018, dengan fokus kepada capaian kebijakan dan program, yaitu:

- 1) Penguatan capaian Misi I Gubernur Jawa Barat dengan tujuan :
Membangun sumber daya manusia Jawa Barat yang menguasai IPTEK, senantiasa berkarya, kompetitif, dengan tetap mempertahankan identitas dan ciri khas masyarakat yang santun dan berbudaya.

Sasaran sesuai RPJMD Jawa Barat Tahun 2013-2018 (halaman V-3):

Meningkatnya kualitas ketahanan keluarga

Indikator Makro kinerja Misi 1 sesuai RPJMD Bab V (halaman V-5) adalah Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) target tiap tahun sebagai berikut :

Kondisi awal 2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
68,08	69,70	70,00	72,02	73,00	73,5	75,00

Strategi dan Arah Kebijakan Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (RPJMD halaman VI-2):

Strategi pertama, meningkatkan keterampilan dalam berwirausaha bagi perempuan dengan arah kebijakan peningkatan upaya pemberdayaan, pengetahuan, keterampilan dan kemandirian perempuan.

Strategi kedua, mewujudkan Pengarusutamaan Gender (PUG) dan meningkatkan pemberdayaan perempuan dalam pembangunan dengan arah kebijakan terwujudnya pemberdayaan gender/pemberdayaan perempuan.

Strategi ketiga, mencegah dan menangani perdagangan perempuan dan anak (*trafficking*) dengan arah kebijakan perlindungan terhadap perempuan dan anak dari kekerasan dalam rumah tangga serta perdagangan perempuan dan anak (*trafficking*).

Strategi keempat, Mewujudkan Pengarusutamaan Hak-hak Anak (PUHA) arah kebijakan perwujudan kota dan kabupaten di Jawa Barat sebagai Kota Layak Anak.

Strategi dan Arah Kebijakan Bidang Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera (RPJMD halaman VI-2):

Strategi pertama, meningkatkan kualitas dan kuantitas peserta KB dengan arah kebijakan Revitalisasi Program Keluarga Berencana dan Kesejahteraan Keluarga.

Strategi kedua, mewujudkan keluarga berkualitas (sehat, sejahtera dan mandiri) dengan arah kebijakan pengokohan ketahanan keluarga baik ketahanan fisik, ekonomi dan sosial psikologi.

2.1.1. Visi dan Misi BP3AKB

BP3AKB menetapkan visi sejalan dengan Visi Pemerintah Daerah, yaitu

"Terwujudnya Keluarga Jawa Barat yang Mandiri, Sehat, Sejahtera".

Sebagai penjabaran visi tersebut, ditetapkan Misi BP3AKB Tahun 2013-2018, yaitu:

1. *Meningkatkan Pelaksanaan dan Memperkuat Kelembagaan Pengarusutamaan Gender (PUG)*
2. *Meningkatkan Kualitas Hidup Perempuan dan Meningkatkan Produktifitas Ekonomi Perempuan, serta Fasilitasi Perlindungan Terhadap Perempuan dan Anak*
3. *Fasilitasi Pelayanan Program KB, Ketahanan Keluarga dan Pengendalian Kependudukan*
4. *Meningkatkan Kapabilitas Manajemen Kelembagaan.*

2.1.2. Tujuan, Sasaran dan Indikator Sasaran

Tujuan

Tujuan merupakan penjabaran yang harus dicapai dari Misi, sedangkan sasaran merupakan operasionalisasi tujuan yang akan dicapai dan ditetapkan secara terukur. Tujuan kinerja BP3AKB Provinsi Jawa Barat adalah :

- 1) Meningkatkan implementasi dan kerjasama pengarusutamaan gender (PUG) dalam pembangunan daerah Jawa Barat.
- 2) Meningkatkan kualitas hidup perempuan serta fasilitasi perlindungan dan pemenuhan hak perempuan dan anak.
- 3) Pengendalian kependudukan dan meningkatkan ketahanan keluarga

- 4) Meningkatkan kualitas manajemen pengelolaan program sumber daya, sarana, dan keuangan Badan Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana.

Sasaran Strategis

Sasaran strategis BP3AKB Provinsi Jawa Barat dalam menyelenggarakan kinerjanya:

1) Meningkatnya Peran Serta dan Kesetaraan Gender dalam Pembangunan

Sasaran antara untuk mencapai sasaran strategis :

- Meningkatkan upaya membangun kesetaraan dan keadilan gender
- Meningkatkan upaya memperkuat kelembagaan pengarusutamaan gender
- Meningkatkan kerjasama PUG antara pemerintah, masyarakat dan dunia usaha
- Meningkatkan sistem informasi dan kerjasama melalui Web SIGA (Sistem Informasi Gender dan Anak)
- Meningkatkan percepatan pelaksanaan pengarusutamaan gender (PUG) melalui Perencanaan dan Penganggaran yang Responsif Gender (PPRG) pada OPD di Provinsi Jawa Barat serta memperkuat Gender Focal Point / POKJA PUG yang sudah terbentuk di OPD OPD Provinsi Jawa Barat.

2) Meningkatnya kualitas hidup dan perlindungan perempuan dan anak

Terdiri dari lima sasaran antara :

- Meningkatnya upaya membangun kualitas hidup perempuan khususnya dalam aspek pendidikan, kesehatan, politik dan meningkatnya produktifitas ekonomi perempuan
- Perlindungan, pencegahan dan penanganan terhadap korban kekerasan dalam rumah tangga dan perdagangan / eksploitasi perempuan dan anak
- Penguatan, penjaminan dan pemenuhan hak-hak anak serta pencegahan timbulnya permasalahan tumbuh kembang dan perlindungan anak terhadap berbagai tindakan atau kejadian penelantaran dan perlakuan salah serta dari dampak negatif arus Globalisasi
- Fasilitasi pengembangan bakat, minat, potensi dan kemandirian anak termasuk mendengar suara anak, serta revitalisasi penanaman nilai-nilai luhur yang mendukung kesejahteraan dan perlindungan anak
- Optimalisasi kerja sama kelembagaan dan pengembangan jaringan lokal nasional, regional dan internasional.

3) Menurunnya Angka Kelahiran dan Meningkatnya Ketahanan Keluarga

Terdiri dari tiga sasaran antara :

- Meningkatnya peserta KB Aktif dan Peserta KB Baru, termasuk didalamnya penurunan tingkat drop out peserta KB, meningkatnya peserta KB Mandiri, serta meningkatnya partisipasi pria dalam ber-KB
- Meningkatnya pemahaman remaja dalam kesehatan reproduksi dan pendewasaan usia perkawinan
- Penurunan jumlah keluarga Pra Sejahtera.

Selain tiga sasaran strategis di atas, terdapat kinerja pelayanan pemerintahan dengan sasaran berikut :

Meningkatnya kualitas manajemen pengelolaan program dan sumber daya terdiri dari:

- a. Sinkronisasi Perencanaan dan perencanaan yang berbasis data
- b. Evaluasi dan Pelaporan tepat waktu
- c. Penilaian Kinerja.

Indikator dan Target Kinerja berdasarkan RENSTRA 2013 - 2018

- 1) *Meningkatnya Peran Serta dan Kesetaraan Gender dalam Pembangunan*
 - a. Indeks Pembangunan Gender (IPG) 90.88 persen
 - b. Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) 75,00 poin
 - c. Prosentase kabupaten/kota yang telah membentuk POKJA PUG 100 persen
 - d. Penghargaan Presiden RI “Anugerah Parahita Ekapraya” (APE) 4 buah, atau total 6 buah.
- 2) *Meningkatnya kualitas hidup dan perlindungan perempuan dan anak*
 - a. Meningkatnya penanganan kekerasan terhadap perempuan dan anak setiap tahun sebesar 10%
 - b. Meningkatnya jumlah perempuan birokrat dalam manajemen 30 persen
 - c. Jumlah kabupaten/kota yang mendapat Penghargaan Kota Layak Anak 20 kabupaten kota

Indikator pendukung :

- Cakupan penanganan korban kekerasan perempuan dan anak 100 persen
- Jumlah Kota Layak Anak (KLA) 64 desa/kelurahan
- Pemberdayaan perempuan melalui Program PEKKA (Jumlah Desa/Kelurahan yang memiliki Kelompok PEKKA) 599 Kelompok
- Jumlah Desa/Kelurahan P2WKSS Aktif 265 Desa/Kelurahan

- 3) *Menurunnya Angka Kelahiran dan Meningkatnya Ketahanan Keluarga*
 - a. Prosentase Peserta KB Aktif terhadap Pasangan Usia Subur 76,50%
 - b. Prosentase Peserta KB Pria 3%
 - c. Rata-Rata Usia Kawin Pertama Wanita (UKPW) 20,32 Tahun
 - d. Menurunnya Jumlah Keluarga Pra Sejahtera 3.6% setiap Tahun (menjadi 1.263.116 KK).

Indikator sasaran dan Target untuk pelayanan pemerintahan

- a. Dokumen Perencanaan yaitu RENJA, RKT, RKA dan DPA tahun 2014 – 2018 sebanyak 20 dokumen
- b. Dokumen Laporan Tahunan : LAKIP, LKPJ, LPPD IKK tahun 2014-2018 sebanyak 15 dokumen
- c. Laporan Realisasi Anggaran dan Laporan Asset tahun 2014-2018 sebanyak 10 dokumen
- d. Laporan Evaluasi Triwulanan tahun 2014-2018 sebanyak 20 dokumen
- e. Laporan Pengembangan aparatur tahun 2014-2018 sebanyak 5 dokumen
- f. Laporan sarana prasarana sebanyak 5 dokumen.

2.1.3. Kebijakan, Strategi dan Program BP3AKB

Misi 1

Strategi :

- 1) Memantapkan Kinerja Pokja PUG /Focal Point di OPD-OPD
- 2) Memantapkan Penerapan perencanaan dan pelaksanaan Anggaran Berbasis Gender (ARG)
- 3) Penerapan sistem informasi/ data terpilah
- 4) Penyebar luasan informasi, pemahaman dan penerapan PUG.

Kebijakan

Terwujudnya pengarusutamaan gender (PUG) dengan melibatkan kerjasama pemerintah, masyarakat dan dunia usaha

Kebijakan Pelaksanaan Misi 1:

- 1) Meningkatkan koordinasi dengan OPD-OPD untuk penguatan kelembagaan PUG
- 2) Meningkatkan koordinasi dengan lembaga koordinator anggaran dalam upaya pemberdayaan perempuan melalui dukungan ARG
- 3) Menyediakan informasi/data gender dan anak
- 4) Menyebarluaskan informasi PUG kepada masyarakat melalui Web SIGA.

Program :

- 1) Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi BP3AKB
- 2) Program Peningkatan peran serta dan kesetaraan gender dalam Pembangunan.

Misi 2

Strategi :

- 1) Fasilitasi Penyediaan akses pelayanan pendidikan dan kesehatan sesuai kebutuhan perempuan
- 2) Fasilitasi Peningkatan pelayanan lembaga ekonomi dan lapang kerja bagi perempuan
- 3) Fasilitasi Peningkatan pendidikan dan wawasan politik bagi perempuan
- 4) Sosialisasi dan implementasi Undang undang perlindungan perempuan dan anak sesuai hak-hak perempuan dan anak
- 5) Sosialisasi prosedur penanganan kasus KDRT dan Peningkatan fasilitasi bagi lembaga-lembaga perlindungan perempuan dan anak terhadap berbagai jenis kekerasan
- 6) Peningkatan sosialisasi hak dan kewajiban pendidik, orangtua dan anak beserta dampak negatif
- 7) Pengembangan kegiatan kreatif bagi anak
- 8) Optimalisasi kerjasama dan pengembangan jejaring kerjasama.

Kebijakan :

Meningkatkan upaya pemberdayaan, pengetahuan, keterampilan dan kemandirian perempuan serta perlindungan dan pemenuhan hak perempuan dan anak.

Kebijakan Pelaksanaan Misi 2 :

- 1) Meningkatkan fasilitasi pelayanan pendidikan dan kesehatan bagi perempuan
- 2) Meningkatkan upaya pemberdayaan perempuan yang berbasis kemandirian berusaha
- 3) Meningkatkan upaya perlindungan terhadap perempuan dan anak melalui pencegahan kekerasan domestik dan kekerasan pada lingkungan komunitas lainnya, serta perdagangan perempuan dan anak
- 4) Meningkatkan keterlibatan perempuan dalam partisipasi politik dan jabatan politik
- 5) Mengembangkan pelayanan lembaga pelayanan pengaduan korban kekerasan
- 6) Meningkatkan sosialisasi dan dukungan dukungan advokasi dan fasilitasi bagi Komisi Perlindungan Anak (KPA) khusus bagi daerah dan LSM pemerhati anak
- 7) Meningkatkan sosialisasi perundang-undangan tentang perlindungan terhadap anak dan sanksi pelanggarnya
- 8) Mendorong penyelenggaraan kegiatan kreatif untuk anak
- 9) Mengembangkan koordinasi dan mendorong tersedianya akses kerjasama dan pengembangan jejaring
- 10) Meningkatkan akses dan informasi bagi anak

Program :

Program Peningkatan kualitas hidup dan perlindungan perempuan dan anak

Misi 3

Strategi :

- 1) Kerjasama penyediaan data base KB dan penyebarluasan informasi KB
- 2) Sosialisasi sistim dan metode KB
- 3) Penataan administrasi kependudukan
- 4) Pembentukan kelompok remaja/masyarakat pendukung KB
- 5) Sosialisasi kesehatan reproduksi remaja dan PUP.

Kebijakan :

Revitalisasi program KB dalam menurunkan angka kelahiran untuk mewujudkan keluarga sejahtera.

Kebijakan Pelaksanaan Misi 3 :

- 1) Revitalisasi program KB dalam menurunkan angka kelahiran untuk mewujudkan keluarga sejahtera
- 2) Meningkatkan pengetahuan reproduksi dan pengendalian penduduk
- 3) Menyebarluaskan informasi KB
- 4) Meningkatkan upaya pembentukan kelompok remaja /masyarakat pendukung program KB

- 5) Mengembangkan informasi kesehatan reproduksi remaja dan PUP
- 6) Mendorong pembentukan dan aktifitas usaha ekonomi perempuan
- 7) Meningkatkan penataan administrasi kependudukan.

Program :

- 1) Program Ketahanan Keluarga dan Kesejahteraan Keluarga
- 2) Program Pelayanan Keluarga Berencana
- 3) Program Pendewasaan Usia Perkawinan
- 4) Program Penataan Administrasi Kependudukan

Misi 4

Kebijakan Pelaksanaan Misi 4 :

Meningkatkan kualitas manajemen pengelolaan program, aparatur, sarana dan prasarana serta keuangan

Program :

- 1) Peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan
- 2) Peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan
- 3) Peningkatan kapasitas sumber daya aparatur
- 4) Meningkatkan pelayanan administrasi perkantoran
- 5) Peningkatan sarana dan prasarana aparatur
- 6) Pemeliharaan sarana dan prasarana aparatur.

2.2. Perjanjian Kinerja Tahun 2016

Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Tahun 2016 terangkum didalam Perjanjian Kinerja Tahun 2016 (Lampiran 2). Perjanjian Kinerja merupakan dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan Program/Kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja, sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, bahwa dalam rangka mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Melalui Perjanjian Kinerja, akan terwujud komitmen penerima amanah dan kesepakatan antara penerima (Kepala Organisasi Perangkat Daerah) dan pemberi amanah (Gubernur Provinsi Jawa Barat) atas kinerja terukur tertentu berdasarkan tugas, fungsi dan wewenang serta sumber daya yang tersedia. Perjanjian Kinerja disusun dengan memperhatikan Dokumen Rencana Strategis Tahun 2013-2018, Dokumen Rencana Kinerja Tahun 2016 dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Tahun 2016.

Sasaran Strategis 1 : *Meningkatnya Peran Serta dan Kesetaraan Gender dalam Pembangunan*

Untuk mencapai sasaran strategis “Meningkatnya peran serta dan kesetaraan gender dalam pembangunan” dilakukan upaya pembangunan yang setara gender di Provinsi Jawa Barat antara lain melalui berbagai pembekalan dan sosialisasi mengenai

pengarusutamaan gender serta perencanaan dan penganggaran responsif gender untuk aparat OPD Provinsi Jawa Barat serta aparat di kabupaten dan kota.

Indikator kinerja untuk sasaran ini terdiri dari 4 (empat) yaitu :

- a. Indeks Pembangunan Gender (IPG)
- b. Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)
- c. Prosentase kabupaten/kota yang telah membentuk POKJA PUG
- d. Jumlah Perolehan “Anugerah Parahita Ekapraya” kabupaten kota

Indeks Pembangunan Gender (IPG) adalah indeks pencapaian kemampuan dasar pembangunan manusia yang sama seperti IPM dengan memperhitungkan ketimpangan gender. IPG dapat digunakan untuk mengetahui kesenjangan pembangunan manusia antara laki-laki dan perempuan. Kesetaraan gender terjadi apabila nilai IPM sama dengan IPG. Komposit IPG terdiri dari Angka Harapan Hidup, Rata-rata Lama Sekolah dan Angka Melek Huruf.

Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) adalah indeks komposit yang mengukur peran aktif perempuan dalam kehidupan ekonomi dan politik. Peran aktif perempuan dalam kehidupan ekonomi dan politik mencakup partisipasi berpolitik, partisipasi ekonomi dan pengambilan keputusan serta penguasaan sumber daya ekonomi. IPG dan IDG dihitung oleh Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KPPPA) bekerja sama dengan BPS RI.

Indikator sasaran dan target kinerja Tahun 2016 :

- a. Indeks Pembangunan Gender (IPG) 89.68 persen
- b. Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) 73 poin
- c. *Prosentase kabupaten/kota yang telah membentuk POKJA PUG 80 persen*
- d. Jumlah Perolehan “Anugerah Parahita Ekapraya” kabupaten kota 9 kabupaten/kota.

Sasaran Strategis 2 : *Meningkatnya kualitas hidup dan perlindungan perempuan dan anak*

Sasaran strategis “Meningkatnya kualitas hidup perempuan dan perlindungan perempuan dan anak” dijabarkan antara lain melalui program-program pemberdayaan ekonomi perempuan seperti pemberdayaan PEKKA (Perempuan Kepala Keluarga) dan P2WKSS (Peningkatan Peranan Wanita menuju Keluarga Sehat Sejahtera). Selanjutnya terkait dengan maraknya kasus-kasus trafficking serta KDRT khususnya di Jawa Barat dijabarkan program-program perlindungan perempuan dan anak serta penanganan korban baik dalam aspek kesehatan, psikologis, rohani dan juga pemberdayaan ekonomi.

Indikator Sasaran dan target kinerja yang ingin dicapai Tahun 2016:

- a. Meningkatkan penanganan kekerasan terhadap perempuan dan anak sebesar 10 persen
- b. *Meningkatnya jumlah perempuan birokrat dalam manajemen 20 persen*

- c. Jumlah kabupaten/kota yang mendapat Penghargaan Kota Layak Anak (KLA) 10 kabupaten/kota

Indikator lainnya (tidak dicantumkan dalam Perjanjian Kinerja 2016):

- d. Cakupan penanganan korban kekerasan (perempuan dan anak) 100%
- e. Jumlah Kelompok PEKKA 545 Desa/ Kelurahan
- f. Jumlah Desa/Kelurahan P2WKSS Aktif sebanyak 211 Desa/Kelurahan

Sasaran Strategis 3 : *Menurunnya Angka Kelahiran dan Meningkatnya ketahanan keluarga*

Untuk mencapai sasaran strategis “Menurunnya angka kelahiran dan meningkatnya ketahanan keluarga” dijabarkan melalui program keluarga berencana dan program ketahanan keluarga. BP3AKB bersama BKKBN melakukan program untuk meningkatkan prosentase peserta KB Aktif, KB Mandiri termasuk KB Pria. Disamping itu dilakukan upaya peningkatan Usia Kawin Pertama Wanita (UKPW) dalam upaya menurunkan angka kelahiran total dari usia 15-19 Tahun .

Upaya yang dilakukan untuk peningkatan ketahanan keluarga pada Tahun 2016 adalah melanjutkan program MOTEKAR di desa dan kelurahan yang merupakan tindak lanjut program Tahun 2014-2015 yaitu Fasilitasi Kader Pemberdayaan Masyarakat Motivator Ketahanan Keluarga (KPM MOTEKAR). Tujuan MOTEKAR adalah menyediakan kader fasilitator ketahanan keluarga dalam upaya menurunkan jumlah Keluarga Pra Sejahtera.

Indikator Sasaran dan target kinerja pada Tahun 2016:

- 1) Prosentase Peserta KB Aktif terhadap Pasangan Usia Subur 75 persen
- 2) Rata-rata Usia Kawin Pertama : 20 Tahun
- 3) Menurunnya Jumlah Keluarga Pra Sejahtera 3.6 persen

Dalam melaksanakan kinerja pencapaian sasaran strategis 3, BP3AKB Provinsi Jawa Barat bekerja sama dan berkoordinasi dengan Perwakilan BKKBN Provinsi Jawa Barat untuk membagi tugas dan saling mengisi sehingga dalam melaksanakan kegiatan tidak terjadi tumpang tindih pekerjaan.

2.3. Rencana Aksi Tahun 2016:

“Program, Kegiatan dan Anggaran Pendukung Perjanjian Kinerja Tahun 2016”

Sesuai dengan ketentuan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 10 Tahun 2015 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun Anggaran 2016 dan Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 115 Tahun 2015 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Jawa Barat Tahun 2016, secara keseluruhan, program utama yang dilaksanakan BP3AKB sebanyak 7 program (dan 7 program pendukung pemerintahan) dengan jumlah anggaran Belanja Langsung sebesar Rp.45,381,466,800.00. Jumlah anggaran Belanja Tidak Langsung (gaji) sebesar

Rp.11.038,000,000.00 sehingga total anggaran yang dikelola BP3AKB Provinsi Jawa Barat pada Tahun 2016 sebesar Rp.56,419,466,800.00. Rincian Rencana Aksi pada Lampiran 4.

Sasaran kinerja yang ingin dicapai Tahun 2016 terdiri dari 3 (tiga) sasaran strategis dan 1 (satu) sasaran non strategis yaitu :

- 1) Meningkatnya peran serta dan kesetaraan gender dalam pembangunan
- 2) Meningkatnya kualitas hidup dan perlindungan perempuan dan anak
- 3) Menurunnya angka kelahiran dan meningkatnya ketahanan keluarga
- 4) Meningkatnya kualitas pengelolaan manajemen program dan sumberdaya.

Program dan Kegiatan serta Anggaran pendukung Sasaran Strategis 1 “*Meningkatnya Peran Serta dan Kesetaraan Gender dalam Pembangunan*”

Sasaran ini didukung oleh 2 (dua) program yaitu Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi BP3AKB dan Program Peningkatan Peran Serta dan Kesetaraan Gender Dalam Pembangunan melalui 5 (lima) kegiatan, seluruhnya mendapat alokasi dana dari sumber APBD Provinsi Jawa Barat sebesar Rp.4,283,750,000.00.

Alokasi dana Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi BP3AKB sebesar Rp.712,500,000.00 (satu kegiatan) dan alokasi Program Peningkatan Peran Serta dan Kesetaraan Gender Dalam Pembangunan sebesar Rp.3,571,250,000.00 (awal alokasi dalam Perjanjian Kinerja Rp.2,995,000,000.00) terdiri dari 4 kegiatan.

Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi BP3AKB sebesar Rp.712,500,000.00 terdiri dari :

- 1) Kegiatan Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi BP3AKB

Program Peningkatan Peran Serta dan Kesetaraan Gender Dalam Pembangunan terdiri dari 4 kegiatan :

- 1) Jejaring Kerjasama Kelembagaan Potensi Jawa Barat dengan alokasi biaya sebesar Rp.810,000,000.00
- 2) Gerakan Pengarusutamaan Gender dengan alokasi biaya sebesar Rp.900,000,000.00
- 3) Pengarusutamaan Gender (PUG)-Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak di Provinsi Jawa Barat dengan alokasi biaya sebesar Rp.1,051,250,000.00
- 4) Sistem Informasi Gender dan Anak (SIGA) dengan alokasi biaya Rp.810,000,000.00

Program dan Kegiatan serta Anggaran pendukung Sasaran Strategis 2 “*Meningkatnya kualitas hidup dan perlindungan perempuan dan anak*”

Sasaran ini dijabarkan dengan 1 (satu) program yaitu Program Peningkatan Kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan dan Anak, terdiri dari 17 kegiatan. Seluruhnya mendapat alokasi dana dari sumber APBD Provinsi Jawa Barat sebesar Rp.15,826,297,300.00 (awal alokasi dalam Perjanjian Kinerja Rp.15,422,500,000.00).

- 1) Peringatan Hari Anak Nasional (HAN) dengan alokasi biaya sebesar Rp.665,000,000.00
- 2) Peningkatan Kreatifitas dan Pemenuhan Hak Partisipasi Anak dengan alokasi biaya sebesar Rp.1,000,000,000.00

- 3) Pengembangan Kota Layak Anak dengan alokasi biaya sebesar Rp.800,000,000.00
- 4) Perlindungan Anak dengan alokasi biaya sebesar Rp.1,688,000.00
- 5) Peringatan Hari Nasional Perempuan dengan alokasi biaya sebesar Rp.855,000,000.00
- 6) Perlindungan Perempuan (Trafiking, KDRT, dan Pornografi) dengan alokasi biaya sebesar Rp.2,020,000,000.00
- 7) Perempuan dan Kemandirian Berusaha dalam Upaya Peningkatan Produktivitas Ekonomi Perempuan /PPEP (PEKKA) dengan alokasi biaya sebesar Rp.712,500,000.00
- 8) Capacity Building bagi Anggota KPPI (Kaukus Politik Perempuan Indonesia) Jawa Barat dengan alokasi biaya Rp.380,000,000.00
- 9) Peningkatan Peranan Wanita menuju Keluarga Sehat dan Sejahtera (P2WKSS) dengan alokasi biaya sebesar Rp.1,009,000,000.00
- 10) Jambore Forum Anak dengan alokasi biaya Rp.1,300,000,000.00
- 11) Women Self Defense/Pertahanan Diri Bagi Perempuan Jawa Barat dengan alokasi biaya Rp.616,797,300.00
- 12) Peningkatan Ketahanan Keluarga bagi Dharma Wanita Provinsi Jawa Barat dengan alokasi biaya Rp.1,000,000,000.00
- 13) Pemberdayaan Ekonomi Perempuan melalui sistem SPP (Simpan Pinjam Perempuan) dengan alokasi biaya Rp.230,000,000.00
- 14) Penguatan Organisasi Perempuan Politik Jawa Barat dengan alokasi biaya Rp.500,000,000.00
- 15) Pembinaan Organisasi Perempuan dengan alokasi biaya Rp.250,000,000.00
- 16) Kesekretariatan P2TP2A Provinsi Jawa Barat dengan alokasi biaya Rp.1,624,902,000.00
- 17) P2TP2A Provinsi Jawa Barat Tahun 2016 dengan alokasi biaya Rp.1,175,098,000.00.

**Program dan Kegiatan serta Anggaran pendukung Sasaran Strategis 3
"Menurunnya Angka Kelahiran dan Meningkatnya Ketahanan Keluarga"**

Sasaran ini pada Tahun 2016 direalisasikan dengan dukungan 4 (empat) program dengan 5 kegiatan yaitu :

- Program Penataan Administrasi Kependudukan dengan alokasi Rp.1,032,525,000.00
- Program Ketahanan Keluarga dan Kesejahteraan Keluarga alokasi Rp.10,252,414,500.00 (alokasi awal Rp.10,254,000,000.00)
- Program Pelayanan Keluarga Berencana alokasi Rp.1,634,000,000.00
- Program Pendewasaan Usia Perkawinan alokasi Rp.900,000,000.00

masing-masing terdiri dari satu kegiatan hanya Program Ketahanan Keluarga dan Kesejahteraan Keluarga terdiri dari dua kegiatan. Total alokasi anggaran untuk keempat program ini sebesar Rp.13,818,939,500.00.

Program Penataan Administrasi Kependudukan terdiri dari satu kegiatan :

- 1) Pengendalian Kependudukan di Jawa Barat dengan alokasi biaya sebesar Rp.1,032,525,000.00

Program Ketahanan Keluarga dan Kesejahteraan Keluarga terdiri dari dua kegiatan:

- 1) Ketahanan Keluarga dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 750,000,000.00
- 2) Motivator Ketahanan Keluarga (MOTEKAR) dengan alokasi anggaran Rp.9,502,414,500.00.

Program Pelayanan Keluarga Berencana terdiri dari satu kegiatan :

- 1) Peningkatan Kesertaan Ber-KB dengan alokasi anggaran sebesar Rp.1,634,000,000.00

Program Pendewasaan Usia Perkawinan terdiri dari satu kegiatan :

- 1) Pendewasaan Usia Perkawinan dengan alokasi anggaran sebesar Rp.900,000,000.00

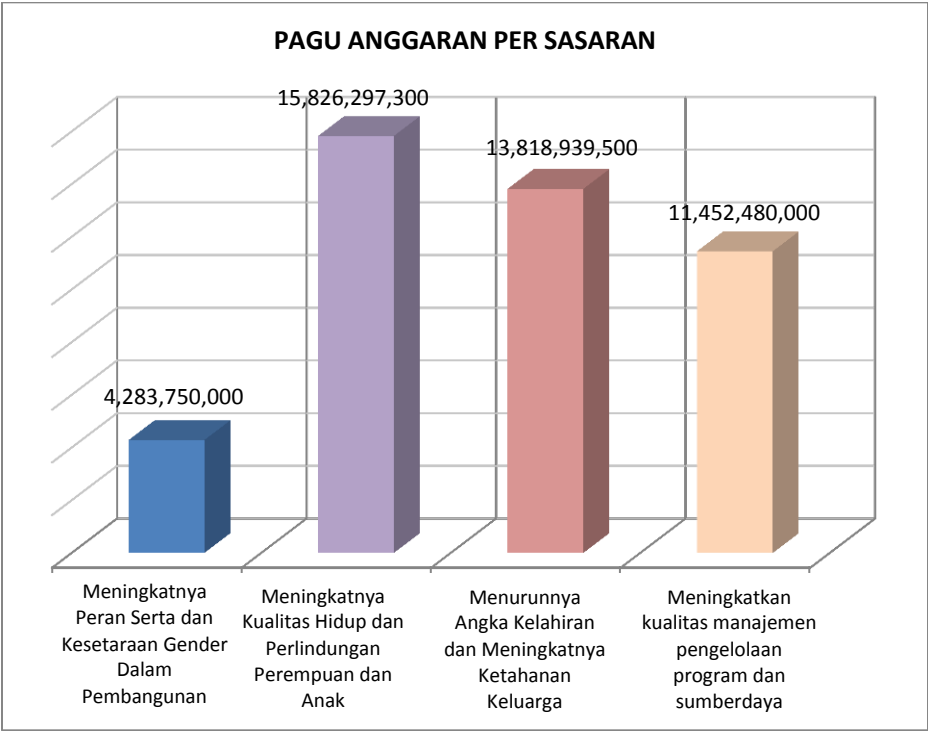
Ketiga sasaran strategis BP3AKB Tahun 2016, dijabarkan melalui 7 (tujuh) Program utama terdiri dari 27 kegiatan melalui Belanja Langsung sebagaimana dalam Tabel 1 dan 2 (setelah perubahan anggaran). Disamping tujuh program utama, terdapat program-program pendukung untuk mendukung sasaran non stratejik yang merupakan pendukung kinerja pemerintahan.

Tabel 2.3a.

Alokasi Anggaran APBD Provinsi Jawa Barat Per Sasaran Strategis Tahun 2016

No	Sasaran Strategis	Anggaran (Rp.)	Ket.
1	Meningkatnya Peran Serta dan Kesenjangan Gender Dalam Pembangunan : - Program Perencanaan Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah - Program Peningkatan Peran Serta dan Kesenjangan Gender dalam Pembangunan	4,283,750,000	
2	Meningkatnya Kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan dan Anak : - Program Peningkatan Kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan dan Anak	15,826,297,300	
3	Menurunnya Angka Kelahiran dan Meningkatnya Ketahanan Keluarga : - Program Penataan Administrasi Kependudukan - Program Ketahanan Keluarga dan Kesejahteraan Keluarga - Program Pelayanan Keluarga Berencana - Program Pendewasaan Usia Perkawinan (PUP)	13,818,939,500	
	TOTAL ALOKASI SASARAN STRATEGIS	33,928,986,800	
	Sasaran Pendukung Pemerintahan		
	Meningkatkan kualitas manajemen pengelolaan program dan sumberdaya (7 program)	11,452,480,000	
	TOTAL ALOKASI ANGGARAN	45,381,466,800	

Sasaran non strategis yaitu “Meningkatkan kualitas manajemen pengelolaan program dan sumberdaya” merupakan sasaran untuk pelaksanaan pelayanan internal BP3AKB yang dilakukan oleh Sekretariat BP3AKB Provinsi Jawa Barat dilaksanakan melalui 7 program dengan total alokasi anggaran sebesar Rp.11,452,480,000.00.



Tabel 2.3b.
Indikator Kinerja Utama (IKU) Tahun 2016

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
1	Meningkatnya peran serta dan kesetaraan gender dalam pembangunan	Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)	73 poin
		Indeks Pembangunan Gender (IPG)	89.68%
		Penghargaan Anugerah Parahita Ekapraya	9 kab/kota
2	Meningkatnya kualitas hidup dan perlindungan perempuan dan anak	Cakupan penanganan kekerasan terhadap perempuan	100%
		Pemberdayaan perempuan melalui Program PEKKA (Jumlah Desa/ Kelurahan yang memiliki Kelompok PEKKA)	545 desa/kel
		Jumlah Kota Layak Anak (KLA)	10 kab/kota
3	Menurunnya angka kelahiran dan meningkatnya ketahanan keluarga	Prosentase Peserta KB Aktif terhadap Pasangan Usia Subur	75%
		Prosentase Peserta KB Pria	3 %
		Keluarga Pra Sejahtera	3.60%

Keterangan : Formulir IKU secara lengkap pada Lampiran 5

IKU : Lampiran Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor 061/Kep.1409-Org/2015.

Rincian alokasi anggaran seluruh program dan kegiatan BP3AKB Provinsi Jawa Barat Tahun 2016 seperti pada Tabel 3 berikut.

Tabel 2.3c.

Alokasi Anggaran dari Sumber Belanja Langsung dan
Belanja Tidak Langsung APBD Provinsi Jawa Barat Tahun 2016

No	Uraian Program dan Kegiatan	Target Anggaran (Rp)
	TOTAL ANGGARAN	
I.	BELANJA TIDAK LANGSUNG	11,038,000,000
1.	Belanja Pegawai	11,038,000,000
II.	BELANJA LANGSUNG	45,381,466,800
	Program Strategis A s/d G	21,013,257,500
A	Program Perencanaan Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah	712,500,000
	Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi BP3AKB	712,500,000
B	Program Penataan Administrasi Kependudukan	1,032,525,000
1.	Pengendalian Kependudukan di Jawa Barat	1,032,525,000
C	Program Peningkatan Peran Serta dan Kesenjangan Gender dalam Pembangunan	3,571,250,000
1.	Jejaring Kelembagaan dan Kerjasama Potensi Jawa Barat	810,000,000
2.	Gerakan Pengarusutamaan Gender	900,000,000
3.	Pengarusutamaan Gender (PUG)-Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak di Provinsi Jawa Barat	1,051,250,000
4.	Sistem Informasi Gender dan Anak (SIGA)	810,000,000
D	Program Peningkatan Kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan dan Anak	15,826,297,300
1.	Peringatan Hari Anak Nasional (HAN)	665,000,000
2.	Peningkatan Kreativitas dan Pemenuhan Hak Partisipasi Anak	1,000,000,000
3.	Pengembangan Kota Layak Anak (KLA)	800,000,000
4.	Perlindungan Anak	1,688,000,000
5.	Peringatan Hari Nasional Perempuan	855,000,000
6.	Perlindungan Perempuan (Trafficking, KDRT, dan Pornografi)	2,020,000,000
7.	Perempuan dan Kemandirian Berusaha Dalam Upaya Peningkatan Produktivitas Ekonomi Perempuan/PPEP (PEKKA)	712,500,000
8.	Capacity Building bagi Anggota KPPI (Kaukus Perempuan Politik Indonesia) Jawa Barat	380,000,000
9.	Peningkatan Peranan Wanita menuju Keluarga Sehat dan Sejahtera (P2WKSS)	1,009,000,000
10.	Jambore Forum Anak	1,300,000,000
11.	Women Self Defense/Pertahanan Diri Bagi Perempuan Jawa Barat	616,797,300
12.	Peningkatan Ketahanan Keluarga bagi Dharma Wanita Provinsi Jawa Barat	1,000,000,000
13.	Pemberdayaan Ekonomi Perempuan melalui sistem SPP (Simpan Pinjam Perempuan)	230,000,000
14.	Penguatan Organisasi Perempuan Politik Jawa Barat	500,000,000
15.	Pembinaan Organisasi Perempuan	250,000,000
16.	Kesekretariatan P2TP2A Provinsi Jawa Barat	1,624,902,000
17.	P2TP2A Provinsi Jawa Barat Tahun 2016	1,175,098,000

E	Program Ketahanan Keluarga dan Kesejahteraan Keluarga	10,252,414,500
1.	Ketahanan Keluarga	750,000,000
2.	Motivator Ketahanan Keluarga (MOTEKAR)	9,502,414,500
F	Program Pelayanan Keluarga Berencana	
1.	Peningkatan Kesertaan Ber-KB	1,634,000,000
G	Program Pendewasaan Usia Perkawinan (PUP)	900,000,000
1.	Pendewasaan Usia Perkawinan (PUP)	900,000,000

No	Uraian Program dan Kegiatan Pendukung (Sekretariat)	Target Anggaran
H	Program Pengembangan Kompetensi Aparatur	232,700,000
1.	Pembinaan dan Pengembangan Aparatur BP3APKKB	232,700,000
I	Program Peningkatan Kesejahteraan Sumber Daya	568,645,000
1.	Peningkatan Kesejahteraan dan Kemampuan Aparatur	568,645,000
J	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	6,986,705,000
1.	Penyelenggaraan Administrasi Perkantoran	5,423,630,000
2.	Iklan Layanan Masyarakat BP3AKB	1,563,075,000
K	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	1,910,700,000
1.	Peningkatan Sarana dan Prasarana Kantor BP3APKKB	1,910,700,000
L	Program Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Aparatur	1,553,730,600
1.	Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kantor BP3AKB	1,553,730,600
M	Program Pengelolaan Keuangan dan Kekayaan Daerah	100,000,000
1.	Pengelolaan Keuangan BP3AKB Provinsi Jawa Barat	100,000,000
N	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	100,000,000
1.	Perencanaan Evaluasi dan Pelaporan Internal BP3APKKB	100,000,000
	JUMLAH ANGGARAN PENDUKUNG (SEKRETARIAT)	11,452,480,000

Disamping tujuh program utama untuk mendukung sasaran strategis dengan alokasi Rp.21.013,257,500.00, terdapat 7 (tujuh) program pendukung pemerintahan terdiri dari 8 (delapan) kegiatan sebagaimana tampak pada tabel di atas dengan alokasi anggaran sebesar Rp.11,452,480,000.00 sehingga total alokasi anggaran Belanja Langsung sebesar Rp.45,381,466,800.00. Belanja Tidak Langsung (BTL) Gaji Pegawai sebesar Rp.11,038,000,000.00, sehingga total alokasi anggaran BP3AKB Tahun 2016 sebesar Rp.56,419,466,800.00.

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

Akuntabilitas kinerja adalah tindakan yang dilakukan sebagai perwujudan kewajiban instansi pemerintah, dalam hal ini BP3AKB Provinsi Jawa Barat untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan/kegagalan pelaksanaan misi BP3AKB Provinsi Jawa Barat melalui pencapaian tujuan-tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan/diamanatkan para pemangku kepentingan melalui alat pertanggungjawaban secara periodik.

Akuntabilitas Kinerja, dimaksudkan memberikan gambaran mengenai akuntabilitas tingkat pencapaian kinerja sasaran, program/kegiatan serta indikator kinerja sesuai dengan Rencana Strategis BP3AKB Provinsi Jawa Barat Tahun 2013-2018.

3.1. Capaian Kinerja Organisasi

3.1.1. Kerangka Pengukuran Kinerja

Pengukuran kinerja digunakan sebagai dasar untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan dalam rangka mewujudkan visi dan misi instansi pemerintah. Pengukuran dimaksud merupakan hasil dari suatu penilaian yang sistematis dan didasarkan pada indikator kinerja sasaran yang berupa indikator keluaran dan hasil, sebagaimana diuraikan pada Bab sebelumnya. Penilaian tersebut tidak terlepas dari proses yang merupakan kegiatan mengolah masukan menjadi keluaran atau penilaian dalam proses penyusunan kebijakan/program/kegiatan yang dianggap penting dan berpengaruh terhadap pencapaian sasaran dan tujuan.

Dalam kerangka pengukuran kinerja terdapat tahapan penetapan pengumpulan data kinerja, dan cara pengukuran kinerja. Penetapan indikator kinerja dikategorikan ke dalam kelompok :

- a. Keluaran (*outputs*) adalah segala sesuatu berupa produk/jasa (fisik dan/atau non fisik) sebagai hasil langsung dari pelaksanaan suatu kegiatan dan program berdasarkan masukan yang digunakan;
- b. Hasil (*outcomes*) adalah segala sesuatu yang mencerminkan berfungsinya keluaran kegiatan pada jangka menengah. *Outcomes* merupakan ukuran seberapa jauh setiap produk/jasa dapat memenuhi kebutuhan dan harapan masyarakat.

Pengukuran kinerja dilakukan dengan menggunakan indikator kinerja sasaran. Pengukuran ini dilakukan dengan memanfaatkan data kinerja. Data kinerja lazimnya dapat diperoleh melalui dua sumber, yaitu : (1) data internal, berasal dari sistem informasi yang diterapkan pada instansi, dan (2) data eksternal, berasal dari luar instansi baik data primer maupun data sekunder.

Pengumpulan data kinerja diarahkan untuk mendapatkan data kinerja yang akurat, lengkap, tepat waktu, dan konsisten, yang berguna bagi pengambilan keputusan dalam rangka perbaikan kinerja instansi pemerintah tanpa meninggalkan prinsip-prinsip keseimbangan biaya dan manfaat, efisiensi dan efektivitas. Untuk itu perlu dibangun sistem informasi kinerja yang mengintegrasikan data yang dibutuhkan dari unit-unit yang bertanggung jawab dalam pencatatan, secara terpadu dengan sistem informasi yang ada.

Hal tersebut dapat dilakukan dengan mewajibkan menyampaikan laporan data kinerja secara reguler, mingguan, bulanan, triwulanan, dan seterusnya.

Pengumpulan data kinerja untuk indikator kinerja sasaran yang terdiri dari indikator-indikator masukan, keluaran, dan hasil dilakukan secara terencana dan sistematis setiap Tahun untuk mengukur kehematan, efektivitas, efisiensi dan kualitas pencapaian sasaran.

Pengukuran kinerja mencakup: tingkat pencapaian sasaran instansi pemerintah yang merupakan tingkat pencapaian target (rencana tingkat capaian) dari masing-masing indikator sasaran yang telah ditetapkan sebagaimana dituangkan dalam dokumen Rencana Kinerja. Pengukuran tingkat pencapaian sasaran didasarkan pada data hasil pengukuran kinerja kegiatan.

Pengukuran kinerja dimaksud dapat dilakukan dengan menggunakan formulir Pengukuran Kinerja sebagaimana tercantum pada Lampiran 4 dan rumus-rumus sebagaimana yang diuraikan di bawah ini.

Semakin tinggi realisasi menunjukkan pencapaian kinerja yang semakin baik, untuk pengukuran tersebut digunakan rumus (2):

1) Rencana tingkat capaian =
$$\frac{\% \text{ Pencapaian}}{\text{Rencana}} \times 100\%$$

Semakin tinggi realisasi menunjukkan semakin rendah pencapaian kinerja, maka digunakan rumus (2):

2) Rencana tingkat capaian =
$$\frac{\text{Rencana} - (\text{Realisasi} - \text{Rencana})}{\text{Rencana}} \times 100\%$$

Selanjutnya pemaknaan dari capaian nilai kinerja dibagi berdasarkan klasifikasi berikut ini:

Tabel 3.1.1a.
Skala dan Kategori Penilaian

Skala Nilai	Katagori Penilaian
> 100%	Sangat baik
80 – 100%	Baik
50 - < 80%	Sedang
< 50%	Kurang

3.1.2. Evaluasi Program dan Kegiatan yang Menunjang Capaian Kinerja

Hasil Pengukuran Kinerja Kegiatan

Berdasar hasil Pengukuran Kinerja Kegiatan (PKK) dengan rincian pada Lampiran 6, program dan kegiatan BP3AKB Provinsi Jawa Barat Tahun 2016 adalah sebagai berikut.

Sasaran Strategis 1 : *Meningkatnya Peran Serta dan Kesetaraan Gender dalam Pembangunan*

Dua program penopang sasaran ini yaitu Program Perencanaan Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah serta Program Peningkatan Peran Serta dan Kesetaraan Gender Dalam Pembangunan. Anggaran APBD Provinsi Jawa Barat yang

dialokasikan untuk mencapai sasaran ini sebesar Rp.4,043,279,900.00 (Tabel 2.3.), terealisasi sebesar Rp.4,030,287,400.00 atau 99.68 (PKK Lampiran 6).

Melalui kegiatan dalam program ini, dilakukan upaya memperkuat kelembagaan dan penganggaran pengarusutamaan gender mulai tahap perencanaan berbasis gender pada OPD di Provinsi Jawa Barat dan kabupaten/kota sekaligus memberikan pendampingan dan pelatihan pada para pengelola perencanaan dan anggaran.

Program Perencanaan Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah dijabarkan dengan satu kegiatan yaitu Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi BP3AKB dengan output rencana kegiatan terpadu provinsi dengan 27 kabupaten/kota tahun 2017, capacity building dengan OPD kabupaten/kota diikuti 100 orang untuk menjalin jiwa korsa dan kerja sama yang sinergis.

Program Peningkatan Peran Serta dan Kesetaraan Gender dalam Pembangunan tahun 2016 dijabarkan dengan 4 (empat) kegiatan yaitu :

- 1) Jejaring Kerjasama Kelembagaan Potensi Jawa Barat
- 2) Gerakan Pengarusutamaan Gender (PUG)
- 3) Pengarusutamaan Gender (PUG)-Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak di Provinsi Jawa Barat
- 4) Sistem Informasi Gender dan Anak (SIGA)

Keempat kegiatan tersebut di atas dapat dilaksanakan dengan output 100%.

Kegiatan Jejaring Kerjasama Kelembagaan Potensi Jawa Barat

Kerjasama antar organisasi yang terlibat dalam pemberdayaan dan perlindungan perempuan dan anak sangat diperlukan. BP3AKB Provinsi Jawa Barat melakukan koordinasi, sosialisasi dan rapat teknis dengan melibatkan organisasi-organisasi perempuan termasuk Perguruan Tinggi untuk melakukan evaluasi kondisi dan hasil kerja yang lalu serta melakukan pembagian tugas kembali.

Kegiatan Gerakan Pengarusutamaan Gender (PUG)

Pelatihan Fasilitator Perencanaan dan Penganggaran yang Responsif Gender Tingkat kabupaten/ kota tahun 2016, dilaksanakan di Aula BP3AKB Provinsi Jawa Barat. Peserta berjumlah 50 orang, terdiri dari OPD pengelola Pemberdayaan Perempuan (PP) dan Perlindungan Anak (PA) dari 27 kabupaten/kota.

Tujuan kegiatan ini adalah penguasaan metode dan pengintegrasian anggaran yang mendukung Pengarusutamaan Gender (PUG) dalam program /kegiatan pembangunan melalui Perencanaan dan Penganggaran yang Responsif Gender (PPRG) sehingga terjamin alokasi dana pembangunan untuk perempuan dan anak. Juga diberikan praktek menganalisa RKA dan membuat GBS (Gender Budget



Pelatihan Fasilitator Perencanaan dan Penganggaran yang Responsif Gender

Statement) serta pengisian aplikasi APE (Anugerah Parahita Ekapraya) tahun 2016.

Pelatihan Fasilitator Perencanaan dan Penganggaran yang Responsif Gender

Pelatihan Pendampingan Perencanaan Penganggaran yang Responsif Gender Tingkat OPD Kabupaten/Kota, dilaksanakan di 5 (lima) BKPP Provinsi Jawa Barat pada Bulan April 2016. Peserta pelatihan terdiri dari 6 OPD mitra terkait PP PA di kabupaten/kota

yaitu BAPPEDA, Badan PPPA, Dinas Pendidikan, Dinas Perhubungan, Dinas Kesehatan serta Dinas Tenaga Kerja

Tujuan dari kegiatan ini adalah

- 1) Mendorong mitra OPD untuk berpartisipasi aktif dalam penganggaran yang responsif gender (PPRG) yang dilaksanakan melalui analisis gender terhadap semua kegiatan yang dituangkan dalam bentuk Gender Budget Statement
- 2) Optimalisasi monev PP PA tahun 2016
- 3) Menunjang pencapaian pemerintahan yang baik (good governance), pembangunan yang berkelanjutan serta pencapaian target-target SDGs.

Kegiatan Pengarusutamaan Gender (PUG) - Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak di Provinsi Jawa Barat

Melalui kegiatan ini dilaksanakan koordinasi dengan OPD mitra dalam bentuk pertemuan, diskusi, penyusunan dokumen pendukung untuk melaksanakan dukungan bagi pembangunan PUG, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak. Keberhasilan pembangunan terpadu dengan OPD mitra ini selanjutnya dievaluasi dan dinilai oleh Tim Penilai Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dan berhasil memperoleh Penghargaan Presiden RI Anugerah Parahita Ekapraya Kategori Mentor.

Kegiatan Sistem Informasi Gender dan Anak (SIGA)

Ketersediaan Data Gender dan Anak secara terpilah yang dirinci menurut jenis kelamin dan kelompok umur, sangat penting dalam perencanaan, penganggaran, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan program dan kegiatan yang responsif gender. Sehingga target sasaran dapat diketahui dengan pasti untuk menetapkan program/kegiatan yang diperlukan.

Data yang ditayangkan meliputi Bidang : kesehatan, pendidikan, ketenagakerjaan dan ekonomi, hukum dan Sosial Budaya, Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak (KtP/KtA).

Dalam rangka mencapai target sasaran Program Peningkatan Peran Serta dan Kesetaraan Gender Dalam Pembangunan, dilakukan upaya koordinasi dan sosialisasi yang diselenggarakan bertujuan untuk melakukan sinkronisasi, pertukaran informasi dan membangun jaringan kerjasama aspek PUG. Melalui kegiatan koordinasi berupa rapat atau pertemuan ini, berbagai organisasi yang berada di masyarakat sejak lama dapat saling bertukar informasi satu sama lain, demikian juga dengan instansi yang ada di pemerintahan. Diharapkan melalui kegiatan rakor akan dapat membuka peluang sebesar-besarnya untuk saling berbagi peran, bekerja sama, saling mendukung, demi mencapai keadilan gender laki-laki dan perempuan serta memberikan perlindungan bagi hak anak-anak.

Program Peningkatan Peran Serta dan Kesetaraan Gender dalam Pembangunan memperoleh anggaran dari sumber Belanja Langsung APBD Provinsi Jawa Barat dengan alokasi sebesar Rp.3,571,250,000.00 terealisasi sebesar Rp.3,330,779,900.00 (93.27%).

Permasalahan dan Solusi

Belum lengkapnya koordinasi diantara OPD di lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Barat dan kabupaten/kota dalam menerapkan Pembangunan Responsif Gender sehingga masih belum tersedia data terpilah hasil-hasil pembangunan. Hal ini menyulitkan evaluasi capaian pembangunan antara laki-laki dan perempuan.

Demikian pula di kabupaten/kota, walaupun sudah mencapai 20 kabupaten/kota, belum seluruhnya memiliki POKJA PUG yang berperan sebagai wadah konsultasi bagi pelaksana dan penggerak pengarusutamaan gender dari berbagai instansi/ lembaga di daerah.

Solusi yang dilakukan adalah melanjutkan upaya penguatan komitmen dan kebijakan; penguatan kelembagaan dan sumber daya manusia; peningkatan Anggaran Responsif Gender; pemutakhiran data terpilah Gender dan Anak serta penguatan partisipasi masyarakat. Salah satu upaya yang sudah dilakukan untuk percepatan Pegarusutamaan Gender (PUG) melalui Perencanaan Penganggaran Responsif Gender (PPRG) antara lain dengan membuat Surat Edaran tentang Penyusunan Anggaran Responsif Gender (ARG) di Provinsi Jawa Barat serta dibentuknya Sekretariat Bersama Perencanaan Penganggaran Responsif Gender (Sekber PPRG) Provinsi Jawa Barat.

Sasaran Strategis 2 : *Meningkatnya kualitas hidup dan perlindungan perempuan dan anak*

Sasaran strategis “Meningkatnya Kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan dan Anak” dijabarkan melalui satu program yaitu Program Peningkatan Kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan dan Anak. Total anggaran yang dialokasikan dari APBD Provinsi Jawa Barat untuk program ini sebesar Rp.15,826,297,300.00 dan terealisasi sebesar Rp.15,615,158,380 atau 98.34%.

Melalui kegiatan dalam program ini dilakukan upaya-upaya pemberdayaan dan perlindungan bagi perempuan dan anak. Pemberdayaan perempuan khususnya dalam aspek ekonomi/pendapatan, kesehatan serta partisipasi di sektor publik.

Perlindungan perempuan dan anak melalui peningkatan pelayanan dan pencegahan kekerasan dan trafficking, penyebarluasan informasi pencegahan kekerasan dan trafficking, pelatihan bagi para pengelola pelayanan maupun kader pendamping di lapangan, integrasi perlindungan perempuan dan anak bagi lembaga-lembaga yang ada baik pemerintah, LSM, pendidikan dan lembaga masyarakat lainnya.

Program Peningkatan Kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan dan Anak dijabarkan dalam 17 kegiatan yaitu :

- 1) Peringatan Hari Anak Nasional (HAN)
- 2) Peningkatan Kreativitas dan Pemenuhan Hak Partisipasi Anak
- 3) Pengembangan Kota Layak Anak
- 4) Perlindungan Anak
- 5) Peringatan Hari Nasional Perempuan
- 6) Perlindungan Perempuan (Trafficking, KDRT, dan Pornografi)
- 7) Perempuan dan Kemandirian Berusaha dalam Upaya Peningkatan Produktivitas Ekonomi Perempuan /PPEP (PEKKA)

- 8) Capacity Building bagi anggota KPPI Jawa Barat (Kaukus Perempuan Politik Indonesia)
- 9) Peningkatan Peranan Wanita menuju Keluarga Sehat dan Sejahtera (P2WKSS)
- 10) Jambore Forum Anak
- 11) Women Self Defense/Pertahanan Diri Bagi Perempuan Jawa Barat
- 12) Peningkatan Ketahanan Keluarga bagi Dharma Wanita Provinsi Jawa Barat
- 13) Pemberdayaan Ekonomi Perempuan melalui sistem SPP (Simpan Pinjam Perempuan)
- 14) Penguatan Organisasi Perempuan Politik Jawa Barat
- 15) Pembinaan Organisasi Perempuan
- 16) Kesekretariatan P2TP2A Provinsi Jawa Barat
- 17) P2TP2A Provinsi Jawa Barat Tahun 2016.

Kegiatan dalam upaya pemberdayaan perempuan terangkum secara ringkas sebagai berikut (rincian dalam PKK Lampiran 6).

Upaya pemberdayaan perempuan dalam bidang ekonomi antara lain dilakukan melalui pemberdayaan kelompok Perempuan Kepala Keluarga (PEKKA) dan melalui program P2WKSS. Kegiatan terkait hal ini adalah Kegiatan Perempuan dan Kemandirian Berusaha dalam Upaya Peningkatan Produktivitas Ekonomi Perempuan /PPEP (PEKKA) dan Kegiatan Peningkatan Peranan Wanita menuju Keluarga Sehat dan Sejahtera (P2WKSS)

Pada bulan September dan Oktober 2016 dilaksanakan pelatihan keterampilan anggota PEKKA di beberapa kabupaten/kota yaitu :

- Pelatihan PEKKA Kota Depok diikuti 30 peserta terdiri dari BPMK Kota Depok 3 orang, 1 orang PL PEKKA Kota Depok dan 26 orang anggota Kelompok PEKKA Dahlia yang berada di lokasi P2WKSS. Jenis pelatihan yang disampaikan adalah pembuatan dodol susu, yoghurt dan permen susu.
- Pelatihan PEKKA pembuatan Sabun di Gunung Sindur, Kabupaten Bogor diikuti 30 anggota PEKKA.
- Pelatihan PEKKA di Kota Sukabumi. Pabrik keju Baros yang dikelola oleh PT Bukit Baros



Cempaka (BBC) adalah produsen keju Gouda lokal yang terletak di desa Sasagaran, Kebon Pedes, Kota Sukabumi. Di pabrik ini, kita dapat melihat secara langsung bagaimana keju diproses dan diolah. Kelompok PEKKA (Perempuan Kepala Keluarga) mendapat kesempatan untuk memperoleh wawasan dengan berkunjung dan

menyaksikan langsung proses pembuatan keju Gouda di Pabrik Keju Baros. Dimulai dari presentasi seputar keju, kunjungan ini tidak hanya menawarkan wawasan edukatif namun juga nuansa unik berkeliling pabrik keju. Pelatihan yang didapatkan kelompok PEKKA kali ini adalah pelatihan membuat singkong keju, tahu keju, serta pembuatan papeda.

Pameran Produk PEKKA di Provinsi NTB

Untuk meningkatkan promosi dan motivasi PEKKA, anggota PEKKA yang berprestasi mengikuti Pameran The 14th NTB Expo 2016 atas undangan Pemerintah Provinsi NTB dalam rangkaian acara Musabaqah Tilawatil Qur'an (MTQ) Tingkat Nasional ke-26 yang berlangsung pada 27 Juli – 7 Agustus 2016 di Mataram. Acara MTQ Nasional ini antara lain diisi Pameran Peradaban Islam (PPI) dan Nusa Tenggara Barat (NTB) Expo. Expo berlangsung pada 30 Juli s.d 5 Agustus 2016 dengan materi pameran promosi produk unggulan daerah se-indonesia, bazar kuliner halal food, dan Festival Hortikultura. PEKKA Provinsi Jawa Barat pada kesempatan ini memamerkan produk mukena, makanan ringan dan baju wanita.

Pameran 14th NTB Expo melibatkan para pelaku usaha (buyer) dan investor baik dari dalam maupun luar negeri dengan potensi pengunjung lebih dari 5.000 orang unsur peserta/kafilah MTQ dari seluruh Provinsi di Indonesia dan 10.000 orang masyarakat umum.



Pelatihan Ketrampilan Bagi Perempuan Mantan Anggota Gafatar

Mantan anggota Gafatar yang dijemput dan dipulangkan sementara ditampung di Balai Pemberdayaan Sosial Bina Remaja (BPSBR) Cimahi pada Bulan Januari 2016. Untuk kembali berbaur dengan masyarakat, Gubernur Jawa Barat dalam kunjungannya berpesan harus dikembalikan kepercayaan dirinya, dimanusiakan dan diterima secara baik serta dibina dengan berbagai ketrampilan yang bermanfaat.

Merespon pernyataan Gubernur, Kepala BP3AKB Provinsi Jawa Barat, menginstruksikan segenap jajaran di BP3AKB Provinsi Jawa Barat untuk menurunkan tenaga-tenaga ahlinya untuk memberikan pembinaan. Salah satunya adalah kiprah para Pendamping Lapangan (PL) Kelompok PEKKA yang memberikan



pelatihan ketrampilan kepada para perempuan mantan anggota Gafatar yang jumlahnya mencapai lebih dari 40 orang. Selama 2 hari para perempuan ini diberikan pelatihan sulam pita yang dipandu oleh PL PEKKA Kota Cimahi, beserta para anggota kelompok PEKKA Manata Cimahi. Meski hanya 2 hari, ekspresi bersemangat tampak ditunjukkan oleh peserta. Beberapa bahkan menyatakan keinginannya untuk mempelajari keterampilan sulam pita lebih lanjut.

Kegiatan Pemberdayaan Ekonomi Perempuan melalui sistem SPP (Simpan Pinjam Perempuan)

Tujuan kegiatan ini adalah untuk memberi bekal bagi perempuan khususnya anggota PEKKA dalam menjalankan usahanya. Disamping diberikan pembekalan bagi 250 orang anggota PEKKA, sebanyak 12 PL PEKKA dan 8 orang PL SPP mengikuti Workshop Simpan Pinjam Perempuan (SPP) di Koperasi Wanita “Karya Bhakti”

bertempat di Jl. Jemur Surabaya selama 3 hari, dimulai tanggal 10 – 12 November 2016. Materi yang diikuti yaitu pengelolaan simpan pinjam dengan sistem tanggung jawab renteng, teknik perekrutan anggota, simulasi simpan pinjam, dan kunjungan lapangan.



Kegiatan Pembinaan Organisasi Perempuan

Tujuan kegiatan ini adalah untuk konsolidasi peran organisasi perempuan yang ada di Jawa Barat sehingga dapat saling mendukung dan mengisi kinerja memberikan bantuan kepada perempuan dan anak khususnya yang menjadi korban kekerasan dan trafficking, juga memberikan langkah pencegahan.

Salah satu hasil dari kegiatan ini adalah adanya komitmen yang berhasil disepakati dalam Rapat Kerja Organisasi Perempuan pada 25 Agustus 2016 di Hotel Bumi Asih Jaya yaitu :



- 1) Organisasi perempuan harus dapat menjadi wadah komunikasi bagi masyarakat
- 2) Rencana kerja Organisasi Perempuan diantaranya berisi konten-konten mengenai permasalahan perempuan dan anak yang nantinya ditidakklanjuti
- 3) Pembuatan laporan yang baik dan rutin sebagai bentuk pertanggungjawaban untuk bahan evaluasi selanjutnya
- 4) Meningkatkan pemahaman pentingnya informasi dan teknologi dalam masyarakat
- 5) Saling bekerjasama dalam pembinaan dan pengawasan penggunaan informasi teknologi baik di keluarga maupun di masyarakat
- 6) Mendukung berbagai program pemerintah Provinsi Jawa Barat yang berbasis web.

Kegiatan Peringatan Hari Perempuan Nasional

Hari Ibu ke-88, Jabar Terus Kampanyekan “Tiga Akhiri” (Three Ends) .

Upacara Peringatan Hari Ibu ke-88 seperti biasa dilaksanakan di Halaman Depan Gedung Sate, Jl. Diponegoro No. 22, pada Hari Kamis 22 Desember 2016. Wakil Gubernur Jawa Barat mengajak semua komponen masyarakat agar bisa berpartisipasi dalam mengkampanyekan “Tiga Akhiri”(Three Ends), yaitu :

- 1) Akhiri perdagangan manusia,
- 2) Akhiri kekerasan terhadap perempuan dan anak,
- 3) Akhiri hambatan keadilan ekonomi bagi seluruh perempuan di Jawa Barat.



Pesan Wakil Gubernur dalam Upacara Hari Ibu ke 88 ini :

“Perempuan dan anak maju, Jawa Barat kuat.

Perempuan dan laki-laki setara, Jawa Barat berdaya saing.

Keluarga harmonis, masyarakat sejahtera”.

Acara ini dirangkaikan pula dengan peringatan Hari Kesetiakawanan Sosial Nasional (HKSAN) dan Hari Disabilitas Internasional (HDI) Tingkat Provinsi Jawa Barat Tahun 2016.

Kegiatan yang dilaksanakan dalam upaya perlindungan perempuan dan anak secara ringkas terangkum sebagai berikut.

Kegiatan Perlindungan Perempuan, dalam kegiatan ini dihasilkan output :

Pembekalan Pengetahuan Trafficking Bagi Siswa Sekolah dan Guru BK dilaksanakan di 4 BKPP Provinsi Jawa Barat diikuti 700 peserta terdiri dari anggota Gugus Tugas TPPO, camat, kepala desa, Babinsa, Babinkamtibmas, Polres, P2TP2A, PKK, LSM, MUI dan siswa SMP/ S bersama guru BP. camat, kepala desa, Babinsa, Babinkamtibmas, Polres, P2TP2A, PKK, LSM, MUI dan siswa SMP/ S bersama guru BP.



Kegiatan ini dilatarbelakangi oleh banyaknya peristiwa yang saat ini muncul ke publik menyangkut perdagangan orang, KDRT, kasus pelecehan seksual, kekerasan fisik, psikis, prostitusi online anak, eksploitasi, penelantaran dan anak yang bermasalah dengan hukum.

Fenomena kekerasan terhadap perempuan dan anak tidak terjadi dengan sendirinya, namun ada pemicu yang mendorong dan membuat orang untuk melakukan hal tersebut.

Untuk mencegah terjadinya kasus kekerasan dan trafficking, maka semua pihak peserta rapat membuat komitmen berikut :

- 1) Bersatu padu menyatukan komitmen dalam mencegah serta menangani korban kekerasan terhadap perempuan dan anak yang disebabkan oleh berbagai hal seperti narkoba, kemajuan teknologi informasi negatif, serta menggunakan obat penenang illegal seperti yang sedang terjadi di Kab. Sukabumi
- 2) Terbangunnya jejaring yang memiliki komitmen dalam upaya pencegahan ke depan agar kasus-kasus seperti ini tidak terulang lagi.
- 3) Menghukum dengan berat pelaku tindak pidana perdagangan orang dan kekerasan terhadap anak dan perempuan sehingga membuat efek jera bagi dirinya dan bagi orang lain.

Melalui kegiatan ini pula berhasil dijemput dan dipulangkan sebanyak 37 korban trafficking ke daerah asal masing-masing, sehingga sejak tahun 2009 telah berhasil dipulangkan 309 orang korban trafficking dari berbagai daerah.



Lomba Stand Up Comedy bagi siswa tingkat SMP, SMA dan Sederajat se Jawa Barat dengan Tema Trafficking KDRT dan Pornografi



Pemberian hadiah bagi pemenang Stand Up Comedi

Penguatan Jejaring Pencegahan *Trafficking*

Kasus perdagangan orang di Indonesia masih menempati peringkat 3 besar dunia dengan kelompok yang paling rentan menjadi korban adalah perempuan dan anak-anak. Meski demikian tidak menutup kemungkinan laki-laki juga menjadi korban. Berdasarkan data Kepolisian Negara Republik Indonesia, pada tahun 2011 hingga 2013 tercatat 509 total kasus Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO). Kasus eksploitasi ketenagakerjaan menempati jumlah terbanyak yaitu 213 kasus, eksploitasi seksual sebanyak 2015 kasus, 31 kasus terkait pekerjaan yang tidak sesuai dengan perjanjian, hingga 5 kasus bayi diperjualbelikan. Diperlukan kepedulian dari seluruh elemen masyarakat beserta organisasi terkait dan kerjasama lembaga pemerintahan untuk berani bersuara, menyingkap, dan menindaklanjuti kasus-kasus TPPO agar kemanusiaan mendapat tempatnya yang layak.

Untuk mencegah meluasnya trafficking dilaksanakan penguatan jejaring pencegahan trafficking dengan pertemuan berbagai pihak yang dapat ikut serta berpartisipasi dalam pencegahan trafficking yaitu pihak pemerintahan (OPD mitra), Kepolisian, Guru, LSM.

Kegiatan ini dilaksanakan di 4 BKPP Provinsi Jawa Barat melibatkan 700 peserta.

Kegiatan Women Self Defense/Pertahanan Diri Bagi Perempuan Jawa Barat

Pelatihan Women Self Defense of Kopo Ryu (WSDK) atau pelatihan bela diri perempuan yang diikuti oleh 400 orang peserta pada 26 Maret 2016. Pelatihan ini terselenggara atas kerja sama dengan Institut Pertanian Bogor (IPB) yang diadakan di Gedung Grha Widya Wisuda Institut Pertanian Bogor.



Peserta perempuan datang dari berbagai kalangan. Mulai dari mahasiswa IPB, Persatuan Wanita Olahraga Seluruh Indonesia (Perwosi), P2TP2A Wilayah Bogor, Tenaga Kerja Wanita (TKW) yang akan diberangkatkan ke luar negeri, Kaukus Perempuan Politik Indonesia (KPPI) Provinsi Jawa Barat, Gabungan Organisasi Wanita (GOW) Wilayah Bogor, serta berbagai organisasi wanita lainnya.

WSDK adalah teknik beladiri dengan penekanan pada gerakan sehari-hari yang relatif praktis dan sederhana sehingga mudah diingat dan dipraktikkan. Dengan memanfaatkan alat-alat yang *familiar* dengan kehidupan perempuan sehari-hari sebagai senjata untuk mempertahankan dan membela diri, peserta dibekali ketrampilan bela diri dengan menggunakan lipstik, botol air mineral, pulpen, dan benda-benda sederhana lainnya. WSDK juga menamakan jurus-jurusnya dengan nama yang mudah diingat seperti teknik bercermin, kepret, cubit, dan lain sebagainya.

Pelatihan ini dianggap sebagai insentif yang diharapkan akan mampu merubah *mindset* perempuan mengenai kemampuan dirinya sendiri sehingga dalam jangka panjang akan dapat menurunkan tingkat kekerasan jalanan terhadap perempuan.

Kegiatan Perlindungan Anak

Pelatihan KTA Bagi Kelompok Sebaya

Kegiatan dilaksanakan pada Bulan September 2016 di 3 (tiga) kabupaten/kota yaitu Kota Depok, Kabupaten Bogor, Kabupaten Pangandaran, masing-masing sebanyak 80 peserta sehingga total diikuti 240 peserta terdiri dari : Forum Anak Daerah dan Siswa/pelajar SMA/SMU sederajat. Narasumber dari kegiatan ini dari Pusat Pengembangan PAUD dan DIKMAS Jawa Barat serta Perkumpulan Keluarga Peduli Pendidikan (KERLIP) Jawa Barat.

Materi yang disampaikan pada Pelatihan Penangan KtA Bagi Kelompok Sebaya terdiri dari:

- 1) Dinamika Kelompok Dalam Pembangunan Kebersamaan : permainan-permainan yang mengasah kekompakan peserta
- 2) Penanganan Bullying di Sekolah, dilanjutkan permainan-permainan yang mengasah pola pikir peserta apabila terjadi bullying di sekitar mereka
- 3) Simulasi Penangan KtA Bagi Kelompok Sebaya

Hasil yang diharapkan dari kegiatan ini adalah:

- 1) Terlatihnya para siswa/siswi pelajar dalam mencegah dan menangani kekerasan yang terjadi
- 2) Terlatihnya pengurus Forum Anak dalam mencegah dan menangani KtA di lingkungan sekolahnya
- 3) Tercapainya komitmen dan pemahaman yang sama diantara para peserta (pelajar) dalam mencegah dan menangani kekerasan yang terjadi bagi kelompok sebaya di daerahnya masing-masing.



Kabupaten Bogor





Kabupaten Pangandaran

Forum Koordinasi Pelaksanaan Kebijakan Perlindungan Anak yang Berhadapan dengan Hukum

Kegiatan dilaksanakan September 2016 di Hotel Prime Park Hotel Jl. H. Hasan Mustofa Bandung. Peserta Forum sebanyak 28 undangan terdiri dari:

- 1) Ketua Pengadilan Tinggi Jawa Barat
- 2) Ketua Pengadilan Negeri Bandung
- 3) Kepala Kejaksaan Tinggi Jawa Barat
- 4) Kepala Polda Provinsi Jawa Barat
- 5) Kepala Kepolisian Resort Kota Bandung.
- 6) Kepala Unit Pelayanan Perempuan dan Anak Polda Jabar.
- 7) Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Barat
- 8) Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat
- 9) Kepala Dinas Sosial Provinsi Jawa Barat
- 10) Kepala Disnakertrans Provinsi Jawa Barat
- 11) Kepala Bappeda Provinsi Jawa Barat
- 12) Kepala Kanwil Hukum Jawa Barat
- 13) Kepala BPPKB Kota Bandung
- 14) Kepala Balai Pemasyarakatan Bandung
- 15) Kepala LPKA Sukamiskin
- 16) Kepala LPAS Sukamiskin
- 17) Ketua DPRD Provinsi Jawa Barat
- 18) Ketua DPRD Kota Bandung
- 19) Kepala Dinas Sosial Kota Bandung
- 20) Pekerja Sosial Kota Bandung
- 21) Ketua P2TP2A Provinsi Jawa Barat
- 22) Ketua P2TP2A Kota Bandung
- 23) Komisi Perlindungan Anak Daerah Provinsi Jawa Barat
- 24) Komisi Perlindungan Anak Daerah Jawa Barat
- 25) Ketua PSW UIN
- 26) Ketua LPA Jawa Barat
- 27) Ketua LAHA Provinsi Jawa Barat
- 28) Kepala SMPN 34 Provinsi Jawa Barat



Materi yang disampaikan secara panel yang terdiri dari:

- 1) Kebijakan Perlindungan dan Penanganan Anak Bermasalah Hukum (ABH), oleh Kabid Perlindungan Anak korban stigmatisasi dan jaringan teroris Kapolda Jawa Barat
- 2) Implementasi Pelaksanaan Undang Undang No. 11 tahun 2012 tentang SPPA (Sistem Peradilan Pidana Anak) di daerah, oleh Hakim Ketua Pengadilan Tinggi Jawa Barat Karel Tuppu. SH.MH

- 3) Peran Pemerintah Daerah dalam Pelaksanaan Perlindungan dan Pemenuhan Hak Anak Bermasalah Hukum, oleh dosen STTKS dan Kabid Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial Dinas Sosial Drs. M. ILYAS M.AG. MPS.SP.

Peringatan Hari Anak Nasional (HAN)

Hari Anak Nasional jatuh setiap tanggal 23 Juli, namun untuk tahun ini Jawa Barat memperingati Hari Anak Nasional dibarengkan dengan Hari Keluarga Nasional. Keduanya dilaksanakan pada tanggal 23 Agustus 2016 di Lapangan Binjas TNI AU Lanud Sulaiman Kabupaten Bandung. Diselenggarakan atas kerjasama BP3AKB Provinsi Jawa Barat dan Perwakilan BKKBN Jawa Barat serta instansi terkait lainnya Peringatan dihadiri oleh Gubernur Jawa Barat Ahmad Heryawan dan Ibu Netty Heryawan sebagai Ketua P2TP2A dengan hampir 6,000 orang lebih pengunjung. Mereka datang dari berbagai kalangan: bupati dan walikota dari beberapa kabupaten dan kota di Jawa Barat, forum anak dari kabupaten/kota, MOTEKAR, PEKKA, anak-anak sekolah dan guru-guru.

Acara yang digelar selain pasar makanan dan kerajinan, perpustakaan keliling, lomba mewarnai juga dihadirkan kampung anak dengan berbagai macam permainan tradisional enggrang, bakiak, lompat tali, congklak dan sondah yang boleh dimainkan pengunjung. Untuk hiburan ada juga penampilan Forum Anak Jawa Barat yang menyanyikan lagu Manuk Dadali, paduan suara Universitas Padjadjaran yang menyanyikan *jingle Three Ends*, juga dari anak yang memiliki keterbatasan yang membawakan lagu dengan iringan angklung.

Peringatan Hari Anak Nasional dan Keluarga Nasional 2016 ini mengambil tema “Keluarga Benteng Utama Hindari Kekerasan Ciptakan Keharmonisan”.

Dalam sambutannya, Gubernur menyampaikan bahwa keluarga merupakan madrasah pertama yang menciptakan anak-anak yang hebat maka sebaiknya ciptakan keluarga yang harmonis, karena keluarga yang harmonis akan menciptakan anak-anak yang hebat. Bila keluarga hebat, negara akan hebat.

Gubernur menyampaikan, bahwa pada tahun 2016 terjadi 76 kekerasan, tahun 2015 778 kekerasan, dan pada tahun 2014 1,181 kekerasan. “Stop kekerasan, baik itu kekerasan pada perempuan, keluarga, dan terlebih pada anak karena

kekerasan fisik, mental maupun seksual tidak sesuai dengan kaidah apapun apalagi kaidah agama,”.

Dalam kesempatan peringatan ini, beberapa Kepala Daerah menerima piagam Mandala Kencana termasuk para tokoh masyarakat, piagam lomba kreativitas Forum Anak Daerah, disampaikan pula KLA Award Tingkat Provinsi Jawa Barat kepada 12 kabupaten/kota yang dipersiapkan untuk mengikuti Penilaian KLA Tingkat Nasional pada tahun 2017.



Kabupaten/Kota Penerima KLA Award Tingkat Provinsi Jawa Barat Tahun 2016

No.	Kabupaten/Kota	Penghargaan
1	Kabupaten Bogor	Juara Umum ke-1
2	Kabupaten Depok	Juara Umum ke-2
3	Kota Sukabumi	Juara Umum ke-3
4	Kota Bandung	Juara ke-1 Kluster Pendidikan
5	Kota Cirebon	Juara ke-2 Kluster Pendidikan
6	Kabupaten Cianjur	Juara ke-3 Kluster Pendidikan
7	Kota Bekasi	Juara ke-1 Kluster Kesehatan
8	Kota Cimahi	Juara ke-2 Kluster Kesehatan
9	Kabupaten Cirebon	Juara ke-3 Kluster Kesehatan
10	Kabupaten Kuningan	Juara ke-1 Kluster Perlindungan
11	Kabupaten Ciamis	Juara ke-2 Kluster Perlindungan
12	Kabupaten Bandung	Juara ke-3 Kluster Perlindungan

Daftar Kejuaran Lomba Kreatifitas Anak Forum Anak Kabupaten/Kota Terbaik

No.	Nama Forum Anak	Kab/Kota	Rangking
1	Forum Anak Jati Mandiri (FAJIMI)	Kota Cimahi	Juara I
2	Forum Anak Belimbing (FORABING)	Kota Depok	Juara II
3	Forum Anak Kabupaten Bogor (FAKBO)	Kabupaten Bogor	Juara III
4	Forum Generasi Bangkit Anak Cianjur (FOGEBACI)	Kabupaten Cianjur	Harapan I
5	Forum Anak Kota Sukabumi (FAKSI)	Kota Sukabumi	Harapan II
6	Forum Anak Kabupaten Sukabumi (FORBUMI)	Kabupaten Sukabumi	Harapan III



Permasalahan dan Solusi

Jumlah kasus dan korban kekerasan semakin menunjukkan adanya peningkatan dibanding tahun-tahun lalu. Hal ini antara lain disebabkan semakin mencuatnya kesadaran dan keberanian masyarakat untuk mengawasi dan memberikan laporan. Demikian pula dari sisi korban sudah banyak yang berani melapor. Dari 27 kota dan kabupaten di Provinsi Jawa Barat, hampir seluruhnya memiliki masalah kekerasan terhadap anak dan perempuan. Hanya saja, karakteristik kasusnya berbeda-beda. Di Kota Bandung, karakteristiknya lebih kepada kasus kekerasan terhadap anak dan pelacuran anak. Di Kabupaten Sukabumi, Kabupaten Tasikmalaya dan Kabupaten Garut, karakteristik kasusnya lebih ke arah pencabulan laki-laki dewasa terhadap anak di bawah umur.

Berbeda dengan trafficking yang cenderung menurun sejak 2012, kekerasan anak terutama seksual justru meningkat, terjadi hampir di semua daerah di Jawa Barat. Daerah perkotaan merupakan wilayah yang rawan terjadinya kasus kekerasan seksual terhadap anak. Pada akhir tahun 2016 terungkap prostitusi anak laki-laki maupun anak perempuan di daerah Kabupaten Bogor oleh Bareskrim POLRI, menambah panjang kasus kekerasan terhadap anak.

Solusi yang dilakukan adalah dengan meningkatkan sosialisasi, memberi pembekalan kepada para pelajar, meningkatkan pelayanan terhadap pengaduan, sosialisasi dan pelatihan untuk penanganan dan pencegahan kekerasan dan trafficking, serta penegakan hukum yang tegas dan keras bagi para pelaku.

Sasaran Strategis 3 : Menurunnya Angka Kelahiran dan Meningkatnya Ketahanan Keluarga

Sasaran strategis “Menurunnya angka kelahiran dan meningkatnya ketahanan keluarga” dijabarkan dengan 4(empat) program yaitu Program Penataan Administrasi Kependudukan, Program Ketahanan Keluarga dan Kesejahteraan Keluarga, Program Pelayanan Keluarga Berencana, serta Program Pendewasaan Usia Perkawinan (PUP). Alokasi anggaran APBD Provinsi Jawa Barat untuk keempat program sebesar Rp.13,818,939,500.00 (Tabel 1), terealisasi sebesar Rp.11,819,970,876.00 (85.53%). Rincian evaluasi program dan kegiatan pada form PKK Lampiran 6.

Program Penataan Administrasi Kependudukan dijabarkan dengan satu kegiatan yaitu:

Pengendalian Kependudukan di Jawa Barat

Program Ketahanan Keluarga dan Kesejahteraan Keluarga terdiri dari dua kegiatan :

- 1) Ketahanan Keluarga
- 2) Motivator Ketahanan Keluarga (MOTEKAR)

Program Pelayanan Keluarga Berencana terdiri dari satu kegiatan :

Peningkatan Kesertaan Ber-KB

Program Pendewasaan Usia Perkawinan, satu kegiatan :

Pendewasaan Usia Perkawinan.

Kegiatan yang dilaksanakan dalam program-program ini terangkum sebagai berikut.

Kegiatan Pengendalian Kependudukan, output yang dihasilkan antara lain :

Pertemuan Tenaga Penggerak Desa/Kelurahan se-Jawa Barat 2016

Tenaga Penggerak Desa/Kelurahan (TPD/K) merupakan tenaga kontrak / honorer di UPTD yang bergerak di bidang kependudukan dan keluarga Berencana. Kekurangan tenaga Penggerak Program Kependudukan dan KB di tingkat Desa/Kelurahan menjadi dasar pembentukan TPD ini, sehingga akhirnya TPD resmi dibentuk pada tahun 2011. Pada dasarnya TPD mempunyai tugas yang sama dengan PKB/PLKB, antara lain :

- 1) Menguasai potensi wilayah kerja sejak pengumpulan data keluarga dan Pasangan Usia Subur, dapat menganalisa penentuan masalah prioritas, dan menyusun rencana kerja setiap bulan
- 2) Melaksanakan mekanisme operasional Program Kependudukan dan KB di tingkat Desa/Kelurahan
- 3) Melaksanakan penyuluhan KB – KS dan program pembangunan lainnya dalam upaya Pembangunan Keluarga Sejahtera
- 4) Membantu dalam kegiatan Pelaporan KB dan KS di tingkat Desa/Kelurahan dan Klinik KB
- 5) Melakukan evaluasi dan menyampaikan laporan bulanan sesuai dengan system yang berlaku
- 6) Bertanggung jawab dalam menyelesaikan PPM KB – KS di Desa/Kelurahan lokasi kerja. Oleh karena tugas tersebut, maka TPD dituntut untuk bisa menjadi lebih kreatif, aktif dan inovatif dalam melakukan penggerakan dan pengembangan program KB di lapangan, sehingga keberhasilan program KB dapat tercapai.

Pertemuan TPD se-Jawa Barat dilaksanakan di hotel Puri Khatulistiwa, Jatinangor Kabupaten Sumedang pada April 2016. Peserta pertemuan sebanyak 169 orang terdiri dari: TPD Kabupaten/kota, Kepala Bidang yang menangani TPD/K, OPD Pengelola KB Kabupaten/Kota, Biro Pelayanan Sosial Dasar – Setda Provinsi Jawa Barat, Perwakilan BKKBN Provinsi Jawa Barat, Tim Penggerak PKK Provinsi Jawa Barat yaitu Pokja II dan



Pokja IV, Forum Pos KB Provinsi Jawa Barat, PD IBI Provinsi Jawa Barat dan Ikatan Penyuluh Keluarga Berencana (Ipeu – KB) Jawa Barat.

Kesepakatan yang dihasilkan oleh pertemuan ini yaitu perlunya koordinasi pelayanan terpadu dari semua pihak penyelenggara baik dari sisi kebijakan ataupun pendanaan sehingga dapat menunjang keberhasilan tugas TPD di lapangan dan menghasilkan kualitas yang baik dalam pelayanan keluarga berencana. Oleh karena itu dukungan untuk mengadakan pertemuan rutin dalam rangka memperkuat dan memperkuat komitmen antara TPD dengan pihak OPD perlu dilakukan, agar pelaksanaan pelayanan KB bisa berjalan dengan baik.

Dalam Kegiatan Pengendalian Kependudukan ini, realisasi keuangan hanya mencapai 74.36% sedangkan realisasi fisik tercapai sekitar 95% karena adanya sebagian kecil pencetakan Media KIE yang tidak dilakukan, seharusnya 11,681 lembar menjadi 8,501 lembar karena adanya perubahan kelembagaan.

Kegiatan Ketahanan Keluarga, output kegiatan ini antara lain :

Sosialisasi Perda Penyelenggaraan Pembangunan Ketahanan Keluarga

Sosialisasi ini bertujuan untuk membangun pemahaman pentingnya membangun ketahanan keluarga bagi aparat untuk diinformasikan kembali kepada masyarakat luas sesuai bidang tugas. Sasaran kegiatan adalah 400 peserta PNS Non Provinsi dan Non PNS di 27 kabupaten/kota.



Sosialisasi dilaksanakan di 4 (empat) BKPP yaitu Bogor, Purwakarta, Cirebon dan Priangan Timur, masing-masing sebanyak 100 orang peserta terdiri dari PNS Non Provinsi 50 orang dan Non PNS 50 orang.

Pihak yang diundang untuk Kegiatan Sosialisasi Penyelenggaraan Pembangunan Ketahanan Keluarga adalah pihak yang memiliki keterkaitan dalam membangun ketahanan keluarga di masyarakat meliputi :

- 1) Biro Pengembangan Sosial Sekretariat Daerah
- 2) Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah (BAPPEDA)
- 3) Badan Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana (BP3AKB)
- 4) Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintah Desa (BPMPD)
- 5) Dinas Kesehatan
- 6) Dinas Pendidikan
- 7) Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil
- 8) Dinas Sosial
- 9) Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi
- 10) Kantor Wilayah Kementerian Agama
- 11) Tim Penggerak-Pemberdayaan Dan Kesejahteraan Keluarga (TP-PKK)
- 12) Pusat Pelayanan Terpadu Perlindungan Perempuan Dan Anak (P2TP2A)
- 13) Gabungan Organisasi Wanita
- 14) Tokoh Agama
- 15) Tokoh Masyarakat.

Kegiatan MOTEKAR, beberapa output yang dihasilkan:

Sosialisasi Program Motivator Ketahanan Keluarga (MOTEKAR) bagi Unit Pelaksana Teknis (UPT) Kabupaten/Kota.

Materi yang disampaikan :

- 1) Optimalisasi Perlindungan Anak dalam Pembentukan Karakter di Keluarga oleh KPPPA
- 2) Pemanfaatan dan Aksesibilitas Masyarakat dalam Pemenuhan Legalitas Kependudukan sebagai Wujud Ketahanan Keluarga oleh Direktur Pencatatan Sipil Dirjen Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri
- 3) Optimalisasi Pembangunan Ketahanan Keluarga melalui Program Motivator Ketahanan Keluarga (MOTEKAR)
- 4) Integrasi Sistem Informasi Pembangunan Ketahanan Keluarga

- 5) Pedoman Umum dan Petunjuk Teknis Motivator Ketahanan Keluarga (MOTEKAR)
- 6) Peran Keluarga Dalam Penyelenggaraan Pembangunan Ketahanan Keluarga.

Dalam kegiatan sosialisasi ini dihasilkan komitmen yang ditandatangani oleh seluruh unsur yang mewakili kecamatan di Kabupaten/Kota, yaitu untuk :

- 1) berpartisipasi secara aktif dalam pembangunan Ketahanan Keluarga di Jawa Barat
- 2) Melakukan peran Pembinaan dalam bentuk memberikan fasilitasi data, akses informasi dan komunikasi, serta dukungan sarana prasarana
- 3) Melakukan pendampingan dalam pelaporan kegiatan Motekar.



Pemantapan MOTEKAR

Tujuan Kegiatan Pemantapan Motekar adalah:

- a. Memberikan pemahaman pada tenaga Motekar tentang fungsi dan peran keluarga sebagai jawaban terhadap tantangan dan permasalahan keluarga yang ada pada saat ini seiring maraknya kasus pelecehan seksual, KDRT, serta derasnya arus negatif akibat dampak globalisasi media.
- b. Meningkatkan pengetahuan, sikap, keterampilan dan kompetensi tenaga Motekar dalam pelaksanaan tugas pemberdayaan keluarga di desa/kelurahan untuk meningkatkan kualitas kehidupan keluarga.

Kegiatan pemantapan MOTEKAR dilaksanakan pada Bulan Juli sampai Agustus di Rindam III Siliwangi Jl. Manado No.4 Bandung dalam 4 (empat) angkatan untuk peserta sebanyak 676 orang kader MOTEKAR, masing-masing selama 3 (tiga) hari.

Materi yang disampaikan :

- 1) Jabar Tolak Kekerasan oleh ibu Netty Heyawan
- 2) Kasus administratif perkawinan dan implikasinya oleh Kemenag Provinsi Jawa Barat
- 3) Peran keluarga dalam penanganan kasus kekerasan di masyarakat oleh Kemen PPPA RI
- 4) Memahami dunia anak, menjauhkan anak dari tindak kekerasan oleh UIN Sunan Gunung Jati Bandung
- 5) Disiplin dan Pembangunan Karakter oleh Rindam III Siliwangi



- 6) Materi khusus praktek di dalam kelas. Terbagi menjadi 7 kelas dari total peserta 175 orang masing-masing angkatan, rata-rata terdiri dari 6 kabupaten/kota
- 7) Materi tambahan dari BP3AKB Provinsi Jawa Barat.

Diharapkan tenaga MOTEKAR akan bertambah ilmu dan wawasan pengetahuan serta strategi, baik secara teknis lapangan maupun menganalisis data yang baik agar dapat mengaplikasikannya secara tepat di lapangan serta menumbuhkan sikap positif, disiplin dan selalu semangat dalam bekerja juga siap melayani/membantu masyarakat. Sosialisasi Program MOTEKAR bagi Kepala Desa dan Lurah

Tujuan kegiatan ini adalah untuk meningkatkan wawasan dan pemahaman program MOTEKAR bagi para Kepala Desa dan Lurah. Kegiatan berlangsung Bulan November, bertempat di Hotel Panorama Lembang, Kabupaten Bandung Barat.

Peserta sebanyak 314 Kepala Desa/Lurah yang berasal dari 27 kabupaten/kota, koordinator MOTEKAR 27 orang dan OPD kabupaten/kota yang membidangi Ketahanan Keluarga sebanyak 27 orang.

Hasil yang diharapkan pada kegiatan ini adalah :

- 1) Kepala Desa/Lurah memahami program MOTEKAR dalam proses pemberdayaan keluarga.
- 2) Kepala Desa/Lurah memahami tugas dan fungsi MOTEKAR sebagai pemberdaya keluarga-keluarga yang mengalami berbagai kerentanan, sehingga dapat ikut serta memfasilitasi dan mengadvokasi keluarga tersebut.
- 3) Kepala Desa/Lurah dapat memberi dukungan, evaluasi, dan pembinaan terhadap MOTEKAR sehingga terjalin sinergitas program antara Kepala Desa/Lurah dengan MOTEKAR.

Materi yang disampaikan :

- 1) Keynote speech Jabar Tolak Kekerasan oleh Ketua TP-PKK Provinsi Jawa Barat
- 2) Sinergitas Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dalam Pembangunan Ketahanan Keluarga oleh Dirjen Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa
- 3) Perencanaan Pembangunan disampaikan oleh BPS Provinsi Jawa Barat
- 4) Situasi Global Ketahanan Keluarga
- 5) Overview Program Motivator Ketahanan Keluarga



Kegiatan Peningkatan Kesertaan Ber-KB, antara lain dengan output:

Pencanangan Bhakti TNI KB Kesehatan Terpadu Tingkat Kodam III/Siliwangi Tahun 2016 dengan tema “Melalui Program KB Kesehatan, kita kendalikan pertumbuhan penduduk dan kita tingkatkan kesehatan masyarakat dalam rangka mencapai kesejahteraan bersama”.

Kegiatan ini dilaksanakan di lapangan Helypad PT Krakatau Steel, Kota Cilegon, Banten 24 Mei 2016. Tujuannya adalah sebagai upaya untuk menekan laju pertumbuhan penduduk. Ribuan anggota TNI di jajaran Pandam Tiga Siliwangi, baik di wilayah Jawa Barat maupun Banten, dilibatkan sebagai tenaga penyuluh program Keluarga Berencana (KB) yang dilakukan oleh Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN). Pelibatan TNI melalui kerja Babinsa yang terjun langsung ke masyarakat sangat membantu penyuksesan program dalam mengatasi kendala pelaksanaan



program KB di daerah terpencil dan sulit terjangkau transportasi. Keterlibatan anggota TNI ini adalah sebagai salah satu bakti TNI terhadap masyarakat. Para anggota TNI ini juga tidak hanya dijadikan penyuluh saja tetapi juga ikut menjadi akseptor KB. Program bakti TNI KB Kesehatan Terpadu ini sekaligus bertujuan untuk menjaga jalinan kerjasama TNI dan pemerintah dalam upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat sebagai basis ketahanan nasional. Acara ini menarik perhatian masyarakat. Ratusan warga bahkan rela antri untuk ikut menjadi akseptor keluarga berencana. Pada acara ini selain diadakan pelayanan KB, juga pengobatan gratis, pembagian sembako, serta memberikan santunan kepada anak yatim.

Permasalahan dan Solusi

Permasalahan utama sampai saat ini dalam pelaksanaan pembangunan Program Keluarga Berencana adalah masih tingginya laju pertumbuhan penduduk yang menurut data statistik terakhir sebesar 1,9% (BPS, Sensus Penduduk 2010). Hal ini antara lain disebabkan masih tingginya total fertility rate (TFR) yakni 2,4 (BPS, Sensus Penduduk 2010), dan masih rendahnya peran serta pria dalam ber-KB, yakni hanya 2,49% dari keikutsertaan total KB.

Di samping itu ancaman dalam kesehatan reproduksi remaja khususnya wanita yang ditandai dengan makin meningkatnya jumlah penderita HIV dan AIDs, seks bebas, prostitusi anak dan remaja serta kasus narkoba. Solusinya adalah menekan pertumbuhan penduduk dengan cara: meningkatkan kualitas program KB yang diarahkan kepada pasangan usia subur muda paritas tinggi, meningkatkan kampanye dan KIE (Komunikasi, Informasi, dan Edukasi), sosialisasi kesehatan reproduksi, serta intensifikasi dan ekstensifikasi program Kesehatan Reproduksi Remaja.

Di sisi penyerapan anggaran, ada sedikit permasalahan dalam pelaksanaan program Ketahanan Keluarga pada tahun ini yaitu peserta pelatihan dan pembekalan MOTEKAR yang kurang dari target. Target peserta yang agak rendah ini terjadi disebabkan pada pelaksanaan pemantapan dan pembinaan MOTEKAR, ada sebagian kader yang berhalangan hadir karena sakit dan melahirkan serta ada pula sebagian kader yang mengundurkan diri.

Rencana selanjutnya untuk pemantapan kader MOTEKAR ini adalah dengan terus membina kader yang sudah ada serta terus meningkatkan fasilitasi dan motivasi untuk memberikan pelayanan bagi ketahanan keluarga desa/kelurahan binaannya.

Sedikit permasalahan dalam pelaksanaan program Ketahanan Keluarga pada tahun ini yaitu realisasi keuangan Kegiatan MOTEKAR hanya tercapai 82.30% dan realisasi fisik 85.45%. Target sasaran yang agak rendah ini terjadi disebabkan pada pelaksanaan pemantapan dan pembinaan MOTEKAR, ada sebagian kader yang berhalangan hadir karena sakit dan melahirkan serta ada pula sebagian kader yang mengundurkan diri.

Rencana selanjutnya untuk pemantapan kader MOTEKAR ini adalah dengan terus membina kader yang sudah ada serta terus meningkatkan fasilitasi dan motivasi untuk memberikan pelayanan bagi ketahanan keluarga desa/kelurahan binaannya.

3.1.3. Evaluasi Capaian Indikator Kinerja Tahun 2016

Evaluasi pencapaian indikator sasaran RENSTRA sampai Tahun 2016 berdasarkan sasaran strategis (Form Pengukuran Pencapaian Sasaran atau PPS, Lampiran 7) :

Sasaran Strategis 1 : *Meningkatnya Peran Serta dan Kesetaraan Gender dalam Pembangunan*

Untuk mencapai sasaran ini, Indeks Pembangunan Gender (IPG) dan Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) merupakan indikator sasaran yang spesifik mengukur keberhasilan pembangunan peran serta dan kesetaraan gender. Pengukuran IPG dan IDG dilaksanakan secara terpusat oleh Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KPPPA) bekerja sama dengan BPS RI. Penerbitan data terakhir diambil dari buku “Pembangunan Manusia Berbasis Gender Tahun 2016”.

Evaluasi capaian indikator Sasaran Strategis 1 sebagai berikut :

- a. Indeks Pembangunan Gender (IPG) sebesar 89.11%, pada tahun 2016 KPPPA menerbitkan indikator IPG ini dengan satuan yang berubah (awalnya poin menjadi persen, sesuai ketentuan UNDP) sehingga dilakukan ajuan koreksi untuk target RPJMD Jawa Barat menjadi 89.68% (semula 67 poin). Target 89.68% dibanding realisasi 89.11% maka tercapai 99.36%.
Dibandingkan dengan tahun sebelumnya dimana target IPG tercapai 98.52% (realisasi 88.35%, target 89.68%) maka terjadi peningkatan kinerja sebesar 0.85%.
- b. Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) dari target 73 poin pada tercapai 69.02 poin atau 94.55%. Jika dibandingkan angka IDG tahun lalu sebesar 68.87 poin maka terjadi peningkatan IDG sebesar 0.15 poin
- c. Prosentase kabupaten/kota yang telah membentuk POKJA PUG pada tahun 2016 ditargetkan sebesar 80% (21 kabupaten/kota) dan terealisasi sebanyak 20 kabupaten/kota yang sudah membentuk POKJA PUG sampai dengan 2016 atau target tercapai 92.59%.
- d. Jumlah Perolehan Anugerah Parahita Ekapraya (APE) kabupaten/kota Tahun 2016 berhasil diraih oleh 13 kabupaten/kota, dibanding target 9 kabupaten/kota maka keberhasilan mencapai 144.44%.

Di tingkat provinsi sendiri, Jawa Barat berhasil meraih APE Kategori Mentor, meningkat dari perolehan sebelumnya yaitu APE Kategori Utama (2 kali berturut-turut). Hal ini merupakan prestasi karena seharusnya setelah 3 kali berturut-turut memperoleh APE Kategori Utama barulah dapat diraih Kategori Mentor.

Sasaran Strategis 2 : *Meningkatnya kualitas hidup dan perlindungan perempuan dan anak*

Sasaran Peningkatan kualitas hidup perempuan dan perlindungan perempuan dan anak tahun 2016 dalam RENSTRA diukur dengan 6 (enam) indikator, menunjukkan keberhasilan upaya perlindungan perempuan dan anak serta pemberdayaan perempuan. Keenam indikator ini yaitu :

- 1) Meningkatnya penanganan kekerasan terhadap perempuan
- 2) Meningkatnya jumlah perempuan birokrat dalam manajemen
- 3) Jumlah kabupaten/kota yang mendapat Penghargaan Kota Layak Anak (KLA).

Indikator lainnya :

- 1) Cakupan penanganan pengaduan korban kekerasan terhadap perempuan dan anak
- 2) Jumlah Kelompok PEKKA (Pemberdayaan Ekonomi Perempuan melalui program PEKKA)
- 3) Jumlah Desa/Kelurahan P2WKSS Aktif
- 4) Prosentase Anggota Parlemen perempuan

Kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak pada tahun 2016 kembali menunjukkan peningkatan yang mungkin diakibatkan semakin banyak masyarakat, orang tua dan korban yang berani melapor. Demikian pula penemuan korban kasus trafficking di Tahun 2016 mengalami peningkatan. Untuk merespon kondisi ini, BP3AKB bekerjasama dengan P2TP2A Jawa Barat melayani korban yang melapor sehingga indikator IKU “cakupan penanganan korban kekerasan terhadap perempuan dan anak” dapat terlayani seluruhnya (100%). Oleh karena indikator “cakupan penanganan korban kekerasan terhadap perempuan dan anak” akan selalu menunjukkan angka 100%, maka pada tahun 2016 dirubah menjadi “Meningkatnya penanganan kekerasan terhadap perempuan” sebesar 10% (Perjanjian Kinerja 2016). Kasus kekerasan sendiri nampaknya belum menunjukkan penurunan pada 2016. Disisi lain, terjadi peningkatan penanganan kasus kekerasan meliputi berbagai aspek yang diupayakan, termasuk didalamnya penambahan SDM pengelola, peningkatan kualitas SDM pengelola, penambahan sarana/prasarana pelayanan, dsb. Indikator “Meningkatnya penanganan kekerasan terhadap perempuan” pada tahun 2016 mengalami peningkatan yang diperkirakan melebihi 10% yaitu dengan diberikannya pelatihan bagi SDM pengelola pelayanan kekerasan serta disediakannya satu unit mobil keliling (MOLING) bantuan KPPPA dengan fasilitas pelayanan korban kekerasan, 11 kabupaten/kota pun menerima bantuan MOLING ditambah 2 unit motor keliling untuk 27 kabupaten/kota.

Satu indikator kinerja yang ditambahkan di tahun 2016 (indikator Perjanjian Kinerja/ PK) karena dipandang sangat mewakili peningkatan pemberdayaan perempuan adalah

“Meningkatnya jumlah perempuan birokrat dalam manajemen” yang ditetapkan sebesar 20% untuk 2016 (sementara itu kondisi jumlah perempuan birokrat pada tahun 2015 sebesar 18.33%). Pada tahun 2016, jumlah perempuan birokrat yaitu yang menduduki eselon 2 dan 3 tercatat 23.49%, sehingga target tercapai 117.45%.

Jumlah kabupaten/kota yang mendapat Penghargaan KLA ternyata tidak dilaksanakan penilaian oleh KPPPA pada Tahun 2016 sehingga masih dicatatkan capaian perolehan tahun lalu yaitu 8 kabupaten/kota penerima Penghargaan KLA (target tercapai 80%).

Indikator lainnya yaitu Jumlah Kelompok PEKKA (RENSTRA, IKU) sampai tahun 2016 tercapai total kumulatif berjumlah 501 Kelompok, sedangkan tahun 2015 sebanyak 493 kelompok. Jumlah kelompok PEKKA merupakan akumulasi pembentukan kelompok PEKKA sejak awal berdirinya BP3AKB Provinsi Jawa Barat Tahun 2009. Dibanding target sebanyak 545 kelompok, maka target tercapai 91.93%.

IKU Jumlah Desa/Kelurahan P2WKSS Aktif tahun 2016 terealisasi sebanyak 27 desa/kelurahan sehingga tercapai total kumulatif berjumlah 211 desa/kelurahan desa/kelurahan (100%). Pada tahun 2015 jumlahnya sebanyak 184 desa/kelurahan. Desa/Kelurahan P2WKSS Aktif adalah desa/kelurahan yang dinilai melakukan pengelolaan, pembinaan secara intensif terhadap kelompok P2WKSS yang ada di wilayahnya sehingga dapat berperan aktif, kepada desa/kelurahan ini kemudian diberikan insentif bantuan oleh Provinsi Jawa Barat. Pada tahun 2016 indikator ini tidak dipergunakan lagi karena dianggap sudah akan berjalan rutin bertambah 27 desa/kelurahan setiap tahun.

Indikator Jumlah Kabupaten/Kota Layak Anak (indicator IKU) pada tahun 2016 tidak diadakan penilaian oleh KPPPA untuk mendapat Penghargaan Presiden. Namun dilakukan penilaian Tingkat Provinsi Jawa Barat dan ditetapkan sebanyak 12 kabupaten/kota mendapat KLA Award Tingkat Provinsi Jawa Barat untuk dipersiapkan pada penilaian tingkat pusat tahun 2017. Sampai 2015 tercapai total kumulatif 35 desa/kelurahan KLA yang mendapat penghargaan presiden (bertambah 8 desa/kelurahan di Tahun 2015). Mulai tahun 2016 pula, indikator untuk KLA diperluas menjadi “Jumlah kabupaten/kota yang mendapat penghargaan Kota Layak Anak (KLA)”.

Sementara itu indikator Prosentase Anggota Parlemen perempuan (RENSTRA) pada tahun 2016 tidak dijadikan IKU karena selama 5 tahun kondisinya tidak akan berubah sebelum berlangsung kembali PEMILU, yaitu sebanyak 22% (22 orang) dibanding target 26% tercapai 94.62%.

Sasaran Strategis 3 : *Menurunnya Angka Kelahiran dan Meningkatnya Ketahanan Keluarga*

Pencapaian indikator sasaran ini adalah melalui peningkatan peserta KB dan peningkatan ketahanan keluarga diukur oleh Perwakilan BKKBN Provinsi Jawa Barat Tahun 2016 dengan hasil berikut.

Indikator “Prosentase Peserta KB Aktif terhadap Pasangan Usia Subur” (RENSTRA, IKU) Tahun 2016 tercapai 74,88% dari target 75% atau tercapai **99,84%**. Terjadi peningkatan sebesar 0,19% dibanding tahun 2015 (74,69%). Salah satu komponennya

yaitu “Peserta KB Pria” (IKU) pada Tahun 2016 masih sebesar 2.49% (2015 2.49%) . Sementara Peserta KB Mandiri meningkat menjadi 49,96% dibanding tahun 2015 41,82% atau bertambah 8,14%.

Indikator “Rata-rata Usia Kawin Pertama Wanita (UKPW)” (indicator RENSTRA, IKU) belum diperoleh update data, masih menggunakan data pada Tahun 2015 tercatat 19,60 Tahun, terdapat peningkatan dibanding data terakhir Tahun 2012 yaitu 18,90 Tahun. Dibandingkan dengan target UKPW tahun 2016 yaitu 20%, maka target tercapai sebesar 98%.

Indikator “Menurunnya Jumlah Keluarga Pra Sejahtera” (indikator RENSTRA, IKU) tahun 2015 sebanyak 9,57% (4.485.650 jiwa, BPS) tahun 2016 menurun menjadi 4.168.110 jiwa (BPS) atau 8,77%. Dengan demikian terjadi penurunan jumlah penduduk miskin sebanyak 317.540 jiwa atau 3,88% dibanding jumlah tahun lalu (target tercapai 107.78%).

Capaian Indikator Kinerja Utama

Indikator Kinerja Utama (IKU) BP3AKB yang sudah ditetapkan di awal perencanaan Tahun 2013-2018 diperjanjikan dalam dokumen Perjanjian Kinerja Eselon II. IKU BP3AKB adalah sama dengan IKU Gubernur, sesuai Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor 061/Kep.1409-Org/2015. Capaian IKU dimaksud tercantum dalam Tabel 3.1.3 berikut.

Tabel 3.1.3a.
Realisasi Indikator Kinerja Utama Tahun 2016

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	% Capaian
1	Meningkatnya peran serta dan kesetaraan gender dalam pembangunan	Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)	73 poin	69.02poin	99.36
		Indeks Pembangunan Gender (IPG)	89.68%	89.11%	94.55
		Penghargaan Presiden Anugerah Parahita Ekapraya	9 buah	13 buah	144.44
2	Meningkatnya kualitas hidup dan perlindungan perempuan dan anak	Cakupan penanganan kekerasan terhadap perempuan	100%	100%	100
		Pemberdayaan perempuan melalui Program PEKKA /Jumlah Kelompok PEKKA	545 kelompok	501 kelompok	91.93
		Jumlah Kota Layak Anak (KLA)	38 desa/kel	35 Desa/kel	92.11
3	Menurunnya angka kelahiran dan meningkatnya ketahanan keluarga	Prosentase Peserta KB Aktif terhadap Pasangan Usia Subur	75%	74.88%	99.84
		Prosentase Peserta KB Pria	3 %	2.49%	83.00
		Menurunnya Keluarga Pra Sejahtera	3.60%	3.88%	107.78

Keterangan: IKU berdasar Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor 061/Kep.1409-Org/2015

Capaian Indikator Perjanjian Kinerja

Indikator kinerja dalam Perjanjian Kinerja dan IKU pada prinsipnya adalah sama, hanya ada beberapa kalimat yang disempurnakan karena hasil pengukurannya akan stagnan setiap tahun sehingga perlu disempurnakan. Capaian indicator Perjanjian Kinerja tersaji pada table berikut.

Tabel 3.1.3b.
Realisasi Indikator Kinerja Perjanjian Kinerja Tahun 2016

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	% Capaian
1	Meningkatnya peran serta dan kesetaraan gender dalam pembangunan	Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)*	73 poin	69.02poin	99.36
		Indeks Pembangunan Gender (IPG)*	89.68%	89.11%	94.55
		Prosentase kabupaten/kota yang telah membentuk POKJA PUG	80%	74.07%	92.59
		Jumlah perolehan Anugerah Parahita Ekapraya kabupaten/kota*	9 kab/kota	13 kab/kota	144.44%
2	Meningkatnya kualitas hidup dan perlindungan perempuan dan anak	Meningkatnya penanganan kekerasan terhadap perempuan	10%	10%	100
		Meningkatnya jumlah perempuan birokrat dalam manajemen	20%	23.49%	117.45
		Jumlah kab/kota yang mendapat penghargaan Kota Layak Anak (KLA)*	10 kab/kota	8	80.00
3	Menurunnya angka kelahiran dan meningkatnya ketahanan keluarga	Prosentase Peserta KB Aktif terhadap Pasangan Usia Subur*	75%	74.88%	99.84
		Rata-rata Usia Kawin Pertama	20 tahun	19.6 tahun	98.00
		Menurunnya Keluarga Pra Sejahtera*	3.60%	3.88%	107.78

Keterangan: * IKU berdasar Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor 061/Kep.1409-Org/2015

Evaluasi Capaian Indikator Kinerja Triwulanan Tahun 2016

Capaian indikator kinerja Tahun 2016 secara lengkap dievaluasi rutin pada setiap triwulan dan dilaporkan beserta realisasi anggaran secara online melalui situs <http://esakip.jabarprov.go.id/login.php>. Indikator yang belum dapat diukur pada triwulan 1, 2 dan 3 maka menggunakan angka realisasi pada tahun 2015. Indikator yang belum dapat diukur pada triwulan 1, 2 dan 3 ini adalah IPG, IDG, Jumlah Kota Layak Anak dan Keluarga Pra Sejahtera.

Hasil pengukuran capaian indikator kinerja triwulanan, dikaitkan dengan realisasi anggaran triwulanan, dapat dilihat pada Lampiran 13.

3.1.2. Perbandingan Realisasi dan Capaian Kinerja Tahun 2012 - 2015

Realisasi dan capaian indikator kinerja BP3AKB Provinsi Jawa Barat dalam kurun waktu 3 Tahun ke belakang menunjukkan angka yang terus meningkat. Indikator kinerja ini diambil dari RPJMD dan RENSTRA Tahun 2013-2018.

Indeks Pembangunan Gender (IPG) yang diukur oleh Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KPPPA) bekerjasama dengan BPS RI, menunjukkan angka yang terus meningkat, yaitu 62,38 poin pada Tahun 2011, meningkat 0.87 poin menjadi 63.25 poin pada Tahun 2012. Selanjutnya pada Tahun 2013 menjadi 63.68 poin (bertambah 0.43 poin), Tahun 2014 sebesar 64.61 poin (bertambah 0.93 poin).

Capaian IPG mulai tahun 2015 berubah menjadi persen, menyelaraskan ketetapan UNDP. KPPPA dan BPS memberikan angka konversi untuk penghitungan IPG lima

tahun ke belakang yaitu menjadi : Tahun 2012 sebesar 87.1%, 2013 88.21%, 2014 88.35% dan 2015 89.68%. artinya setiap tahun tercapai kenaikan walaupun dengan besaran bervariasi yaitu mulai tahun 2013 bertambah sebesar 1.11%, 0.14% dan 0.76%.

Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) yang juga diukur oleh KPPPA dan BPS RI, menunjukkan angka yang meningkat pula. Namun Tahun 2013 mengalami sedikit penurunan. Angka IDG Tahun 2010 adalah 67.01 poin, Tahun 2011 meningkat 1.07 poin menjadi 68.08 poin, Tahun 2012 bertambah 0.54 poin menjadi 68.62 poin, namun Tahun 2013 berkurang -1.05 poin menjadi 67.57 poin. Kemudian meningkat kembali di tahun 2014 menjadi 68.87 poin dan 2015 menjadi 69.02 poin.

Apabila dikaji penurunan IDG di tahun 2013, terlihat dari komposit penyusun IDG, dalam perhitungan data BPS RI masih menggunakan data Tahun 2013 tetapi untuk komposit Jumlah Perempuan di Parlemen menggunakan angka Tahun 2014 (yaitu 22%) padahal jika konsisten dengan data lainnya seharusnya masih 24%.

Perolehan indikator kinerja Penghargaan Presiden RI “Anugerah Parahita Ekapraya” (APE) mulai diterima sejak Tahun 2011 (Kategori Pratama), 2012 dan 2013 yaitu APE Kategori Madya, dan pada Tahun 2014 meningkat menjadi APE Kategori Utama. Penghargaan ini diberikan kepada daerah-daerah yang dianggap berhasil dalam pembangunan Pengarusutamaan Gender, pemberdayaan perempuan serta perlindungan perempuan dan anak. Pada Tahun 2015 Pemerintah Pusat menetapkan Penilaian APE untuk dilaksanakan Tahun 2016, artinya pada Tahun 2015 tidak dilaksanakan penilaian Penghargaan APE.

Sebagai langkah persiapan penilaian APE tahun 2016, dilaksanakan pembahasan dan pembinaan penyusunan Produk Hukum bagi kabupaten/kota, baik produk hukum Pengarusutamaan Gender (PUG), pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, maupun ketahanan keluarga. Untuk bidang PUG, tahun 2013 diterbitkan Peraturan Gubernur tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan PUG di Provinsi Jawa Barat.

Cakupan penanganan korban kekerasan/trafficking setiap tahun menunjukkan angka 100% artinya setiap ada pelaporan, maka akan ditindaklanjuti melalui penanganan yang sesuai dengan kebutuhan/kondisi korban. Sementara itu selama tiga tahun terakhir, kasus kekerasan justru menunjukkan peningkatan, atau mungkin juga disebabkan semakin banyaknya masyarakat yang berani melaporkan berbagai kasus penyimpangan terutama terhadap anak. Sementara itu kasus trafficking selama tiga Tahun terakhir menunjukkan adanya penurunan walaupun tidak dapat menunjukkan angka yang tepat.

Indikator kinerja Jumlah Kelompok PEKKA (Perempuan Kepala Keluarga) pada Tahun 2014 menjadi total 491 kelompok, sampai tahun 2014 bertambah 27 kelompok PEKKA masing-masing 1 (satu) kelompok di setiap kabupaten/kota. Pada tahun 2015 jumlah Kelompok PEKKA sebanyak 493 kelompok. Jumlah ini terus mengalami penambahan setiap tahun, dan ada pula sebagian yang berkurang. Jumlah kelompok PEKKA Tahun 2011 sebanyak 412 kelompok, Tahun 2012 sebanyak 438 kelompok, Tahun 2013 sebanyak 464 kelompok dan Tahun 2014 menjadi 491 kelompok.

Indikator kinerja Jumlah Desa/Kelurahan P2WKSS yang aktif Tahun 2015 sebanyak 184 desa/kelurahan (kumulatif). Jumlah desa/kelurahan P2WKSS yang dimaksud disini

adalah desa/kelurahan yang sudah memperoleh penilaian sebagai pengelola P2WKSS yang baik. Jumlah penilaian ini terus bertambah setiap tahun sesuai pula dengan jumlah kabupaten/kota yang ada. Pada Tahun 2011 jumlahnya sebanyak 78 desa/kelurahan, Tahun 2012 sebanyak 104 desa/kelurahan, Tahun 2013 sebanyak 130 desa/kelurahan, Tahun 2014 sebanyak 157 desa/kelurahan dan 2015 sebanyak 184 desa/kelurahan. Artinya untuk indikator ini setiap tahun target tercapai 100%.

Indikator kinerja Jumlah Kota Layak Anak (KLA) yang mendapat Penghargaan Presiden sejak awal diselenggarakan Tahun 2011 terdapat 5 KLA, Tahun 2012 berjumlah 13 KLA. Pada Tahun 2013 bertambah sebanyak 7 desa/kelurahan sehingga kumulatif menjadi 20 desa/kelurahan, pada Tahun 2014 bertambah 8 desa/kelurahan menjadi 27 desa/kelurahan. Selanjutnya Tahun 2015 bertambah 8 desa/kelurahan sehingga total menjadi 35 desa/kelurahan KLA.

Indikator kinerja Prosentase Peserta KB Aktif terhadap Pasangan Usia Subur pada Tahun 2015 meningkat dibanding Tahun 2014 yaitu 74,68%. Tahun 2014 meningkat dibanding Tahun 2013 mencapai 73,18%. Sementara itu terjadi penurunan di Tahun 2013, yaitu Tahun 2011 sebesar 76,49%, Tahun 2012 sebesar 76,12% dan Tahun 2013 menurun menjadi 63,90%.

Indikator Kinerja (IKU) yang sulit untuk dicapai yaitu Prosentase KB Pria walaupun ditargetkan kecil saja. Sejak Tahun 2011-2014 ditargetkan hanya 3,00%, namun pada Tahun 2015 baru mencapai 2,49% dan tahun 2014 2,39%. Tahun 2011 angkanya lebih tinggi sedikit yaitu 2,45%, menurun menjadi 2,30% pada Tahun 2012 dan sedikit naik pada Tahun 2013 menjadi 2,32%.

Indikator kinerja yang sulit dihitung adalah Rata-rata Usia Kawin Pertama Wanita (UKPW). Dari target yang terus meningkat sejak 2011 yaitu 19,80 tahun dan target tahun 2014 menjadi 20,9 tahun. Data yang diperoleh adalah untuk Tahun 2012 yaitu sebesar 18,9 Tahun dan Tahun 2013 sampai 2015 sebesar 19,6 tahun. Capaian yang masih rendah memunculkan rencana untuk melakukan revaluasi terhadap target kinerja Tahun 2016 menjadi 20 tahun.

Selanjutnya indikator kinerja Jumlah Keluarga Pra Sejahtera pada Tahun 2014 ditargetkan 2,273,608 keluarga dan tercapai 2,390,125 KK Pra KS. Pada Tahun 2015 ditargetkan 2,020,985 keluarga dan tercapai 2,481,252 keluarga atau terjadi penambahan keluarga pra sejahtera.

Pada Tahun 2014 BP3AKB Provinsi Jawa Barat berhasil meningkatkan kategori penghargaan dari Presiden RI, yaitu “Anugerah Parahita Ekapraya” dari semula Kategori Madya menjadi Kategori Utama. Penghargaan disampaikan sebagai bukti keberhasilan pembangunan pengarusutamaan gender, pemberdayaan perempuan serta perlindungan perempuan dan anak. Penghargaan ini selanjutnya dilaksanakan dua tahun sekali. Artinya baru pada Tahun 2016 akan dilaksanakan penilaian kembali.

Evaluasi capaian indikator kinerja secara rinci disajikan pada Tabel di halaman berikut.

3.1.5. Realisasi Kinerja Indikator RPJMD dan RENSTRA

a. Realisasi Kinerja RPJMD

Realisasi indikator RPJMD yang berakhir pada Tahun 2018, sampai dengan Tahun 2016 tercapai antara 79% - 98%. Capaian terendah yaitu 79.62% adalah Jumlah desa/kelurahan P2WKSS yang mencapai 211 desa/kelurahan (sesuai target). Indikator ini memang dirancang untuk bertambah secara tetap setiap tahun sebanyak kabupaten dan kota yang ada di Jawa Barat sehingga pada Tahun 2018 akan mencapai 100%.

Indikator prosentase kasus kekerasan terhadap perempuan sampai dengan Tahun 2016 belum diperoleh data yang pasti, justru cenderung bertambah, dan hal ini belum tentu disebabkan makin bertambahnya kasus namun disebabkan semakin berani dan semakin sadarnya masyarakat dan juga korban untuk melapor. Setiap tahun diperkirakan lebih banyak kasus yang tidak dilaporkan dibanding laporan yang masuk (fenomena gunung es).

Tabel 3.1.5a.

PENCAPAIAN INDIKATOR KINERJA SASARAN TAHUN 2015-2016
TERHADAP TARGET RPJMD 2013-2018

Sasaran RPJMD	Sasaran Strategis BP3AKB	Indikator Sasaran RPJMD	Realisasi		Target RPJMD		% Capaian Kinerja 2015 thadap RPJMD	
			2015	2016	2016	2018	2016	2018
Meningkatkan kualitas ketahanan keluarga	Meningkatnya peran serta dan kesetaraan gender dalam pembangunan	Indeks Pembangunan Gender / IPG (poin)*	89.11	89.11	66,67	68	99.36	98.05
		Indeks Pemberdayaan Gender /IDG (poin)*	69.02	69.02	72.02	75	94.55	92.03
	Meningkatnya kualitas hidup dan perlindungan perempuan dan anak	Pemberdayaan Ekonomi Perempuan melalui program PEKKA (Jumlah Kelompok PEKKA)	493	501	545	599	91,93	86.81
		Jumlah Desa/ Kelurahan P2WKSS	184	211	211	265	100	79.62
		Prosentase kasus kekerasan terhadap perempuan (%)	#	#	40	15	#	#
Meningkatnya kualitas aksesibilitas layanan kesehatan masyarakat yang terjangkau dan merata	Menurunnya angka kelahiran dan meningkatnya ketahanan keluarga	Prosentase Peserta KB Aktif terhadap PUS ^	74.69	74.88	75	76.5	99.84	97.88

Keterangan :
* Data KPPPA dan BPS RI Tahun 2016
^ Data BKKBN Tahun 2016
Pengajuan Reviu RPJMD

b. Realisasi Kinerja RENSTRA BP3AKB

Realisasi Indikator Sasaran RENSTRA sampai dengan Tahun 2016 secara rinci dapat dilihat pada Lampiran 7.

Capaian indicator Tahun 2016 dibandingkan dengan target akhir RENSTRA Tahun 2018 berkisar antara 70.88% dan 100%. Persentase terkecil yaitu pada capaian target jumlah Keluarga Pra Sejahtera dimana pada Tahun 2014 dan 2015 terjadi penambahan penduduk miskin, dan kemudian pada semester 2 Tahun 2015 dapat diturunkan

kembali. Demikian pula pada Tahun 2016 jumlah penduduk miskin dapat ditekan kembali meskipun hanya 0.8%, dimana pada Tahun 2015 jumlah penduduk miskin sebanyak 9.53% menurun menjadi 8.77%.

Indikator utama pengarusutamaan gender yaitu IPG dan IDG mencapai angka yang cukup baik yaitu masing-masing 98.05% dan 92.03%, diharapkan pada tahun mendatang capaian target dapat dipacu sesuai target RENSTRA.

Pada tahun 2015 tidak dilaksanakan penilaian Anugerah Parahita Ekapraya (APE) sehingga tidak ada perolehan APE. Pemberitahuan yang mendadak sehingga terlanjur direncanakan dalam target jangka menengah.

Tabel 3.1.5
REALISASI INDIKATOR KINERJA TAHUN 2015-2016
TERHADAP TARGET RENSTRA 2013-2018

TUJUAN RENSTRA	Sasaran Strategis RENSTRA BP3AKB	Indikator Sasaran RENSTRA	Realisasi Tahun		Target RENSTRA 2016	% Capaian Kinerja 2016 thadap RENSTRA	TARGET RENSTRA 2018
			2015	2016			
Meningkatkan implementasi dan kerjasama pengarusutamaan gender dalam pembangunan daerah Jawa Barat	Meningkatnya peran serta dan kesetaraan gender dalam pembangunan	Indeks Pembangunan Gender / IPG (poin)*	89.11	89.11	89.68	98.05	90.88
		Indeks Pemberdayaan Gender /IDG (poin)*	69.02	69.02	72.02	92.03	75
		Prosentase kab/kota yang telah membentuk POKJA PUG	60	74.07	80	74.07	100
		Jumlah Perolehan Anugerah Parahita Ekapraya kab/kota	8	13	9	65.00	20
Meningkatkan kualitas hidup perempuan serta fasilitasi perlindungan dan pemenuhan hak perempuan dan anak	Meningkatnya kualitas hidup dan perlindungan perempuan dan anak	Cakupan penanganan kekerasan terhadap perempuan	100	100	100	100	100
		Meningkatnya penanganan kekerasan terhadap perempuan	-	10	10	100	30
		Meningkatnya jumlah perempuan birokrat dalam manajemen	18.33	23.49	20	78.30	30
		Jumlah Kelompok PEKKA/ Pemberdayaan perempuan melalui Program PEKKA	493	501	545	83.64	599
		Prosentase Anggota Parlemen perempuan	22	22	26	84.62	30
		Jumlah Kota Layak Anak (KLA)	35	35	38	97.92	64
Pengendalian kependudukan dan meningkatkan ketahanan keluarga	Menurunnya angka kelahiran dan meningkatnya ketahanan keluarga	Prosentase Peserta KB Aktif terhadap PUS ^	74,69	74,88	75	99.84	76.50
		Rata-Rata Usia Kawin Pertama Wanita ^ (UKPW)	1.,60	19.60	20	98	20.32
		Menurunnya Jumlah keluarga Pra sejahtera ^	2,481,251 (9,53%)	2,283,376 (8.77%)	1,768,362	70.88	1.263.116

3.1.6. Analisis Keberhasilan/Kegagalan

Indeks Pembangunan Gender (IPG) dan Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) terakhir, yaitu masing-masing sebesar 89.11% dan 69.02 poin masih belum mencapai 100% dari target tahunan. Meskipun demikian terjadi peningkatan angka dari tahun ke tahun yang menunjukkan hasil pembangunan Jawa Barat.

Perolehan penghargaan APE dengan capaian target 144.44%, Provinsi Jawa Barat sendiri Tahun 2016 kembali diraih APE dan meningkat pula yaitu dari Kategori Utama menjadi APE Kategori Mentor. Peraihan APE ini merupakan indikator keberhasilan pembangunan terintegrasi Jawa Barat dalam bidang pengarusutamaan gender, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak. Upaya untuk mencapai target sasaran ini yaitu melalui pembekalan, sosialisasi dan pelatihan mengenai pengarusutamaan gender serta perencanaan dan penganggaran responsif gender (PPRG) untuk aparat OPD Provinsi Jawa Barat sudah dilaksanakan sejak Tahun 2010. Pada tahap awal dilaksanakan untuk pejabat eselon II, III dan IV, selanjutnya dikembangkan untuk para pejabat di kabupaten dan kota. Melalui upaya ini, telah dibentuk POKJA PUG di OPD Jawa Barat untuk mendukung penganggaran yang responsif gender. Serta POKJA PUG di 20 kabupaten dan kota di Jawa Barat.

Indikator meningkatnya penanganan kekerasan terhadap perempuan pada Tahun 2016 direalisasikan melalui pelatihan bagi para pengelola Unit Teknis Pelayanan dan dengan disediakan fasilitas kendaraan untuk melayani korban kekerasan, sehingga capaian peningkatan penanganan sebesar 10% dapat dicapai. Sedangkan indikator IKU yaitu cakupan penanganan kekerasan terhadap perempuan juga tidak lagi dijadikan indikator dalam perjanjian kinerja sejak 2016 karena nilainya sudah stagnan di 100%.

Selanjutnya untuk indikator prosentase perempuan di parlemen yang hanya mencapai 84.62% setiap tahun tidak akan mengalami peningkatan sampai berlangsung PEMILU selanjutnya. Oleh karena itu, indikator ini mulai tahun 2016 tidak dimasukkan kedalam perjanjian kinerja karena nilainya akan stagnan.

Dalam aspek pengelolaan anggaran, BKP Jawa Barat kembali memberikan predikat WTP (Wajar Tanpa Pengecualian) kepada BP3AKB Provinsi Jawa Barat atas keberhasilan dalam pelaporan keuangan. WTP merupakan pernyataan profesional pemeriksa mengenai kewajaran informasi keuangan yang disajikan dalam laporan keuangan yang didasarkan pada empat kriteria yakni kesesuaian dengan standar akuntansi pemerintahan, kecukupan pengungkapan (*adequate disclosures*), kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, dan efektivitas sistem pengendalian intern. Sampai dengan tahun 2016, sudah 6 (enam) tahun berturut-turut BP3AKB Provinsi Jawa Barat memperoleh predikat WTP.

3.1.7. Rencana Tindak Lanjut Program dan Kegiatan

Berdasarkan evaluasi keberhasilan dan kegagalan program/kegiatan tahun 2016, maka untuk tahun mendatang yaitu Tahun 2017, masih perlu dilaksanakan upaya percepatan untuk meningkatkan indikator IPG, IDG dan pengentasan kemiskinan. Artinya akan dilanjutkan dan ditingkatkan capaian program/kegiatan yang mendukung peningkatan ekonomi perempuan dan pemberdayaan perempuan. Disamping itu adanya kecenderungan terus terjadi kasus-kasus kekerasan memerlukan peningkatan upaya perlindungan perempuan dan anak.

Rencana Tindak Lanjut tahun mendatang adalah melaksanakan program dan kegiatan berikut :

Tabel 3.1.7a.

Rencana Program dan Kegiatan Tahun 2017

Program	Kegiatan	Rencana Anggaran (Rp.)
Program Peningkatan Peran Serta dan Kesetaraan Gender dalam Pembangunan		3,571,250,000
	Jejaring Kelembagaan dan Kerjasama Potensi Jawa Barat	1,095,072,000
	Gerakan Pengarusutamaan Gender	3,174,625,000
	Sistem Informasi Gender dan Anak (SIGA)	1,160,238,000
Program Peningkatan Kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan dan Anak		
	Perlindungan Perempuan (Trafficking, KDRT, dan Pornografi)	1,021,875,000
	Optimalisasi Peran Gugus Tugas di Jawa Barat	1,050,000,000
	Pelatihan Pencegahan dan Penanganan Program Trafficking dan Kekerasan	9,000,000,000
	Kesekretariatan P2TP2A	1,588,310,000
	Operasional P2TP2A	1,841,125,000
	Peningkatan Kualitas Hidup Perempuan	2,661,000,000
	Pemberdayaan Perempuan Politik	420,000,000
	Pemenuhan Hak Partisipasi Anak	1,200,000,000
	Peningkatan Kesejahteraan Anak	1,710,000,000
	Perlindungan Anak	2,602,500 ,000
	Pengembangan Kota Layak Anak	1,740,000,000
	Gerakan Nasional Aksi Kejahatan Seksual Terhadap Anak (GN-AKSA) Jabar Tolak Kekerasan terhadap Anak	2,500,000,000
Program Penataan Administrasi Kependudukan	Pengendalian Kependudukan di Jawa Barat	1,110,375,000
Program Ketahanan Keluarga dan Kesejahteraan Keluarga	Ketahanan Keluarga	12,000,000,000
Program Pelayanan Keluarga Berencana	Peningkatan Kesertaan Ber-KB	1,500,000,000
Program Pendewasaan Usia Perkawinan (PUP)	Pendewasaan Usia Perkawinan (PUP)	1,125,000,000
Program Perencanaan Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah	Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi BP3AKB	800,000,000

Rencana Tindak Lanjut Dua Tahun Mendatang

Pada Tahun 2018 masih diperlukan kelanjutan program dan kegiatan yang didasari hasil evaluasi capaian indicator kinerja pada akhir tahun 2016. Artinya masih diperlukan upaya peningkatan kualitas hidup perempuan melalui pemberdayaan perempuan serta perlindungan perempuan dan anak.

Tabel 3.1.7b.
Rencana Program dan Kegiatan Tahun 2018

URAIAN	KEGIATAN	RENCANA ANGGARAN (RP.)
Kegiatan Unggulan		
	Perlindungan Perempuan (Trafficking, KDRT, dan Pornografi)	1,021,875,000
	Gerakan Pengarusutamaan Gender	3,174,625,000
	Pengembangan Kota Layak Anak	1,740,000,000
	Peningkatan Kualitas Hidup Perempuan	2,661,000,000
	Perlindungan Anak	2,602,500,000
	Gerakan Nasional Aksi Kejahatan Seksual Terhadap Anak (GN-AKSA) Jabar Tolak Kekerasan terhadap Anak	2,500,000,000
	Ketahanan Keluarga	12,000,000,000
	Pendewasaan Usia Perkawinan (PUP)	1,125,000,000
Kegiatan Tahunan		
	Sistem Informasi Gender dan Anak (SIGA)	1,160,238,000
	Jejaring Kelembagaan dan Kerjasama Potensi Jawa Barat	1,095,072,000
	Optimalisasi Peran Gugus Tugas di Jawa Barat	1,050,000,000
	Pelatihan Pencegahan dan Penanganan Program Trafficking dan Kekerasan	9,000,000,000
	Kesekretariatan P2TP2A	1,588,310,000
	Operasional P2TP2A	1,841,125,000
	Pemberdayaan Perempuan Politik	420,000,000
	Pemenuhan Hak Partisipasi Anak	1,200,000,000
	Peningkatan Kesejahteraan Anak	1,710,000,000
	Pengendalian Kependudukan di Jawa Barat	1,110,375,000
	Peningkatan Kesertaan Ber-KB	1,500,000,000
	Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi BP3AKB	800,000,000

3.2. Akuntabilitas Anggaran

3.2.1. Akuntabilitas Anggaran dan Realisasi Belanja Daerah

Realisasi anggaran BP3AKB Tahun 2016 menurut sasaran strategis dan secara keseluruhan dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 3.2a.
Anggaran dan Realisasi Keuangan Per Sasaran Strategis Tahun 2016

No	Sasaran Strategis/ Program	Capaian Sasaran (%)*	Anggaran (Rp)	Realisasi Anggaran	
				(Rp)	(%)
1	Meningkatnya Peran Serta dan Kesenjangan Gender Dalam Pembangunan : <ul style="list-style-type: none"> - Program Peningkatan Peran Serta dan Kesenjangan Gender dalam Pembangunan - Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi BP3AKB 	107.74	4,283,750,000	4,030,287,400	94.08
2	Meningkatnya Kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan dan Anak : <ul style="list-style-type: none"> - Program Peningkatan Kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan dan Anak 	92.98	15,826,297,300	15,615,158,380	98.67
3	Menurunnya Angka Kelahiran dan Meningkatkan Ketahanan Keluarga : <ul style="list-style-type: none"> - Program Penataan Administrasi Kependudukan - Program Pelayanan Keluarga Berencana - Program Pendewasaan Usia Perkawinan - Program Ketahanan Keluarga dan Kesejahteraan Keluarga 	101.87	13,818,939,500	11,819,970,876	85.53
	TOTAL	94.62	33,928,986,800	31,275,556,656	92.18

Keterangan : Rincian perhitungan di Lampiran 7 (PPS)

Capaian target sasaran 1 terealisasi sebesar 107.74% dan seluruh kegiatan dapat terlaksana sepenuhnya. Penyerapan anggaran rata-rata sebesar 94.08% sehingga terdapat efisiensi sebesar $(100 - 94.08)\%$ atau 5.92%.

Capaian target sasaran 2 terealisasi 92.98% dan seluruh kegiatan dapat terlaksana, sedangkan penyerapan anggaran sebesar 98.67%.

Capaian target sasaran 3 sebesar 101.87%, walaupun terdapat sebagian kecil sub kegiatan yang volumenya kurang memenuhi target yaitu peserta pembekalan, namun secara keseluruhan output kegiatan tercapai seluruhnya. Sementara itu penyerapan anggaran sebesar 85.53% sehingga ada efisiensi sebesar $(100 - 85.53)\%$ atau 14.47%.

Tabel 3.2b.
Anggaran dan Realisasi Keuangan Tahun 2016

No	Uraian Program dan Kegiatan	Target Anggaran (Rp)	REALISASI ANGGARAN (Rp)	%
I.	BELANJA TIDAK LANGSUNG	11,038,000,000	10,233,730,506	92.71
1	Belanja Pegawai	11,038,000,000	10,233,730,506	92.71
II.	BELANJA LANGSUNG	45,381,466,800	41,865,825,758	92.25
A	Program Perencanaan Pengendalian Pengawasan Pembangunan Daerah	712,500,000	699,507,500	98.18
1	Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi BP3AKB	712,500,000	616,718,000	98.18
B	Penataan Administrasi Kependudukan	1,032,525,000	852,846,100	82.60
1	Pengendalian Kependudukan di Jawa Barat	1,032,525,000	852,846,100	82.60
C	Program Peningkatan Peran Serta dan Kesetaraan Gender	3,571,250,000	3,048,811,615	85.37
1	Jejaring Kelembagaan dan Kerjasama Potensi Jawa Barat	810,000,000	729,083,300	90.01
2	Gerakan Pengarusutamaan Gender	900,000,000	862,537,600	95.84
3	Pengarusutamaan Gender (PUG) - Pemberdayaan Perempuan & Perlindungan Anak di Provinsi Jawa Barat	1,051,250,000	1,039,600,000	98.89
4	Sistim Informasi Gender dan Anak (SIGA)	810,000,000	699,559,000	86.37
D	Program Peningkatan Kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan dan Anak	15,826,297,300	13,448,182,922	84.97
1	Peringatan Hari Anak Nasional	665,000,000	652,097,000	98.06
2	Peningkatan Kreatifitas dan Pemenuhan Hak Partisipasi Anak	1,000,000,000	988,470,600	98.85
3	Pengembangan Kota Layak Anak	800,000,000	798,073,350	99.76
4	Perlindungan Anak	1,688,000,000	1,682,400,200	99.67
5	Jambore Forum Anak	1,300,000,000	1,241,293,205	95.48
6	Peringatan Hari Nasional Perempuan	855,000,000	849,000,000	99.30
7	Perlindungan Perempuan (Trafficking, KDRT, dan Pornografi)	2,020,000,000	2,012,010,600	99.60
8	Perempuan dan Kemandirian Berusaha Dalam upaya Peningkatan Produktivitas Ekonomi Perempuan/ PPEP (PEKKA)	712,500,000	712,500,000	100
9	Capacity Building Bagi Anggota KPPI Jawa Barat (Kaukus Perempuan Politik Indonesia)	380,000,000	325,940,000	85.77
10	Peningkatan Peranan Wanita menuju Keluarga Sehat dan Sejahtera (P2WKSS)	1,009,000,000	1,009,000,000	100
11	Women Self Defense/ Pertahanan Diri Bagi Perempuan Jawa Barat	616,797,300	616,797,300	100
12	Peningkatan Ketahanan keluarga bagi Dharma Wanita Provinsi Jawa Barat	1,000,000,000	997,900,000	99.79
	Pemberdayaan Ekonomi Perempuan melalui sistem SPP (Simpan Pinjam Perempuan)	230,000,000	230,000,000	100
	Penguatan Organisasi Perempuan Politik Jawa Barat	500,000,000	482,175,050	96.44
	Pembinaan Organisasi Perempuan	250,000,000	249,930,000	99.97
	Kesekretariatan P2TP2A Provinsi Jawa Barat	1,624,902,000	1,622,387,200	99.85
	P2TP2A Provinsi Jawa Barat Tahun 2016	1,175,098,000	1,145,183,875	97.45
E	Program Ketahanan Keluarga dan Kesejahteraan Keluarga			
1	Ketahanan Keluarga	750,000,000	610,437,898	81.39
2	Motivator Ketahanan Keluarga (MOTOKAR)	9,502,414,500	8,124,741,500	85.50
F	Program Pelayanan Keluarga Berencana	1,634,000,000	1,349,734,270	82.60
1	Peningkatan Kesertaan Ber-KB	1,634,000,000	1,349,734,270	82.60
G	Program Pendewasaan Usia Perkawinan	900,000,000	882,211,108	98.02
1	Pendewasaan Usia Perkawinan (PUP)	900,000,000	882,211,108	98.02

Program Pendukung Pemerintahan

No	Uraian Program dan Kegiatan	Target Anggaran (Rp)	Realisasi Anggaran (Rp)	%
H	Program Pengembangan Kompetensi Aparatur			
1	Pembinaan dan Pengembangan Aparatur BP3AKB	232,700,000	207,875,500	98.18
I	Program peningkatan kesejahteraan sumber daya aparatur			
1	Peningkatan kesejahteraan dan kemampuan aparatur BP3AKB	568,645,000	546,146,750.00	96.04
J.	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran			
1.	Penyelenggaraan administrasi perkantoran	5,423,630,000	5,247,161,860.00	96.75
2.	Iklan Layanan masyarakat BP3AKB	1,563,075,000	1,407,214,590.00	90.03
K.	Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur			
1.	Peningkatan sarana dan prasarana kantor BP3AKB	1,910,700,000	1,581,436,000.00	82.77
L.	Program pemeliharaan sarana dan prasarana aparatur			
1.	Pemeliharaan sarana dan prasarana kantor BP3AKB	1,553,730,000	1,210,574,902.00	77.91
M.	Program Pengelolaan Keuangan dan Kekayaan Daerah			
1.	Pengelolaan Keuangan BP3AKB Provinsi Jawa Barat	100,000,000	100,000,000	100

3.2.2..Efisiensi Sumber Daya

Menurut Tabel 3.2a., Capaian target sasaran 1 terealisasi sebesar 107.74% dan seluruh kegiatan dapat terlaksana sepenuhnya. Penyerapan anggaran rata-rata sebesar 94.08% sehingga terdapat efisiensi sebesar $(100 - 94.08)\%$ atau 5.92%.

Capaian target sasaran 2 terealisasi 92.98% dan seluruh kegiatan dapat terlaksana, sedangkan penyerapan anggaran sebesar 98.67%.

Capaian target sasaran 3 sebesar 101.87%, walaupun terdapat sebagian kecil sub kegiatan yang volumenya kurang memenuhi target yaitu peserta pembekalan, namun secara keseluruhan output kegiatan tercapai seluruhnya. Sementara itu penyerapan anggaran sebesar 85.53% sehingga ada efisiensi sebesar $(100 - 85.53)\%$ atau 14.47%.

Upaya yang dilakukan BP3AKB Provinsi Jawa Barat dalam rangka efisiensi sumber daya dengan rincian di Lampiran adalah :

- Lebih banyak memanfaatkan SDM internal daripada menyewa tenaga dari luar yang ongkosnya jauh lebih mahal, misalnya dalam melakukan penyusunan dan reviu Renstra, menyusun instrumen pengumpulan data
- Meningkatkan kualitas SDM internal dengan memberikan pembinaan rutin, pembinaan mental rutin, diikutsertakan dalam kegiatan sosialisasi/ pelatihan yang diselenggarakan untuk OPD lain

- Mengurangi penyewaan hotel yaitu dengan lebih banyak menggunakan ruangan Aula kantor BP3AKB Provinsi Jawa Barat untuk kegiatan yang tidak memerlukan penginapan
- Melakukan pembelian barang hanya jika sudah dibutuhkan
- Menyusun laporan akuntabilitas yang baik untuk menjamin transparansi dan menghindari penyelewengan anggaran
- Mengembalikan anggaran yang tidak terpakai tanpa memaksakan untuk mengadakan kegiatan yang tidak diperlukan
- Melakukan pemadaman lampu di ruangan yang tidak dipergunakan.

3.3. Penghargaan yang Diraih BP3AKB Tahun 2016

Hasil kerja keras dan koordinasi BP3AKB Provinsi Jawa Barat selama ini menghasilkan apresiasi yang menggembirakan. Pada Tahun 2016 diperoleh beberapa penghargaan di tingkat nasional dan provinsi.

Anugerah Parahita Ekapraya Kategori Mentor

Pada tahun 2016 Jawa Barat kembali meraih Anugerah Parahita Ekapraya Kategori Mentor. Peraih APE sebagai hasil kerja keras BP3AKB Provinsi Jawa Barat melalui Kegiatan Pengarusutamaan Gender (PUG) - Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak di Provinsi Jawa Barat, dimana seluruh OPD terkait Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dikoordinasikan untuk saling bekerjasama mendukung penjabaran pengarusutamaan gender, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak di Jawa Barat.

Anugerah Parahita Ekapraya (APE) merupakan penghargaan bergengsi yang diberikan pada kementerian/lembaga serta pemerintah daerah baik provinsi maupun kabupaten/kota yang dinilai telah berkomitmen dan mengimplementasikan strategi yang terkait dengan Pengarusutamaan Gender (PUG), Pemberdayaan Perempuan (PP) dan Perlindungan Anak (PA) di berbagai sektor pembangunan.

Penghargaan APE diserahkan oleh Wakil Presiden RI Jusuf Kalla di Istana Wapres Jakarta, Rabu 21 Desember 2016 kepada Gubernur Jawa Barat Ahmad Heryawan.

Berbeda dengan raihan tahun-tahun sebelumnya di mana Jawa Barat meraih penghargaan APE untuk kategori Pratama, Madya dan kemudian Utama dua kali berturut-turut, tahun ini Provinsi Jawa Barat mampu meraih kategori tertinggi yaitu **Mentor** untuk 3 *Dimensi* yaitu pemberdayaan perempuan, perlindungan anak dan pemenuhan hak anak.



Dari 17 provinsi yang mendapat Penghargaan APE, Jawa Barat termasuk 6 provinsi yang menerima APE untuk kategori Mentor.

Untuk mendapatkan Kategori Mentor, suatu daerah harus mendapatkan tiga kali penghargaan ini. Namun berbeda dengan Jawa Barat yang cukup dua kali karena dinilai Kementerian PPA sudah luar biasa dalam komitmennya dalam melaksanakan pembangunan kesetaraan gender, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak

serta berhak atas piala Platinum dan sertifikat. Selain Provinsi Jawa Barat, sebanyak 13 Kabupaten dan Kota di Jawa Barat pun meraih penghargaan APE 2016 ini. Untuk Kota yaitu Bandung, Cimahi, Depok, Sukabumi, Banjar dan Kota Bekasi. Untuk Kabupaten diraih oleh Kabupaten Bandung Barat, Cirebon, Kuningan, Bogor, Sukabumi, Sumedang dan Kabupaten Cianjur.



Gubernur Jawa Barat menerima Penghargaan APE Kategori Mentor dari Wakil Presiden Yusuf Kalla di Istana Wakil Presiden, Jakarta 21 Desember 2016



Kepala BP3AKB Provinsi Jawa Barat bersama Gubernur Jawa Barat menerima Penghargaan APE

Forum Anak Daerah Jawa Barat Raih Juara I DAFA Award 2016

Hasil pembinaan dan pelatihan BP3AKB yang intensif selama ini terhadap Forum Anak Daerah (FAD) membuahkan hasil peraihan Juara ke-1 Penghargaan DAFA Award tahun 2016. Juara kedua diraih FAD Provinsi Kepulauan Riau dan ketiga diraih oleh FAD Provinsi Jambi.

DAFA adalah singkatan dari Data dan Informasi, DAFA Award merupakan penghargaan untuk ajang pengumpulan data dan informasi Forum Anak se-Indonesia. DAFA Award diberikan setiap tahun guna memberikan insentif dalam upaya memperbaharui data-data

perkembangan forum anak. Pengumpulan data dan informasi data anak ini harus memiliki aturan melalui Surat Keputusan Kepala Daerah dilengkapi dengan kegiatan-kegiatan yang bisa memenuhi hak anak.

Prestasi BP3AKB lainnya dalam upaya pemenuhan hak anak adalah Jawa Barat mendapatkan penghargaan Forum Anak Kabupaten terbaik ke-2 setelah Kabupaten Bogor. Selanjutnya juga meraih Juara ke-2 Forum Anak Kecamatan terbaik yaitu diraih Forum Anak Kecamatan Sawangan Kota Depok.



Penghargaan ini disampaikan pada acara Forum Anak Nasional yang dipusatkan di Hotel Lombok Raya, Pulau Lombok.



bp3akb.jabarprov.go.id Raih Juara I Website Terbaik Kominfo Awards Tahun 2016

Sebagai bentuk apresiasi Pemerintah Provinsi Jawa Barat melalui Diskominfo Prov. Jabar terhadap para pihak stakeholder yang telah menunjukkan prestasinya, diselenggarakan gelaran Kominfo Awards yang berlangsung di Krakatau Convention Hall Hotel Horison Bandung, Rabu (7/12). Gelaran Kominfo Awards ini telah berlangsung sejak tahun 2014.

Diskominfo Awards diberikan kepada lembaga dan perseorangan untuk kategori :

Logistik Awards, Lomba Stand Up Comedy, Komunitas TIK, Kategori Website terbaik tingkat OPD Provinsi Jabar, e-Government, dan LPSE terbaik kabupaten dan kota di Jawa Barat.



- 1) Pemenang untuk Kategori Bidang Logistik, yaitu : PT Indah Berkah Saudara (JNE Depok), PT Cipta Pesona Abadi dan PT Mega Trans Jawa.
- 2) Untuk Komunitas TIK pemenangnya : 1. Code Margonda Kota Depok; 2. Relawan TIK Kab.Majalengka; 3.Sinau Academy Kab.Bekasi; 4. Pemerintah Desa Ciburial (Desa Ciburial Berbasis TIK) Kab.Bandung; 5.SPKP Giri Mukti Kabupaten Cianjur.
- 3) Untuk Kategori Bidang Website :
 1. **bp3akb.jabarprov.go.id**;
 2. bkpd.jabarprov.go.id;
 3. dishub.jabarprov.go.id;
 4. bp3iptek.jabarprov.go.id (most improved);
 5. disbun.jabarprov.go.id (Lifetime Achievement Awards);
 6. badiklatda.jabarprov.go.id (Sectoral Achievement).
- 4) Untuk sub kategori pengelolaan media sosial dimenangkan oleh Biro Humas, Protokol dan Umum.
- 5) Untuk sub kategori pengelola website berdasarkan terbaik penyampaian laporan, yaitu : Dinas Peternakan Provinsi Jawa Barat. Penghargaan diberikan pula kepada Dinas Perkebunan Provinsi Jawa Barat yang masuk nominator Lomba Situs SKPD Lingkup Pertanian dalam Lomba Website Kementrian Pertanian Tahun 2016.

Juara III BKD Award

Badan Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana (BP3AKB) Provinsi Jawa Barat meraih penghargaan Juara ke-3 Klaster III Manajemen Kepegawaian yang Bermutu, Akuntabel, Inovatif dan Kreatif (BAIK) pada BKD (Badan Kepegawaian Daerah) Award. Piala penghargaan diserahkan langsung oleh Gubernur Jawa Barat Ahmad Heryawan kepada Kepala BP3AKB Provinsi Jawa Barat.

Untuk lomba manajemen kepegawaian tersebut, Instrumen yang dinilai adalah:

- 1) Komitmen pimpinan
 - 2) Aspek pengelolaan data informasi kepegawaian
 - 3) Aspek administrasi kepegawaian
 - 4) Aspek pengembangan pegawai
 - 5) Aspek kesejahteraan dan disiplin
 - 6) Aspek inovasi pelayanan kepegawaian
- Peringkat untuk Klaster III selengkapnya:
- 1) Diskominfo
 - 2) BPLHD
 - 3) **BP3AKB**
 - 4) Kantor perwakilan
 - 5) BKPP Will II Purwakarta



Juara Tim Senam Jumsih PORPEMPROV JABAR XIV

PORPEMPROV Jawa Barat XIV yang berlangsung selama 3 hari, 30 Mei hingga 1 Juni 2016 diikuti oleh seluruh perwakilan PNS Jawa Barat dari masing-masing SKPD. Porpemprov mempertandingkan 13 Cabang Olah Raga. Pada PORPEMPROV XIV ini, tim senam BP3AKB meraih Juara I Senam Jumsih. Pembagian piagam kejuaraan diserahkan pada Upacara Penutupan PORPEMPROV JABAR XIV di Halaman Gedung Sate oleh Wakil Gubernur Jawa Barat.

Selanjutnya Kepala Badan BP3AKB memberikan apresiasi kepada Tim Senam PORPEMPROV JABAR XIV BP3AKB dengan menyematkan medali juara kepada para anggota tim senam. Di hadapan staf dan karyawan BP3AKB, beliau juga berpesan serta berharap prestasi juara tim senam ini bisa dijadikan *trigger* untuk seluruh pegawai BP3AKB dalam meraih prestasi-prestasi lain ke depannya.



BAB IV

PENUTUP

4.1 Keberhasilan dan Kegagalan Kinerja Sasaran Strategik

- 1) Keberhasilan kinerja bidang pengarusutamaan gender, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak membuahkan hasil peraihan Penghargaan Presiden Anugerah Parahita Ekapraya Kategori Mentor, yaitu kategori tertinggi dalam penilaian penghargaan APE ini
- 2) Pemulangan korban kekerasan berupa trafficking atau perdagangan orang, pada Tahun 2016 berhasil dijemput dan dipulangkan sebanyak 37 orang korban trafficking. Sementara itu Tahun 2015 BP3AKB berhasil memulangkan 11 orang korban trafficking sehingga total sejak berdirinya BP3AKB, 309 orang korban sudah berhasil dipulangkan ke tempat asal
- 3) Pada Tahun 2016 ditargetkan sebanyak 9 kabupaten/kota mendapatkan Penghargaan Anugerah Parahita Ekapraya. Dalam penilaiannya, terdapat 13 kabupaten dan kota yang memperoleh Penghargaan APE ini yaitu Kota Bandung, Cimahi, Depok, Sukabumi, Banjar dan Kota Bekasi. Untuk Kabupaten diraih oleh Kabupaten Bandung Barat, Cirebon, Kuningan, Bogor, Sukabumi, Sumedang dan Kabupaten Cianjur.
- 4) Prosentase Peserta KB Aktif terhadap Pasangan Usia Subur pada Tahun 2016 mengalami sedikit peningkatan, dari 74.69% menjadi 74.88%, sedangkan Prosentase KB Pria masih tetap berada pada angka 2.49%.
- 5) Capaian angka menurunnya Keluarga Pra Sejahtera belum mencapai hasil terbaik sesuai target RPJMD, namun pada Tahun 2016 terdapat penurunan penduduk miskin dari 9.53% menjadi 8.77% atau menurun sebesar 0.76%.
- 6) Dalam aspek keuangan, dari alokasi anggaran Belanja Langsung sebesar Rp.45,381,466,800 terealisasi sebesar Rp.41,865,825,758 (92.25%). Sedangkan alokasi anggaran Belanja Tidak Langsung sebesar Rp.11,038,000,000 terealisasi sebesar Rp.10,232,930,506 (92.71%).

4.2. Kendala dan Hambatan Pencapaian Kinerja Sasaran Strategik serta Langkah Antisipatif dan Strategi Pemecahan Masalah

Kendala dan hambatan yang dihadapi dalam pelaksanaan kinerja Tahun 2016 adalah :

- 1) Tidak adanya hubungan diplomatik antara Indonesia dengan beberapa negara, diantaranya Taiwan menjadi kendala penanganan atau penjemputan korban-korban trafficking. Data tentang adanya korban-korban trafficking di Taiwan sudah diterima namun tidak dapat ditindak lanjut dengan penjemputan. Konsekuensinya adalah realisasi anggaran kurang mencapai target. Demikian pula terdapat kebijakan anggaran di akhir semester II sehingga terdapat sub kegiatan yang tidak jadi dilaksanakan

- 2) Adanya kebijakan Pemerintah Pusat melalui Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KPPPA) pada Tahun 2016 untuk tidak melaksanakan Penilaian KLA Kabupaten/Kota, sehingga indikator Perjanjian Kinerja 2016 tentang “Jumlah kabupaten/kota yang mendapat penghargaan Kota Layak Anak (KLA)” tidak dapat dihitung.

Langkah Antisipatif yang dilakukan adalah :

- 1) Melanjutkan komunikasi untuk memantau kondisi korban trafficking di luar negeri dan mengembalikan anggaran yang sudah dialokasikan ke Kas Daerah
- 2) Mempersiapkan kabupaten dan kota yang akan dicalonkan untuk mendapat Penghargaan Kota Layak Anak di Tahun 2017 dengan memberikan pembinaan, koordinasi dan fasilitasi yang lebih intensif.

Strategi pemecahan masalah untuk mengatasi kendala dan hambatan :

- 1) Menjajagi kerjasama dan meningkatkan koordinasi dengan instansi lain, baik tingkat regional maupun nasional, antara lain Kementerian Luar Negeri untuk mencari cara lain agar korban-korban trafficking yang berada di Negara lain yang tidak memiliki hubungan diplomatik dapat dijemput dan dipulangkan korban ke daerah asal
- 2) Meningkatkan koordinasi dengan KPPPA terkait adanya kebijakan jangka menengah maupun kebijakan tahunan yang akan berubah.

Bandung, 5 Januari 2017

KEPALA BP3AKB PROVINSI JAWA BARAT

Dr. Ir. DEWI SARTIKA, M.Si.
NIP. 19630122 1986032004

Lampiran 7. INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) GUBERNUR

15

LAMPIRAN II KEPUTUSAN GUBERNUR JAWA BARAT
NOMOR : 061/Kep.1409-Org/2015
TENTANG : INDIKATOR KINERJA UTAMA
PEMERINTAH DAERAH PROVINSI DAN
ORGANISASI PERANGKAT DAERAH DI
LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH
PROVINSI JAWA BARAT.

INDIKATOR KINERJA UTAMA ORGANISASI PERANGKAT DAERAH
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI JAWA BARAT

1. Nama Organisasi : Inspektorat
Tugas : melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan urusan pemerintahan di Daerah, pelaksanaan pembinaan atas penyelenggaraan pemerintahan Kabupaten/Kota dan pelaksanaan urusan pemerintahan di Kabupaten/Kota.
Fungsi : a. penyelenggaraan perencanaan program pengawasan;
b. penyelenggaraan perumusan kebijakan dan fasilitasi pengawasan;
c. penyelenggaraan pemeriksaan, pengusutan, pengujian, monitoring, evaluasi, review dan penilaian tugas pengawasan;
d. penyelenggaraan tugas lain sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

Indikator Kinerja Utama

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	PENJELASAN / FORMULASI	SUMBER DATA
1	2	3	4	5
1.	Meningkatnya peran pengawasan intern dalam melakukan pengawasan dan	Persentase penyelesaian tindak lanjut hasil pemeriksaan BPK-RI terhadap LKPD	Mengukur keberhasilan Inspektorat dalam mengawal akuntabilitas OPD Provinsi dalam menyelesaikan temuan hasil pemeriksaan BPK-RI atas LKPD Provinsi Jawa Barat	Berita Acara Hasil Pemutakhiran tindak lanjut temuan BPK-RI

108

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	PENJELASAN / FORMULASI	SUMBER DATA
1	2	3	4	5
		cendrung masih buruk, padahal air merupakan unsur utama dalam kehidupan/aktivitas manusia. Oleh karena itu, peningkatan kualitas air sungai sangat penting.	air merupakan unsur utama dalam kehidupan/aktivitas manusia. Oleh karena itu, peningkatan status mutu air sungai sangat penting dan indikator ini pun menjadi salah satu indikator dalam RPJMD Provinsi Jawa Barat tahun 2013-2018	
2.	Meningkatnya kapasitas penataan hukum Bidang Lingkungan Hidup	Prosentase penyelesaian kasus pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan melalui sanksi administrasi, ADR (<i>Alternative Dispute Resolution</i>) dan pengadilan yang ditindaklanjuti	Sebagai bentuk pengawasan dan pengendalian terhadap lingkungan dari kerusakan dan pencemaran akibat kegiatan atau usaha yang dilakukan	Badan Pengelolaan Lingkungan Hidup Daerah
3.	Terbangunnya kapasitas masyarakat yang peduli lingkungan	Jumlah desa yang berbudaya lingkungan (<i>eco village</i>)	Masyarakat merupakan kunci utama dalam meningkatkan kualitas lingkungan hidup. Dengan kegiatan ini diharapkan kesadaran masyarakat dapat meningkat	Badan Pengelolaan Lingkungan Hidup Daerah
4.	Terbangunnya kapasitas masyarakat yang peduli lingkungan	Jumlah sekolah yang mendapat penghargaan Adiwiyata dan Sekolah Berbudaya Lingkungan (SBL)	Adiwiyata dan SBL membentuk sekolah berbudaya lingkungan diharapkan siswi/siswa dapat menjadi kader lingkungan	Badan Pengelolaan Lingkungan Hidup Daerah
5.	Terwujudnya masyarakat yang adaptif terhadap perubahan iklim	Jumlah lokasi Program kampung Iklim (PROKLIM)	Perubahan iklim sudah menjadi isu nasional dan sangat mempengaruhi kehidupan masyarakat terutama di pedesaan	Badan Pengelolaan Lingkungan Hidup Daerah

37. Nama Organisasi : Badan Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, dan Keluarga Berencana
Tugas : menyelenggarakan perumusan bahan kebijakan teknis bidang pemberdayaan perempuan, perlindungan anak dan keluarga berencana, menyelenggarakan koordinasi, pembinaan, pengendalian, fasilitasi dan pelaksanaan urusan pemerintahan provinsi di bidang pemberdayaan perempuan, perlindungan anak dan keluarga berencana meliputi aspek peningkatan kualitas hidup dan perlindungan perempuan, pengarusutamaan gender dan

- kerjasama, kesejahteraan dan perlindungan anak serta keluarga berencana dan kesejahteraan keluarga.
- Fungsi : a. penyelenggaraan perumusan kebijakan teknis bidang pemberdayaan perempuan, perlindungan anak dan keluarga berencana;
- b. penyelenggaraan urusan pemerintahan provinsi bidang pemberdayaan perempuan, perlindungan anak dan keluarga berencana;
- c. penyelenggaraan koordinasi, pembinaan, pengendalian, dan fasilitasi pelaksanaan urusan pemerintahan provinsi di bidang pemberdayaan perempuan, perlindungan anak dan keluarga berencana; dan
- d. penyelenggaraan pengendalian, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan urusan pemerintahan provinsi di bidang pemberdayaan perempuan, perlindungan anak dan keluarga berencana.

Indikator Kinerja Utama

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	PENJELASAN / FORMULASI	SUMBER DATA
1	2	3	4	5
1.	Meningkatnya peran serta dan kesetaraan gender dalam pembangunan	Indeks Pembangunan Gender (IPG)	Indeks Pembangunan Gender atau IPG adalah merupakan indeks pencapaian kemampuan dasar pembangunan manusia yang sama seperti IPM yaitu terdiri dari komponen bidang pendidikan, kesehatan dan ekonomi namun dengan memperhatikan ketimpangan gender. Kesetaraan gender terjadi apabila nilai IPM sama dengan IPG	Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak bekerjasama dengan BPS RI Buku Pembangunan Manusia Berbasis Gender
		Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)	Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) adalah indeks komposit yang mengukur peran aktif perempuan dalam kehidupan ekonomi dan politik. Peran aktif perempuan dalam kehidupan ekonomi dan politik mencakup partisipasi berpolitik, partisipasi ekonomi dan pengambilan keputusan serta penguasaan sumber daya ekonomi	Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak bekerjasama dengan BPS RI Buku Pembangunan Manusia Berbasis Gender
		Penghargaan Presiden RI "Anugerah Parahita Ekaprava"	Anugerah Parahita Ekaprava disingkat APE adalah	Kementerian

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	PENJELASAN / FORMULASI	SUMBER DATA
1	2	3	4	5
		Parahita Ekaprava" (APE)	penghargaan yang diberikan oleh Presiden Republik Indonesia kepada daerah yang dianggap berhasil dalam pembangunan bidang pengarusutamaan gender (PUG), pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak	Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, BP3AKB Provinsi Jawa Barat
2.	Meningkatnya kualitas hidup dan perlindungan terhadap perempuan dan anak	Cakupan penanganan pengaduan korban kekerasan terhadap perempuan dan anak	Cakupan penanganan pengaduan korban kekerasan terhadap perempuan dan anak adalah tindakan penanganan bagi setiap laporan yang disampaikan ke BP3AKB/P2TP2A Provinsi Jawa Barat Rumus : Jumlah pengaduan yang masuk / Jumlah pengaduan yang ditangani x 100%	BP3AKB Provinsi Jawa Barat
		Pemberdayaan Perempuan melalui Program PEKKA	PEKKA atau Perempuan Kepala Keluarga disatu/lebih desa/kelurahan bergabung dalam satu kelompok usaha, kemudian diberikan fasilitasi bantuan pelatihan keterampilan dan bantuan modal untuk usaha	BP3AKB Provinsi Jawa Barat
		Jumlah Kota Layak Anak (KLA)	KLA adalah Desa/Kelurahan yang dinyatakan dan dibina sebagai KLA oleh kabupaten/kota kemudian dinilai oleh pihak Provinsi Jawa Barat dan diberikan bantuan untuk pembangunan prasarana pelengkap KLA	Pendataan primer BP3AKB Provinsi Jawa Barat
3.	Menurunnya angka kelahiran dan meningkatnya ketahanan keluarga	Prosentase Peserta KB Aktif terhadap Pasangan Usia Subur (PA/PUS)	Prosentase peserta KB Aktif terhadap Pasangan Usia Subur (PUS) adalah jumlah PUS yang pada saat ini masih menggunakan salah satu cara atau alat kontrasepsi (sebagai peserta KB Aktif) dibandingkan dengan jumlah seluruh PUS Rumus : $\frac{\text{Jml peserta KB Aktif}}{\text{Jml PUS}} \times 100$	BKKBN
		Prosentase peserta KB Pria	Prosentase peserta KB Pria adalah jumlah peserta KB	BKKBN

111

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	PENJELASAN / FORMULASI	SUMBER DATA
1	2	3	4	5
			Pria (suami) yang saat ini masih menggunakan salah satu alat atau cara kontrasepsi dibandingkan dengan jumlah seluruh peserta KB Aktif Rumus : $\frac{\text{Jumlah Peserta KB Pria}}{\text{Jumlah Peserta KB Aktif}} \times 100\%$	
		Keluarga Pra Sejahtera	Keluarga Pra Sejahtera yaitu keluarga yang belum dapat memenuhi kebutuhan dasarnya (<i>basic need</i>) secara minimal, seperti kebutuhan akan spiritual, pangan, sandang, papan, kesehatan dan KB	BPS Provinsi Jawa Barat

38. Nama Organisasi : Badan Penelitian Pengembangan dan Penerapan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi
- Tugas : menyelenggarakan perumusan kebijakan teknis bidang penelitian, pengembangan, penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi, menyelenggarakan koordinasi, pembinaan, pengendalian, fasilitasi dan pelaksanaan urusan pemerintahan provinsi di bidang penelitian, pengembangan serta penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi meliputi aspek penelitian, pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi terapan, analisis kebijakan dan pengembangan inovasi daerah serta kemitraan, layanan ilmu pengetahuan, teknologi.
- Fungsi :

a. penyelenggaraan perumusan kebijakan teknis bidang penelitian, pengembangan, penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi;

b. penyelenggaraan urusan pemerintahan provinsi bidang penelitian, pengembangan, penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi;

c. penyelenggaraan koordinasi, pembinaan, dan fasilitasi pelaksanaan urusan pemerintahan provinsi bidang penelitian, pengembangan, penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi; dan

d. penyelenggaraan pengendalian, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan urusan pemerintahan provinsi di

158

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	PENJELASAN / FORMULASI	SUMBER DATA
1	2	3	4	5
				Provinsi Jawa Barat - Badan Penanaman Modal Perijinan Terpadu Provinsi Jawa Barat - Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Provinsi Jawa Barat - Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jawa Barat - Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah Provinsi Jawa Barat

Ditetapkan di Bandung
Pada tanggal 21 Desember 2015

GUBERNUR JAWA BARAT,



AHMAD HERYAWAN